

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

TAHUN 2023

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Telp. (0740) 7370006





H. ROMI HARIYANTO, SE
Bupati Tanjung Jabung Timur



H. ROBBY NAHLIYANSYAH, SH
Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur



Sapril, S.IP
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



H. ROMI HARIYANTO, SE
Bupati Tanjung Jabung Timur



H. ROBBY NAHLIYANSYAH, SH
Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur



Sapril, S.IP
Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 merupakan media penyampaian informasi kinerja pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sebagai wujud pelaksanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Secara eksternal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam rangka menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu alat kendali untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Muara Sabak, Maret 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO, SE.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KELEMBAGAAN	38
C. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	48
D. ISSU-ISSU STRATEGIS	77
E. MAKSUD DAN TUJUAN	78
F. LANDASAN PENYUSUNAN	79
G. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA TAHUN 2023	81
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	83
A. VISI DAN MISI	86
B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	88
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	90
D. PERJANJIAN KINERJA	135
III. AKUNTABILITAS KINERJA	139
A. INDIKATOR KINERJA	140
B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	140
C. KINERJA KEUANGAN	204
IV. PENUTUP	210
A. SIMPULAN	210
B. SARAN	211
V. LAMPIRAN	
LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA UTAMA	
LAMPIRAN II. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN	
LAMPIRAN III. RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN	
LAMPIRAN IV. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN KABUPATEN	
LAMPIRAN V. POHON KINERJA KABUPATEN	
LAMPIRAN VI. CASCADING KABUPATEN	



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Tangung Jabung Timur Tahun 2023 merupakan LKjIP memasuki tahun kelima atau terakhir dalam rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Periode pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya Tahun 2021-2026 dimulai sejak dilantiknnya kembali Bupati Tangung Jabung Timur H. Romi Hariyanto, SE dan Wakil Bupati Kabupaten Tangung Jabung Timur H. Robby Nahliansyah, SH pada tanggal 26 April 2021. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tangung Jabung Timur berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Tahun 2021-2026 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

LKjIP Instansi Pemerintah Kabupaten Tangung Jabung Timur Tahun 2023 melaporkan capaian kinerja (*Performance Results*) selama tahun 2023 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 yang mengacu kepada RPJMD Tahun RPJMD Tahun 2021-2026 serta APBD Tahun 2023 berdasarkan arahan dari Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi Kementerian



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Sesuai dengan RPKD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Rata-rata Capaian Kinerja dari 4 misi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026, Tahun 2023 masuk kedalam kategori sangat tinggi yakni 78,60% lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	MISI KABUPATEN	RATA-RATA CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	
		2023	2022
1	MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN	93,47	66,13
2	MISI 2 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING	77,11	97,97
3	MISI 3 : MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI	66,67	110,53
4	MISI 4 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS	93,52	80,00
RATA-RATA		78,60	92,22



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Perkembangan kinerja makro pembangunan tercermin pada indikator ekonomi. Salah satu hal yang menonjol pada pencapaian indikator ekonomi adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari peningkatan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, bila dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor dominan. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui kebijakan memantapkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2023 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan RKPD di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada indikator kinerja program yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan, serta meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan
3. Lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
5. Lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat nasional maupun regional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi khususnya informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan lebih diberdayakan.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

1.1 LATAR BELAKANG

Tuntutan terselenggaranya “good governance” pada Pemerintah Daerah di era otonomi ini semakin dirasa. Dasar penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan dalam percepatan terselenggaranya “good governance”. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pengukuran kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Esensi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, adalah penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis (Renstra) yang didasarkan pada indikator, antara lain :

1. Masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan meliputi SDM, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya;



2. Keluaran (Output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Hasil (Outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini telah disesuaikan pula dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan;



3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa potensi daerah tersebut antara lain :

1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdiri sejak tahun 1999 dengan ibukota Muara Sabak berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan luas wilayah 5.445,0 Km².

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33 persen (225.047,6 Ha) merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura, serta Kawasan TNB yang luasnya mencapai 138.242 Ha, sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas 319.452,40 Ha (58,67 persen). Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2031, luas Wilayah Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih 8.507,70 Km² yang terdiri dari daratan seluas 5.085,705 Km² dan lautan atau perairan seluas 3.421,995 Km². Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5 persen dari panjang pantai Provinsi Jambi.

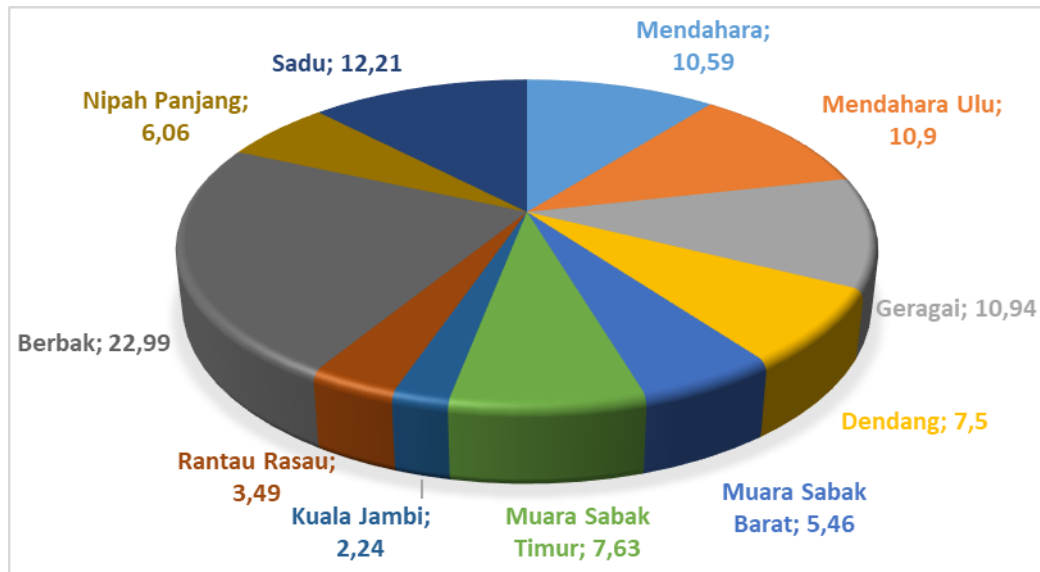
Apabila ditinjau dari sudut Kecamatan, wilayah terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kecamatan Berbak yaitu meliputi 22,99% dari luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kuala Jambi yaitu sebesar 2,24%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Gambar I.1.

Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurut Kecamatan



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Tabel I.1.

Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	538,578	10,59
2.	Mendahara Ulu	1	6	554,226	10,90
3.	Geragai	1	8	556,303	10,94
4.	Dendang	1	6	381,516	7,50
5.	Muara Sabak Barat	7	0	277,469	5,46
6.	Muara Sabak Timur	2	10	388,059	7,63
7.	Kuala Jambi	2	4	113,952	2,24
8.	Rantau Rasau	1	10	177,552	3,49
9.	Berbak	1	5	1.169,17	22,99
10.	Nipah Panjang	2	8	307,941	6,06
11.	Sadu	1	8	620,939	12,21
JUMLAH		20	73	5.085,705	100,00

Sumber : Perda No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011-2031



Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8 - 9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Sebaran desa/kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada di sekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53' Lintang Selatan sampai 1°41' Lintang Utara dan antara 103°23' - 104°31' Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, disebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.



1.1.3 Topografi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0 - 3 % (datar). Kondisi ini mempunyai drainase sangat terhambat sampai terhambat sehingga menjadi faktor kendala bagi pengembangan budidaya pertanian. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter di atas Project Reference Level (M + PRL). Acuan ketinggian di kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (*Bench Mark*) BK 63.

1.1.4 Geologi

Berdasarkan pada jenis batuan dan kesearangannya, maka akuifer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir.

Sistem akuifer ini terdapat pada sedimen lepas, yaitu endapan alluvial dan rawa yang disusun oleh material lepas berukuran lempung sampai kerakal. Permeabilitas pada umumnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Material halus pada umumnya mempunyai



kelulusan 10 - 5 s/d 10 - 2 m/h dan material kasar antara 10 - 1 s/d 10 - 2 m/h. Sebaran akuifer ini menempati daerah yang luas dengan ketebalan bervariasi mulai 5 s/d 40 m. Dari kondisi tersebut akuifer ini termasuk kedalam akuifer produktif sedang.

2. Sistem akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan rekahan.

Sistem akuifer ini terjadi dari berbagai jenis batuan yang bersifat padu dan kurang padu, menempati sebagian kecil daerah penyelidikan. Batuan yang termasuk dalam sistem akuifer ini dapat dikelompokkan menjadi 2 akuifer sebagai berikut :

- Satuan batuan vulkanik muda, terdiri atas breksi gunung api, lava, dan tufa bersusun andesit-basalt. Satuan ini berbentuk morfologi perbukitan bergelombang lemah dengan penyebaran terbatas meliputi daerah Geragai dan sekitarnya.
- Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat, terdiri atas batupasir, batulempung, serpih, batulanau dan napal. Dijumpai setempat-setempat dengan luas singkapan relatif sempit.

1.1.5 Hidrologi

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat menembus tanah atau mengalir sebagai *run off*, sehingga air



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

terjebak berupa rawa. Air permukaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah terutama pada musim penghujan yang menggenangi areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pola aliran permukaan air menjadikan daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang. Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau Daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam dan DAS Benuh.

DAS Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan terpanjang di kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang arahnya ke Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang. Sungai ini merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur.

Beberapa sungai besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan geometrik sungai berbentuk meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai permukiman dan lahan pertanian.



A. Pasang Air Laut

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditentukan oleh pasang surut air laut, air pasang sepanjang pantai Selat Berhala dibedakan atas tipe pasang kecil dan pasang besar.

- Pasang Kecil (Pasang perbani)
- Pasang Besar (Pasang purnama)

Tinggi muka air di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini ditentukan oleh pasang surut air laut. Selama pasang kecil (pasang perbani, *neap-tide*) pasang surut di kawasan perencanaan berpola semi diurnal, dengan 2 kali air pasang dan 2 kali air surut setiap harinya, sedangkan selama pasang besar (pasang purnama, *spring-tide*) pasang surut menjadi diurnal, dengan hanya satu kali pasang dan surut pada setiap hari. Perbedaan elevasi air tertinggi dan air terendah (*tidal range*) bervariasi antara 2 meter pada pasang kecil sampai 3,5 meter pada pasang besar. Pada musim hujan, muka air rata-rata di muara sungai adalah 10 - 30 cm lebih tinggi dari muka air pada musim kemarau. Variasi musiman ini akan bertambah lebih tinggi dari muara ke hulu sungai. Berdasarkan tata air, kawasan perencanaan dapat dibedakan menjadi kawasan tergenang periodik dan tergenang terus-menerus. Sebagian besar wilayah di kawasan perencanaan merupakan kawasan yang tergenang terus-menerus.



B. Fluktuasi Pasang Surut di Sungai dan Saluran

Fluktuasi pasang surut di sungai berangsur-angsur melemah semakin jauh dari pantai. Elevasi air rendah harian bertambah, sedangkan elevasi air tinggi tidak banyak berpengaruh. Selama waktu aliran tinggi (banjir) di Sungai Batanghari hampir tidak ada fluktuasi pasang yang terjadi di sebelah hulu (Simpang).

Tabel I.2

Tinggi Muka Air (dalam M + PRL)

Sungai & Lokasi	Jarak dr Muara Sungai	Pasang Surut	Musim Hujan				Musim Kemarau			
			Pasang	Rata ²	Surut	Range	Pasang	Rata ²	Surut	Range
Sungai Batanghari										
Pertemuan	61 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,90	+ 1,00	+ 1,50	+ 2,40	+ 1,50	+ 0,30	+ 2,10
Berbak		Rata ²	+ 2,30	+ 1,90	+ 1,20	+ 1,10	+ 2,20	+ 1,50	+ 0,50	+ 1,70
		Perbani	+ 2,20	+ 1,90	+ 1,50	+ 0,70	+ 2,10	+ 1,50	+ 0,90	+ 1,20
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,30										
Pertemuan	41 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,60	+ 0,20	+ 2,30	+ 2,40	+ 1,30	- 0,40	+ 2,80
Pamusiran		Rata ²	+ 2,30	+ 1,60	+ 0,50	+ 1,80	+ 2,20	+ 1,30	- 0,10	+ 2,30
		Perbani	+ 2,20	+ 1,60	+ 1,00	+ 1,20	+ 2,10	+ 1,30	+ 0,50	+ 1,60
Tinggi Banjir Maksimum : + 3,10										
Sungai Pamusiran										
Pamusiran	31 km	Purnama	+ 2,30	+ 1,50	+ 0,00	+ 2,30	+ 2,20	+ 1,20	- 0,60	+ 2,80
AWLR		Rata ²	+ 2,20	+ 1,50	+ 0,30	+ 1,90	+ 2,00	+ 1,20	- 0,30	+ 2,30
		Perbani	+ 2,10	+ 1,50	+ 1,80	+ 1,30	+ 1,90	+ 1,20	+ 0,30	+ 1,60
Tinggi Banjir Maksimum : + 2,80										
Sungai Berbak										
Nipah	0 km	Purnama	+ 2,50	+ 1,30	- 0,80	+ 3,30	+ 2,40	+ 1,10	- 0,10	+ 3,50
Panjang		Rata ²	+ 2,30	+ 1,30	- 0,40	+ 2,70	+ 2,20	+ 1,10	- 0,70	+ 2,90
		Perbani	+ 2,20	+ 1,30	+ 0,30	+ 1,90	+ 2,10	+ 1,10	+ 0,00	+ 2,10

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur 2011 – 2031

C. Kualitas Air dan Rembesan Air Laut

Selama musim kemarau, rembesan air laut mencapai areal Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Sungai Berbak, Sungai Batanghari, dan Sungai Pamusiran serta saluran-saluran drainase/irigasi.



Selama hal tersebut berlangsung, air tidak dapat dipergunakan untuk air minum atau untuk air tanaman tetapi air asin tidak berbahaya untuk tanaman yang tidak diirigasi dan juga tidak mempengaruhi air tanaman. Akibat pencucian dan drainase lahan, kualitas air saluran menjadi asam dan berwarna hitam, khususnya di awal musim hujan antara bulan September - Oktober. Air ini kurang cocok untuk keperluan air minum dan juga tidak baik dipakai untuk irigasi tanaman.

1.1.6 Klimatologi

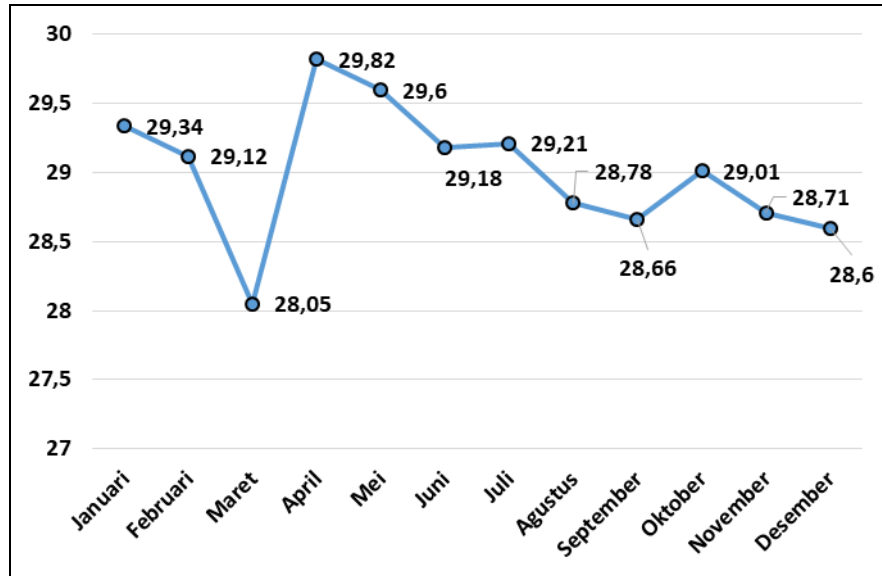
Iklm merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap berhasil tidaknya pembangunan. Kondisi iklim secara makro sangat sulit untuk dikendalikan karakteristiknya, karena dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk kawasan. Dalam hal ini kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 - 3.000 milimeter per tahun. Pada Tahun 2019 Suhu udara rata-rata sebesar 27,324° Celsius dengan Suhu Maksimum sebesar 28,246° Celsius pada bulan Mei dan Suhu Minimum sebesar 26,596° Celsius pada bulan April. Curah Hujan rata-rata sebesar 162,6 mm per tahun. Curah Hujan maksimum sebesar 319 mm pada bulan maret dan minimum sebesar 45 mm pada bulan Juli. Kondisi Suhu dan Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.2.

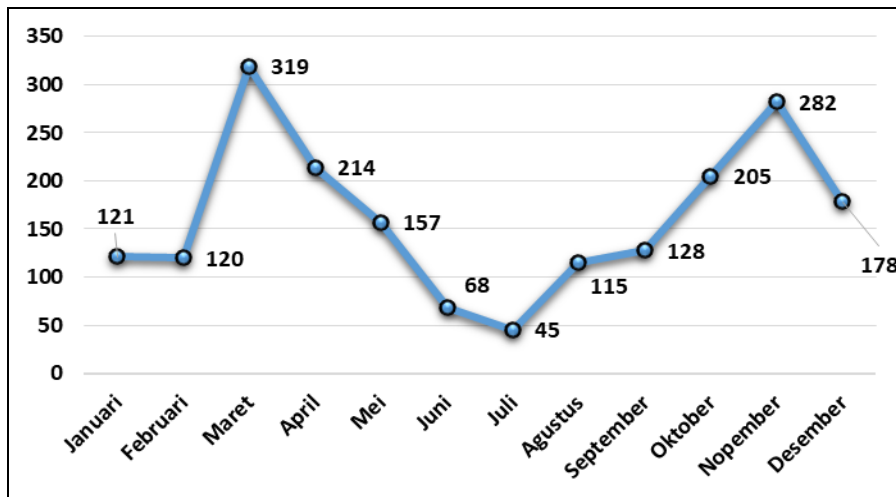
Kondisi Suhu Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2021

Gambar I.3.

Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber : BPS, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2020

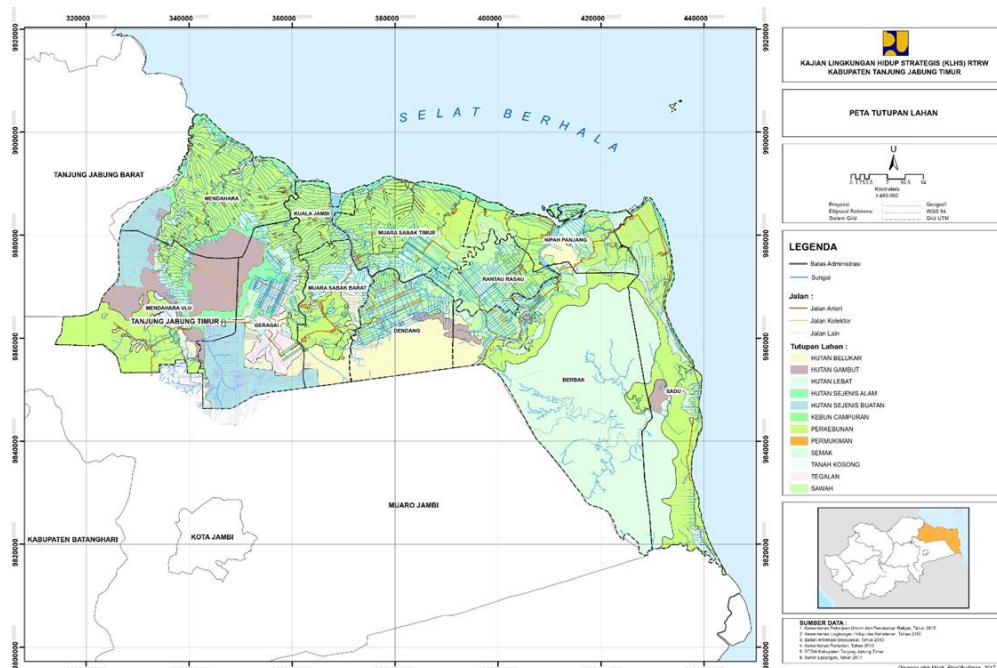


1.1.7 Penggunaan Lahan

Dari analisa yang dilakukan dengan menggunakan SIG (*interpretasi citra satelit*), maka diperoleh penggunaan lahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut

Gambar I.4.

Peta Guna Lahan Kab. Tanjung Jabung Timur



Sumber : Laporan Akhir Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 bertambah sebanyak 9.828 jiwa dari 219.985 jiwa pada tahun 2019 menjadi 229.813 jiwa pada tahun 2020 atau dengan laju pertumbuhan 1,1 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2019 sebesar 45 jiwa/km² dan sex ratio 104,33.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dari data pada tabel II.4 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Rantau Rasau, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah relatif kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Tabel I.3

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2019 dan 2020

Kecamatan	2019			2020		
	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Mendahara	26.443	104,22	29,01	26.675	104,23	50,00
Mendahara Ulu	19.001	112,87	49,83	16.676	108,14	30,00
Geragai	23.435	113,53	82,13	26.202	105,82	47,00
Dendang	15.078	103,76	31,53	16.485	103,95	43,00
Ma Sabak Barat	18.092	105,31	71,86	21.409	103,22	77,00
Ma Sabak Timur	31.475	101,13	76,72	32.606	102,36	84,00
Kuala Jambi	14.755	102,82	122,43	14.485	106,54	127,00
Rantau Rasau	23.831	104,86	66,92	24.780	103,52	140,00
Berbak	9.939	104,89	51,11	10.591	106,45	9,00
Nipah	25.660	102,22	109,33	26.503	102,48	86,00
Sadu	12.276	105,9	6,74	13.401	105,35	22,00
Jumlah	219.985	105,36	40,4	229.813	104,33	45,00

Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Dari tabel diatas terlihat dimana kepadatan penduduk pada tahun 2020 (45/Km²) meningkat dari tahun 2019 (40,4 Km²). Tahun 2020, tingkat kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Rantau Rasau yaitu sebesar 140/Km², sementara tingkat kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Berbak sebesar 9/ Km².



Selanjutnya, struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan kelompok usianya yang secara garis besar terbagi kedalam tiga kelompok yaitu usia belum produktif, usia produktif dan usia tidak produktif (usia lanjut). Kelompok usia belum produktif adalah penduduk berusia 0 - 14 tahun yang jumlahnya mencapai 55.654 jiwa atau sekitar 24,22 persen dari total jumlah penduduk. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja yaitu berumur 15 - 64 tahun. Kelompok usia ini merupakan tulang punggung perekonomian yang secara produktif melakukan aktivitas ekonomi untuk memperoleh pendapatan. Jumlah penduduk kelompok usia ini mencapai 159.877 jiwa atau 69,57 persen dari total jumlah penduduk. Selanjutnya Kelompok usia tidak produktif yaitu yang berumur dari 65 - 75+ mencapai 14.282 Jiwa atau sebesar 6,21 persen dari total jumlah penduduk. Pengelompokan umur penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin dan rasionya disajikan pada Tabel 1.4.



Tabel I.4

Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2020

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
0 - 4	8.896	8.804	17.700	101,04
5 - 9	9.665	9.473	19.138	102,03
10 - 14	9.620	9.196	18.816	104,61
15 - 19	9.650	9.257	18.907	104,25
20 - 24	9.978	9.576	19.554	104,20
25 - 29	9.613	9.219	18.832	104,27
30 - 34	9.911	9.620	19.531	103,02
35 - 39	9.810	9.099	18.909	107,81
40 - 44	8.895	8.557	17.452	103,95
45 - 49	7.922	7.614	15.536	104,05
50 - 54	6.648	6.286	12.934	105,76
55 - 59	5.392	4.986	10.378	108,14
60 - 64	4.031	3.813	7.844	105,72
65 - 69	2.989	2.824	5.813	105,84
70 - 74	2.023	2.063	4.086	98,06
75+	2.302	2.081	4.383	110,62
	117.345	112.468	229.813	104,34

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mayoritas masih berada pada usia muda. Proporsi penduduk usia sekolah (5 - 19 tahun) mencapai 24,74 persen dari total jumlah penduduk. Bila ditambahkan dengan penduduk usia pendidikan tinggi (20 - 24 tahun) jumlahnya mencapai 76.415 jiwa atau sebesar 33,25 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan secara lebih memadai dengan kualitas yang relatif lebih baik untuk menjamin kualitas pendidikan kelompok generasi muda.

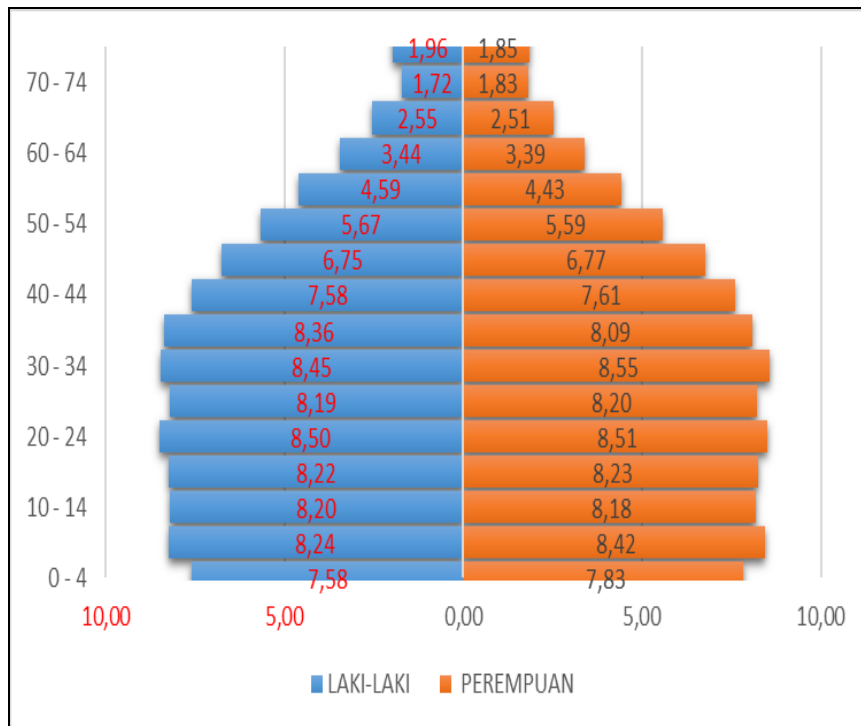


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Untuk melihat Gambaran komposisi umur lima tahunan penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, dapat dilihat pada Gambar II.5

Gambar II.5.

Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2020



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021

Piramida penduduk secara umum terdiri dari tiga bentuk yaitu: (1) *Expansive*, bila sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur termuda. Bentuk piramidanya melebar kebawah dan semakin keatas semakin menyempit; (2) *Constructive*, bila penduduk yang berada pada kelompok umur termuda jumlahnya sedikit, pada umur pertengahan lebih banyak dan semakin sedikit pada umur-umur diatasnya. Bentuk piramidanya menyempit pada bagian bawah, melebar bagian tengah dan kembali menyempit pada bagian-bagian ke atasnya; (3) *Stationary*,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

bila banyaknya penduduk dalam tiap kelompok umur hampir sama banyaknya, kecuali pada kelompok umur tertentu. Bentuk piramidanya lebih lurus dan hanya menyempit pada bagian puncaknya.

Dari gambaran tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori "expansive". Dalam bentuk piramida ini akan adanya ledakan penduduk pada periode-periode mendatang terutama jika program keluarga berencana tidak terus diintensifkan dalam rangka penurunan angka kelahiran. Hal ini disebabkan angka kelahiran rendah pada periode-periode 15 tahun sebelumnya. Jumlah penduduk pada kelompok umur di atasnya terutama umur 15 - 29 tahun dimana pada kelompok perempuan masih relatif tinggi. Penduduk perempuan pada kelompok umur ini termasuk kelompok usia subur yang berpotensi pada peningkatan total kelahiran dan pertumbuhan penduduk tinggi.

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa pemeluk agama islam dengan jumlah terbesar merupakan mayoritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah terbesar berikutnya berturut turut Kristen Protestan, Kristen Katolik, Budha dan Hindu. Keragaman penganut agama ini memerlukan pembinaan untuk menumbuhkan rasa toleransi dan tenggang rasa antar pemeluk agama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Gambaran komposisi Jumlah Penganut



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.5.

Jumlah Penduduk menurut Penganut Agama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Mendahara	25.954	11	14	-	5	-
Mendahara Ulu	16.955	479	-	-	-	-
Geragai	20.764	103	653	1	3	-
Dendang	19.534	155	200	2	4	-
Muara Sabak Barat	8.871	29	261	-	-	-
Muara Sabak Timur	39.451	245	8	-	-	-
Kuala Jambi	14.304	2	85	-	16	6
Rantau Rasau	22.802	172	201	-	-	-
Berbak	9.828	24	45	-	-	-
Nipah Panjang	26.396	15	91	135	-	-
Sadu	12.174	24	8	35	39	-
Total	227.033	1.259	1.566	173	67	6

Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2019

1.3 Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016-2019 mengalami tren peningkatan cukup signifikan, namun pada tahun 2020 mengalami pemerosotan yang cukup tajam. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,65 persen meningkat menjadi 3,07 persen pada tahun 2017, meningkat pada tahun 2018 menjadi 3,09 persen, meningkat kembali 4,25 persen pada tahun 2019. Pada akhir tahun 2019 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia yang dimulai dari Propinsi Wuhan di China dan mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Dampak pandemi Covid-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang

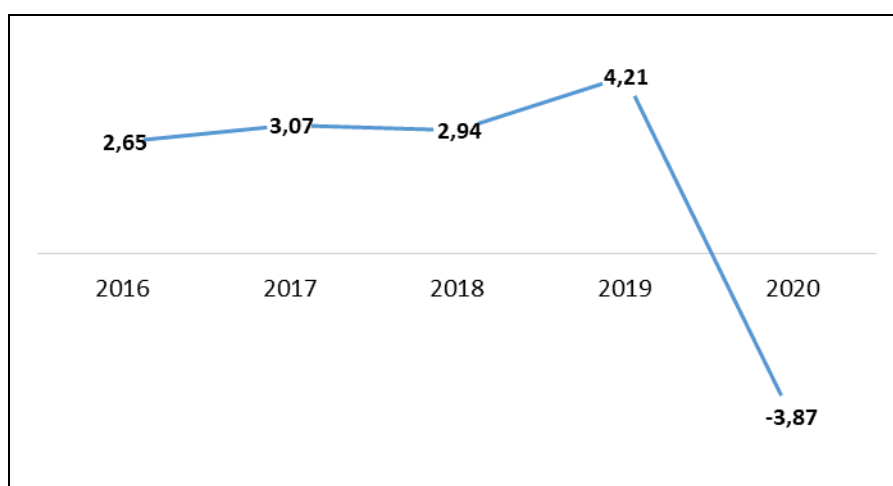


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Diakibatkannya. Pola kehidupan sosial Pra-Pandemi harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan standar protokol kesehatan menuju kenormalan baru atau New Normal. Pandemi Covid-19 ini sangat memukul perekonomian Nasional termasuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pertumbuhan ekonomi merosot tajam dibawah nol persen yaitu minus 3,87 persen dan dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebesar minus 0,46. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar I.6.

Gambar II.6.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHK) Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021

Berbeda dari tahun 2016 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang ditopang oleh 17 sektor, 8 sektor diantaranya tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi secara berurutan dari yang tertinggi dicapai oleh kategori sebagai berikut : 1) Informasi dan Komunikasi sebesar 7,73 persen; 2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,81 persen; 3) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,13 persen; 4) Industri Pengolahan sebesar 5,18 persen; 5) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,42 persen; 6) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,01 persen; 7) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,68 persen; 8) Industri Pengolahan sebesar 1,25 persen; 9) Jasa Pendidikan sebesar 0,40 persen; 10) Konstruksi sebesar - 0,09 persen; 11) Real Estate sebesar - 0,18 persen; 12) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar - 0,34 persen; 13) Jasa Perusahaan sebesar - 0,34 persen, 14) Transportasi dan Pergudangan sebesar - 1,25 persen, 15) Jasa lainnya sebesar -1, 52 persen dan 16) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar - 7,24 persen dan 17) Pertambangan dan Penggalian sebesar - 7,47 persen. Tabel II.7. menunjukkan laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada periode tahun 2016 – 2020.

Tabel II.7.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 – 2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,58	6,41	4,11	2,95	2,68
B	Pertambangan dan Penggalian	- 0,31	0,87	1,53	4,38	-7,47
C	Industri Pengolahan	1,08	1,93	4,35	0,28	1,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,26	2,00	4,43	3,42	5,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,13	2,61	7,24	5,46	6,81
F	Konstruksi	6,54	13,32	5,79	7,54	-0,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,61	7,19	6,01	6,19	3,01
H	Transportasi dan Pergudangan	7,74	6,17	4,66	5,20	-1,25



I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,29	10,54	8,11	2,44	-7,24
J	Informasi dan Komunikasi	9,91	7,69	9,46	7,69	7,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,95	5,40	1,24	3,85	3,42
L	Real Estate	8,23	8,81	8,48	9,13	-0,18
M,N	Jasa Perusahaan	7,67	5,32	4,51	3,33	-0,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44	4,55	5,46	4,55	-0,34
P	Jasa Pendidikan	8,59	6,03	4,88	6,03	0,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,76	6,06	4,88	6,07	6,13
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,83	5,37	6,67	4,11	-1,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,65	3,07	2,94	4,25	-3,87

Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2021

1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan digunakan PDRB yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*), hal ini karena PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) mengandung unsur inflasi makro. Sedangkan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun digunakan PDRB yang dihitung menurut harga konstan (PDRB ADHK) yang lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku yang digunakan untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap,

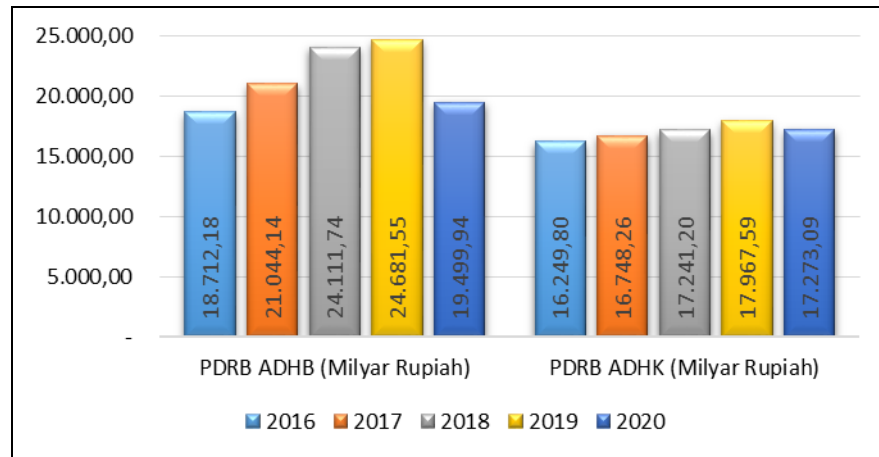


yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020 dalam dokumen ini menggunakan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Tahun 2019, begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha yang mengalami penurunan pada periode yang sama. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2020 menurut lapangan usaha dalam satuan milyar sebesar Rp 24.681,55 turun sebesar Rp. 5.181,61 menjadi Rp. 19.499,94 pada Tahun 2020. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dalam satuan milyar Tahun 2019 sebesar Rp. 17.967,59 menurun sebesar Rp. 694,5 pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 17.273,09. Nilai PDRB tersebut diatas dalam satuan milyar rupiah. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.7.

Gambar II.7.

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB - ADHK) dengan Migas Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 (diolah)

1.5 Struktur Ekonomi

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2017 – 2020 didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, diantaranya pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; Industri pengolahan; konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Tahun 2020 struktur ekonomi masih mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 35,3 persen (angka ini turun dari 50,13 pada Tahun 2019), urutan kedua yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 24,27 persen (naik dari 18,33 persen pada Tahun 2019), urutan ketiga yaitu kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,2 persen (naik dari 7,35 persen pada Tahun 2019), urutan keempat yaitu kategori Industri Pengolahan sebesar 9 persen (naik dari 7,04 persen pada Tahun 2019), dan urutan kelima yaitu kategori konstruksi sebesar 5,88 persen (naik dari 4,55 persen pada Tahun 2019).

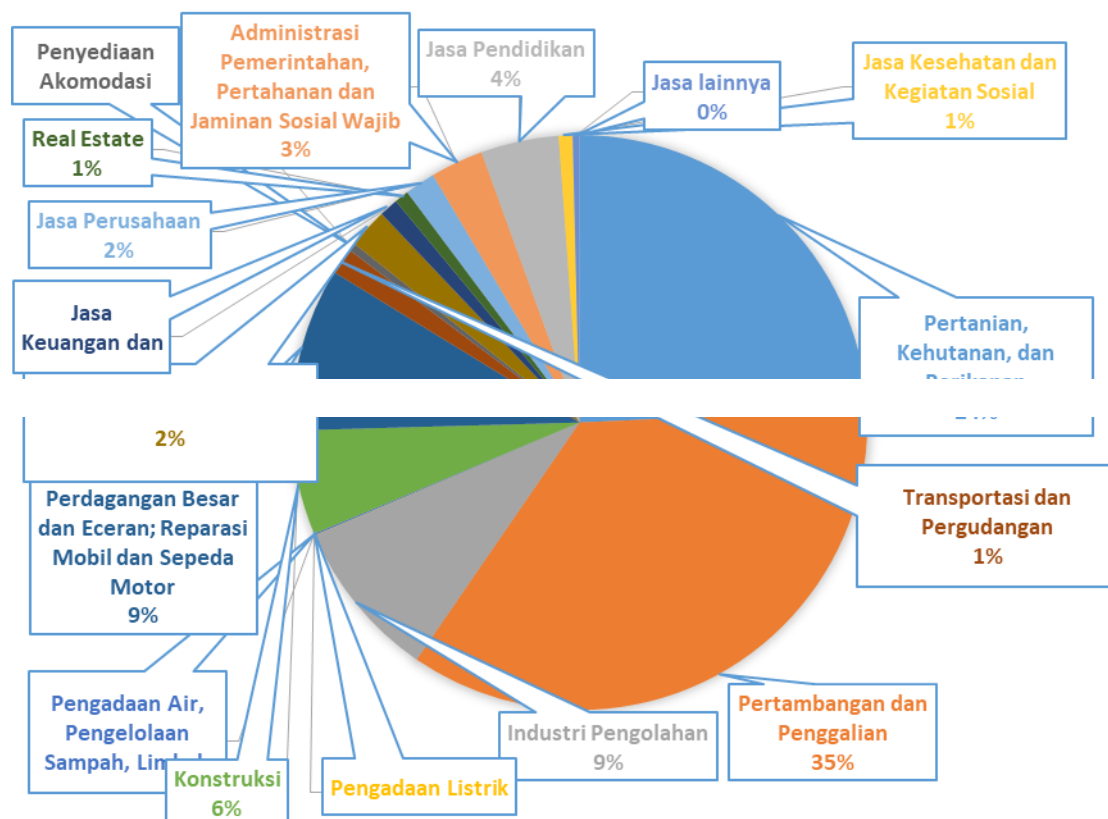
Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki peranan yang cenderung meningkat. Peranan kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sempat meningkat pada tahun 2018 namun mengalami penurunan pada Tahun 2019 dan 2020. Sedangkan kategori lapangan usaha Industri pengolahan pada tahun 2016-2019 peranannya cukup stabil pada angka 7-8 persen dan meningkat menjadi 9 persen pada tahun 2020. Gambar II.5 dan Tabel II.8. menunjukkan struktur ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dan peranan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Gambar II.8.

Struktur Ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020



Sumber : BPS, PDRB Kab. Tanjung Jabung Timur menurut lapangan usaha, 2021.

Tabel II.8.

peranan PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,16	19,17	17,76	18,31	24,27
B	Pertambangan dan Penggalian	48,27	49,39	52,20	50,16	35,30
C	Industri Pengolahan	7,90	7,71	7,16	7,04	9,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
F	Konstruksi	4,25	4,37	4,24	4,55	5,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,11	7,20	6,92	7,34	9,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1,31	1,26	1,17	1,22	1,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,37	0,39	0,37	0,39	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	1,48	1,52	1,48	1,64	2,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,86	0,83	0,76	0,80	1,06
L	Real Estate	0,59	0,59	0,58	0,62	0,80



Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
M,N	Jasa Perusahaan	1,32	1,31	1,24	1,34	1,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,26	2,22	2,34	2,97
P	Jasa Pendidikan	3,14	3,14	3,04	3,32	4,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,52	0,50	0,54	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,29	0,28	0,27	0,30	0,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, PDRB Kab. Tanjung Jabung Timur menurut lapangan usaha, 2021

1.6 PDRB Per Kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

Sama halnya dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik ADHB maupun ADHK mengalami pertumbuhan positif di periode 2015-2019, namun mengalami kontraksi dan melemah pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 84.851.336,00 mengalami penurunan bila dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 112.262.791 atau melemah sebesar minus 24,37 persen, begitu juga dengan PDRB



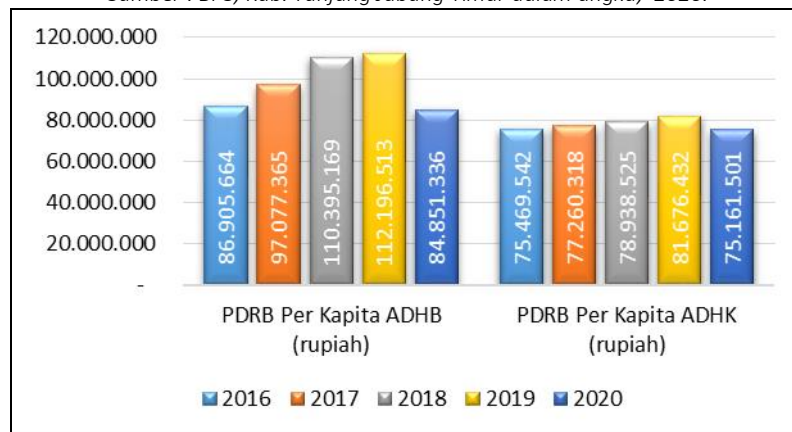
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

perkapita ADHK juga mengalami pelemahan sebesar minus 7,98 persen pada Tahun 2020 atau sebesar Rp. 75.161.501,00 Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan. PDRB per kapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Gambar II.9. dan untuk grafik laju pertumbuhan PDRB per kapita Tahun 2016 - 2020 tersaji pada Gambar II.10.

Gambar II.9.

PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 – 2020

Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2020.

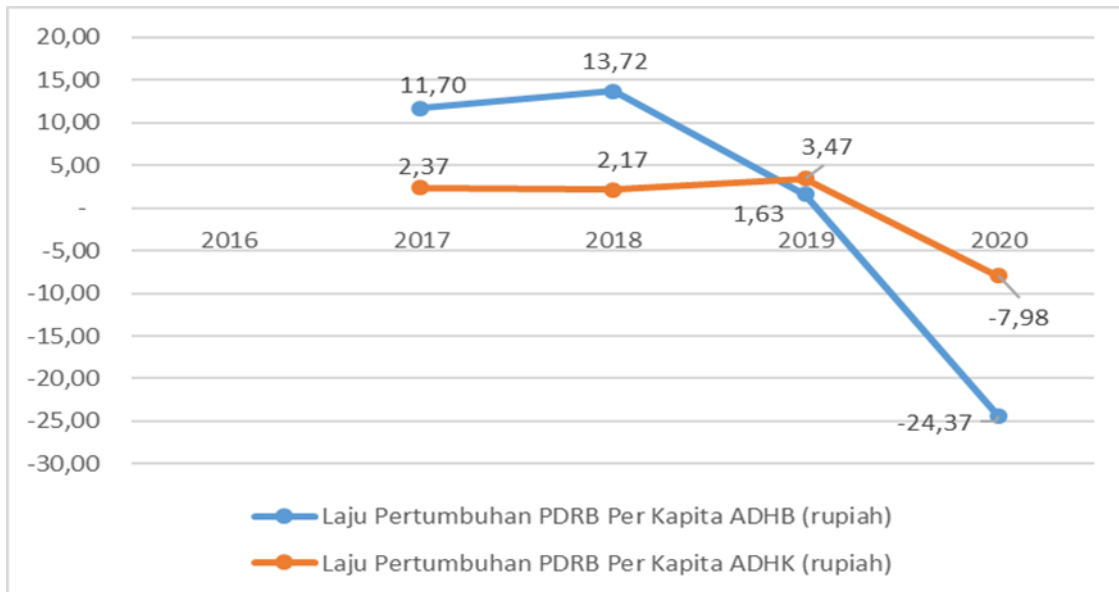


Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2020.



Gambar I.10.

Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Tahun 2016 - 2020 (persen)



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021.

1.7 Inflasi

Salah satu indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah laju inflasi, yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum dan diukur dengan perkembangan indeks harga konsumen. Tingkat inflasi yang tinggi secara terus menerus akan dapat menimbulkan stagflasi, dimana kegiatan sektor-sektor ekonomi menjadi terhenti. Sebaliknya jika inflasi terus menerus rendah (deflasi) akan dapat menimbulkan resesi ekonomi. Sehingga untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada satu titik yang diharapkan menjadi permasalahan yang terus berkembang. Tingkat Inflasi Kota Jambi dijadikan sebagai acuan inflasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Tabel II.9.

Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, *Year on Year*, Kota Jambi Tahun 2016 - 2020

NO	INFLASI	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desember	0,36	1,52	0,98	0,38	0,72
2	Desember (Tahun Kalender)	4,54	2,61	3,02	1,27	3,09
3	Desember terhadap Desember (year on year)	4,54	2,68	3,02	1,27	3,09

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

1.8 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2016-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung mendekati 0. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada posisi ketimpangan rendah menuju ke arah ketimpangan yang hampir sempurna, akan tetapi perlu mendapat perhatian karena adanya trend naik sejak capaian pada Tahun 2016 yang sebesar 0,26 dibanding Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang sebesar 0,29. Data pada Tabel II.10. disajikan perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Tahun 2016 - 2020.



Tabel II.10.
Indeks Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Gini Ratio	0,26	0,28	0,29	0,29	0,25

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2021

1.9 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Secara umum kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Saat ini Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan



kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

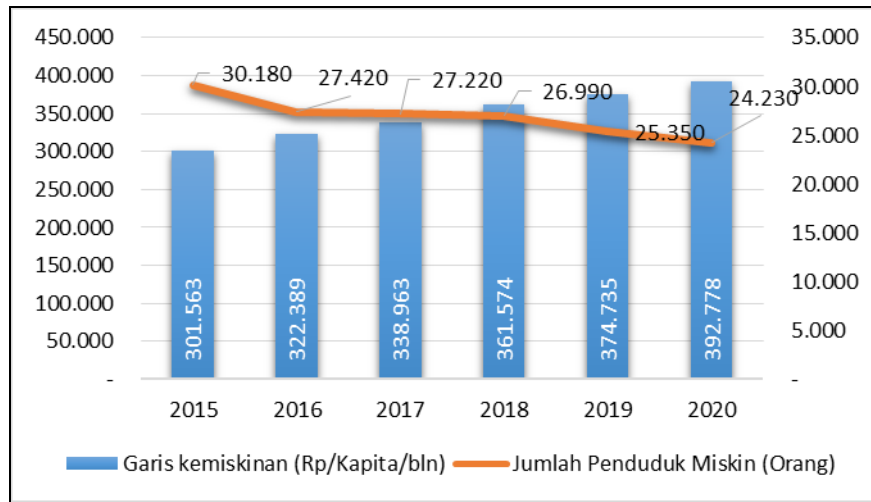
Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun Tahun 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan tren angka menurun. Pada Tahun 2015 penduduk miskin berjumlah 30.180 orang. Pada Tahun 2016 sampai dengan 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun dengan jumlah 27.420 orang pada Tahun 2016, 27.220 orang pada Tahun 2017, 26.990 pada Tahun 2018, 25.350 pada Tahun 2019 dan 24.230 orang pada Tahun 2020.

Sementara pendapatan keluarga miskin pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 301.563 kemudian terus meningkat hingga pada Tahun 2020 menjadi Rp. 392.778. Grafik perkembangan antar waktu jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan periode Tahun 2015 - 2020 disajikan pada Gambar II.11



Gambar II.11.

Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020



Sumber : BPS, Statistik Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2021.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbeck (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

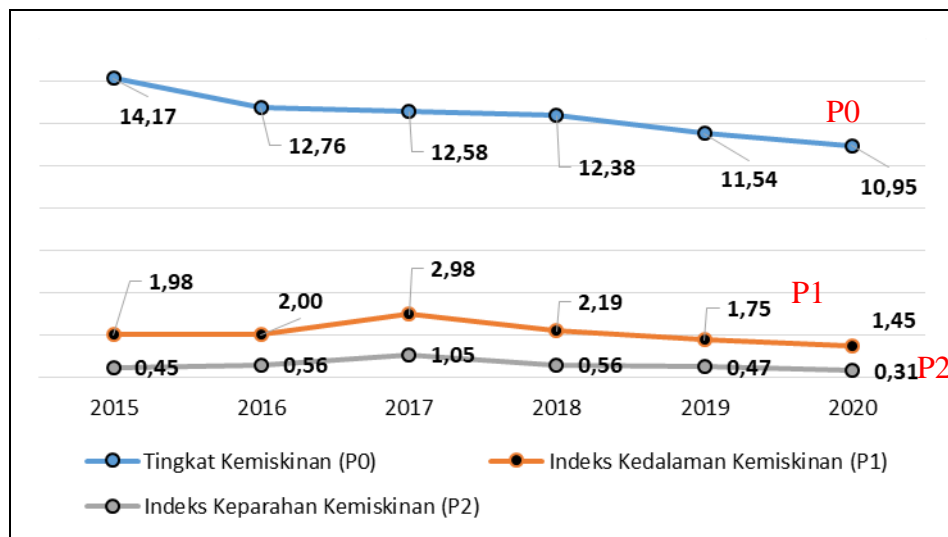


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada Gambar II.12.

Gambar II.12.

Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 - 2020



Sumber : BPS, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2021 (diolah)

Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) berfluktuatif selama periode 2015 sampai dengan 2020. dimana pada Tahun 2015 P1 berada di posisi 1,98 persen kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2,98 persen dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 1,45. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) naik dari 0,45 tahun 2015 menjadi 1,05 pada Tahun 2017 dan menurun menjadi 0,31 pada Tahun 2020.



2.1 KELEMBAGAAN

2.1.1 Kewenangan Daerah membentuk Organisasi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Penataan Kelembagaan sendiri telah melewati masa-masa yang berliku seiring dengan adanya perubahan peraturan kelembagaan perangkat daerah yang baru. Pengaturan mengenai kelembagaan yang semula diatur dalam PP No 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, kemudian diganti dengan PP No 18 Tahun 2007 tentang Perangkat



Daerah. Penggantian Pengaturan mengenai perangkat daerah sebagai konsekuensi adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah. Jika dalam UU No 32 Tahun 2004, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan istilah "*Miskin Struktur Kaya Fungsi*", maka dalam UU No 23 Tahun 2014 berdasarkan PP No 18 Tahun 2014 menerapkan prinsip "*Tepat Struktur (Ukuran) Dan Tepat Fungsi*".

Oleh karena perbedaan prinsip dalam penataan kelembagaan diatas, maka perbedaan yang sangat mendasar antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 adalah mengenai besaran organisasi. Jika dalam PP No 41 tahun 2007 menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, maka dalam PP 18 Tahun 2014 tidak menentukan kriteria besaran organisasi, besaran organisasi ditentukan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi yang nyata di masing-masing daerah. disamping mengenai prinsip diatas, terdapat lagi perbedaan-perbedaan pengaturan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

kelembagaan antara PP No 41 tahun 2007 dengan PP 18 Tahun 2014 yang secara rinci akan diuraikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.4.
Perbedaan substansi Antara PP No 41 Tahun 2007 dan PP No 18 Tahun 2016

MATERI	PP No 18 Tahun 2016	PP No 41 Tahun 2007
PENGELOMPOKAN PERANGKAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengelompokan perangkat daerah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat; ▪ Dinas; ▪ Badan; ▪ Kecamatan (khusus untuk Kab/Kota) ▪ Perangkat Daerah di Kelompokkan : ❖ Sekretariat Sebagai Unsur Pendukung (dukungan administrasi) ❖ Sekda sekaligus merangkap sebagai Middle line yaitu fungsi koordinator yang menghubungkan perangkat daerah lain dengan KDH/WK KDH ❖ Dinas Melaksanakan urusan pemerintahan dengan tugas utama memebreikan layanan langsung kepada masyarakat. ❖ Badan sebagai unsur penunjang dengan tugas membrikan dukungan teknokratik kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengelompokan perangkat daerah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setda; ▪ Set DPRD; ▪ Inspektorat ▪ Lemtekda. ▪ Kecamatan (khusus kab/kota) ❖ Tidak ada perbedaan fungsi yang tegas antara badan, dinas atau kantor.
MATERI	PP No 18 Tahun 2014	PP No 41 Tahun 2007
TIPOLOGI	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah perangkat Daerah sesuai dengan jumlah fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan fungsi penunjang. ❖ Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan dikelmpkkan menjadi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat daerah tipe A. ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sedang, diwadahi perangkat daerah tipe B ▪ Fungsi atau Urusan dengan beban kecil, diwadahi perangkat daerah tipe C 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jumlah Perangkat Daerah dibatasi dan diwajibkan dilakukan perumpunan. ❖ Tidak ada tipologi perangkat daerah, yang ada hanya tipologi daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	<ul style="list-style-type: none">▪ Fungsi atau Urusan dengan beban sangat kecil, tidak menjadi perangkat namun bisa berupa Bidang, atau Seksi/Subbidang.	
PEMETAAN URUSAN	<ul style="list-style-type: none">❖ Tipologi perangkat daerah ditentukan berdasarkan hasil pemetaan beban urusan atau beban penunjang atau beban pendukung.❖ Hasil pemetaan bersifat makro (beban urusan) yang dapat juga digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Penggunaan hasil pemetaan dalam perencanaan dan penganggaran diatur dlm PP Pelaksanaan Urusan	<ul style="list-style-type: none">❖ Tidak ada pemetaan beban masing urusan, fungsi penunjang dan pendukung.❖ Pemetaan dilakukan terhadap Daerah.
JUMLAH PERANGKAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah perangkat Daerah Kemungkinan Lebih Banyak dari Sebelumnya, Namun Jumlah Struktur Perangkat Daerah Secara Keseluruhan Akan Berkurang Karena Adanya Perbedaan Jumlah Bidang dan Kasi pada setiap Perangkat Daerah.❖ Jumlah Bidang Minimal 2 Maksimal 4.❖ Tidak dapat menambah perangkat daerah lain di luar yang sudah ditentukan.❖ Untuk memperkecil struktur Birokrasi, Pemerintah Daerah Dapat menurunkan tipe perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none">❖ Jumlah perangkat daerah dibatasi, namun diluar jumlah yang sudah dibatasi masih dapat menambah perangkat daerah jika ada perintah peraturan perundang-undangan.❖ Jumlah bidang antara 4 sampai 7.

Dengan adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap pengaturan mengenai kelembagaan, maka setiap pemerintah daerah mutlak harus menata kembali organisasi perangkat daerah mengikuti pengaturan mengenai kelembagaan yang baru. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan



dengan mengacu pada PP No. 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai pengelompokan perangkat daerah, tipologi, pemetaan urusan serta sub-substruktur yang menjadi bagiandari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah. Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada, dan perubahan fungsi-fungsi unit yang sudah ada, baik pada Sekretariat, Dinas, dan Badan.

2.1.2. Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses untuk melaksanakan fungsifungsi pengaturan (regulasi), pelayanan, dan pemberdayaan dengan optimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi-fungsi ini menjadi tanggung jawab birokrasi pemerintahan. Dalam konsep birokrasi ideal seperti dikemukakan Max Weber, birokrasi merupakan organisasi yang melaksanakan sejumlah fungsi, yang ditandai dengan karakteristik hirarkhis, memiliki rantai komando, terdapat pembagian dan diferensiasi pekerjaan, dll. Sebagai suatu organisasi, birokrasi memiliki sejumlah struktur yang menjalankan fungsi dan pembagian kerja tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman organisasi dalam perspektif statis



maupun dinamis. Dalam perspektif statis, organisasi mewujudkan sebagai suatu lembaga atau wadah. Sementara dalam perspektif dinamis, organisasi mengandung aspek ketatalaksanaan dalam proses dinamika organisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi "siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya". Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Dinas Perikanan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
5. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

11. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
14. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 20. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 22. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Badan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dari Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Keuangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;



3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan terdiri dari:
- a. Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Nipah Panjang dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Mendahara dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Rantau Rasau dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Sadu dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Dendang dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Muara Sabak Barat dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Mendahara Ulu dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Kuala Jambi dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Geragai dengan Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Berbak dengan Tipe A.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1.1 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan



kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa penyajian permasalahan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan urutan urusan yang diampu oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 6 (enam) Urusan pilihan. Namun demikian untuk Urusan Pilihan, setiap daerah dapat menyesuaikan dengan konteks lokal masing-masing daerah.

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 di BAB 2 dan menelaah hasil analisis



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dengan Organisasi Perangkat Daerah pada saat dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD), diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

Permasalahan Pembangunan Daerah

No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan belum optimal;2. Mutu pendidikan yang masih rendah;3. Program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun belum dapat terwujud;4. Ketersediaan dan penempatan guru yang belum merata;5. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang
2	Urusan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana Prasarana Kesehatan yang belum sesuai standar kesehatan dalam permenkes Nomor 75 Tahun 2014;2. Masih terdapat bangunan Pustu, Polindes dan poskesdes dalam kondisi rusak berat;3. Pembagian kewenangan aset polindes dan poskesdes antara Desa dan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya dilaksanakan;4. Penanganan Stunting yang belum optimal;5. Kualitas derajat kesehatan lingkungan masih



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		rendah; 6. Peningkatan kasus covid-19; 7. Masih ada desa yang belum UCI;
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Cakupan luas lahan pertanian yang dapat dialiri oleh air irigasi masih perlu ditingkatkan; 2. Konektivitas antar desa, kelurahan dan perkotaan masih perlu ditingkatkan; 3. Penyusunan RDTR pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Perda RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 03 tahun 2020 masih perlu ditingkatkan;
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Penanganan kawasan permukiman yang belum optimal 2. Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih masih rendah 3. Capaian cakupan Desa/Kelurahan dengan Sanitasi Layak masih rendah 4. Capaian cakupan kualitas jalan lingkungan dalam kondisi baik masih rendah 5. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal 6. Masih terdapatnya permukiman dan lahan garapan masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	1. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam baik yang merupakan bencana hydrometeorologi maupun bencana geologis



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">2. Masih lemahnya kegiatan pencegahan untuk menghadapi bencana3. Keterlibatan unsur-unsur lain dalam penanggulangan bencana masih belum optimal4. Penyebaran informasi bencana masih5. Belum tersedianya gudang dan peralatan penanganan bencana6. Penanganan pasca bencana baik fisik maupun pemulihan dampak psikologis/trauma belum optimal
6	Urusan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum optimal
II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Urusan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Kuantitas dan kompetensi masyarakat yang mendapatkan keterampilan khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan lapangan kerja didalam maupun diluar Kabupaten masih rendah2. Keinginan masyarakat untuk membuka lapangan usaha sendiri masih rendah, hal ini karena keterbatasan modal dan sarana penunjang usaha;3. Informasi lowongan kerja dari perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabuapaten Tanjung Jabung Timur belum terpublikasikan secara luas;4. Terbatasnya kewenangan kabupaten terkait pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dibidang ketenagakerjaan
2	Urusan	<ol style="list-style-type: none">1. Peran serta perempuan dalam pembangunan belum



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	optimal 2. Penanganan kasus perlindungan kekerasan pada anak belum optimal
3	Urusan Pangan	1. Ketersediaan sebagian pangan strategis masih belum mencukupi dan sebagian cenderung menurun/melandai 2. Kondisi ketahanan pangan masyarakat di beberapa wilayah masih rawan 3. Fluktuasi harga pangan masih cukup tinggi 4. Terbatasnya distribusi produk pangan masyarakat 5. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan gizi serta pola pangan yang masyarakat masih belum memenuhi standar pangan beragam, bergizi seimbang dan aman 6. Masih rendahnya sebagian cakupan gizi masyarakat 7. Masih ditemui produk pangan yang berbahaya, dan terbatasnya informasi mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan di masyarakat.
4	Urusan Pertanahan	1. Tingkat kerawanan konflik sosial yang terjadi di masyarakat masih tinggi khususnya sengketa lahan
5	Urusan Lingkungan Hidup	1. Pengelolaan persampahan di wilayah pesisir Tanjabtim belum maksimal 2. Terjadinya Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di kawasan ekosistem gambut 3. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup 4. Tingginya Abrasi di wilayah pesisir



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5. Semakin maraknya pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal2. Masih rendahnya warga yang berumur 0 - 17 Tahun yang memiliki KIA3. Cakupan kepemilikan KK dan Dokumen Kependudukan Lainnya khususnya Pendaftaran Penduduk baru dan pindah datang masih rendah
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Tata kelola pemerintah desa khususnya terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan desa belum optimal2. Tingkat keaktifan Bumdes yang semakin menurun3. Inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna di perdesaan serta pemanfaatannya masih terbatas
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none">1. Angka pemakaian Kontrasepsi modern masih rendah2. Angka kelahiran total (TFR) masih relatif tinggi3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR) masih relatif tinggi4. Meningkatnya angka Unmet need (angka kebutuhan KB)5. Masih rendahnya pemanfaatan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) sebagai pelayanan publik dalam bentuk pelayanan keluarga dalam komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), konsulting, konseling, pembinaan serta rujukan.
9	Urusan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan jasa perhubungan



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		<ol style="list-style-type: none">2. Pengawasan dan penegakan hukum dibidang LLAJ belum optimal3. Angka kecelakaan darat dan air yang masih tinggi
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan informasi publik terhadap masyarakat belum optimal
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none">1. Kesadaran pengelola dan anggota Koperasi untuk melakukan RAT setiap tahun masih rendah2. Kapasitas SDM pengelola Koperasi masih terbatas3. Kepatuhan Gerakan Koperasi terkait Perizinan masih rendah
12	Urusan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya komitmen investor untuk menyampaikan LKPM secara berkala dan tepat waktu2. Pemetaan potensi wilayah3. Jangkauan pelayanan perizinan langsung dilapangan (mobile perizinan) belum optimal
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan Prasarana Olahraga yang masih minim2. Kelompok Pemuda Usaha Produktif yang masih minim
14	Urusan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah2. Belum terdaftar dan ditetapkannya Objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya benda
15	Unsur Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya minat baca masyarakat
16	Unsur Kearsipan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pengelolaan arsip OPD secara baku



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
III. URUSAN PILIHAN		
1.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Peran Pengumpul/Tengkulak terhadap Nelayan masih mendominasi2. Jangkauan wilayah tangkapan (pompong kapasitas rendah) yang masih terbatas3. Sarana alat tangkap ramah lingkungan yang masih terbatas4. Pengolahan hasil tangkapan, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing belum optimal5. Ketersediaan Es Balok untuk kebutuhan nelayan masih kurang6. Kesadaran nelayan untuk memanfaatkan sarana prasarana penunjang perikanan yang disediakan Pemerintah masih rendah.7. Sarana penyediaan BBM khusus nelayan masih terbatas8. SDM Penyuluh Perikanan masih terbatas9. Tingginya biaya produksi pakan10. Sulitnya jangkauan pemasaran pada masa panen11. Rendahnya kapasitas dan kemauan Pokdakkan untuk mandiri12. Mininya produk olahan perikanan budidaya yang bernilai tambah13. Rendahnya hasil jua produk di tingkat pembudidaya
2	Urusan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		masih minim
3	Urusan Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Tingginya alih fungsi lahan2. Sebagian besar lahan yang hanya dapat di tanami 1 kali/Tahun3. Sarana dan Prasarana pertanian belum optimal4. Akses/Jalan distribusi hasil belum memadai untuk dilalui kendaraan roda 4 sampai ke lahan5. Kapasitas kelembagaan kelompok tani serta rendahnya kesadaran kelompok mapan untuk berusaha secara mandiri masih rendah6. Sarana prasarana pasca panen masih terbatas7. Jangkauan pemasaran dan promosi menggunakan media online hasil produksi belum tersedia8. Harga jual hasil produksi masih belum stabil dan cenderung situasional.
4	Urusan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan prasana fasilitas yang dimiliki pasar masih kurang, seperti : jumlah lapak/kios, parkir, drainase, mushola, lampu penerangan2. Manajemen pengelolaan pasar yang masih rendah, seperti : terbatasnya SDM pengelola pasar, penenuhan operasional pengurus pasar, operasional masih bersifat mingguan, kebersihan area pasar dan penertiban alat ukur yang digunakan pedangan harus sesuai SNI
15	Urusan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none">1. Kualitas produk yang dihasilkan IKM masih belum dapat bersaing ditingkat regional2. Terbatasnya sarana produksi terpadu pemasaran



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
16	Urusan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya identifikasi lahan eks transmigrasi khususnya lahan fasum dan fasos dalam penertiban sesuai dengan peruntukannya2. Minimnya Database kawasan Ex. Transmigrasi
IV. URUSAN PENUNJANG		
1.	Urusan Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Tata kelola kelembagaan, tata laksana serta akuntabilitas Kinerja yang belum optimal2. Belum adanya evaluasi dan penilaian terhadap Reformasi Birokrasi
2	Urusan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan dan pengendalian TIPIKOR dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan2. Belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan jumlah objek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah SDM3. Belum optimalnya implementasi SPIP pada OPD4. Masih rendahnya level kapabilitas APIP5. Masih rendahnya penyelesaian tidak lanjut hasil pemeriksaan6. Belum optimalnya pengelolaan keuangan serta aset yang efektif, efisien dan akuntabel
3	Urusan Perencanaan	<ol style="list-style-type: none">1. Kapasitas Pengampu Perencana di OPD dalam menyusun dan melaporkan dokumen perencanaan baik dari sisi perencanaan program maupun evaluasi



No	URUSAN	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
		dan pelaporan masih belum optimal 2. Sumberdaya manusia bidang perencanaan masih kurang terutama di OPD sehingga Perencanaan, maupun Evaluasi dan Pelaporan hanya ditangani oleh satu orang 3. Pelaksanaan aplikasi SIPD dari kemendagri masih belum optimal
4	Urusan Keuangan	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal
5	Urusan Kepegawaian	1. Jumlah ketersediaan ASN yang belum memadai 2. Kompetensi yang belum kompetitif dan kurang disiplin ASN sehingga berpengaruh pada kinerja

3.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan pembangunan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, maka tahap selanjutnya adalah merumuskan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rumusan permasalahan pembangunan ini merupakan salah satu pijakan dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah. Pijakan lainnya dalam penentuan isu strategis daerah adalah isu strategis di tingkat regional, nasional dan internasional.



Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah
2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur daerah yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban daerah

4.1 ISSU-ISSU STRATEGIS

Kondisi geoekonomi global dan regional saat ini dan ke depan akan merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan secara khusus terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam periode 2021-2026 ke depan. Beberapa hal terkait dengan kondisi ekonomi global dan regional tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah :

1) **Fluktuasi harga komoditas minyak dunia.**

Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka ekonomi makro Indonesia, harga komoditas seperti minyak dunia mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- a) Tingginya ekspor dari negara- negara anggota OPEC terlepas dari keputusan untuk memotong produksi,
- b) Tingginya persediaan (inventory) minyak mentah dunia,
- c) Terus meningkatnya jumlah pengeboran shale oil di AS,
- d) Meningkatnya produksi minyak dunia dari negara-negara Non OPEC dan
- e) P eningkatan produksi minyak di Libia menjadi faktor yang mendorong menurunnya harga minyak dunia.

Sebagaimana diketahui bahwa komoditas minyak dan gas merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Turunnya harga minyak dunia dan batubara dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Turunnya pendapatan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah untuk mengalokasikan anggaran program/kegiatan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, fluktuasi harga komoditas minyak dunia dalam beberapa tahun kedepan harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah-langkah strategis untuk mulai menggeser ketergantungan sumber pendapatan daerah dari sektor migas harus segera dilakukan. Keterbatasan anggaran sebagai konsekuensi dari berkurangnya



pendapatan daerah akan mengurangi ruang fiskal Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan.

2) Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) Program Pembangunan MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g)



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community* dan *The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi *ASEAN Economic Community (AEC)* atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *ASEAN Political-Security Community (APSC)*, dan *ASEAN Socio-Culture Community (ASCC)*. Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Memasuki era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Bonus Demografi

Disela kemajuan zaman dengan segala plus minusnya bagi generasi muda, saat ini, Indonesia dianugerahi “Bonus Demografi” yang harus mendapat perhatian serius. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus tersebut di Tahun 2020-2030 dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif tersebut akan menguntungkan dari sisi pembangunan dimana banyaknya penduduk yang bekerja maka akan memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi tidak didapat secara otomatis, tetapi harus diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusia



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif saat ini mendominasi total populasi penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja tersebut selain meningkatkan angkatan kerja dalam daerah juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi daerah lain bahkan negara lain yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun. Kondisi ini menjadi peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyiapkan kebijakan yang tepat bagi generasi mudanya untuk lebih mandiri, kreatif dan berjiwa wirausaha sehingga pada saatnya nanti generasi bonus demografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4) Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tanggal 25-27 September 2015 telah terjadi pertemuan di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Serikat yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen tersebut yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" atau "Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan".

SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (*Millenium Development Goals*), Tujuan Pembangunan Millenium, yang mulai dijalankan pada September 2000 dan berakhir di Tahun 2015. Adapun target MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015 yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium. Deklarasi ini diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di Tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini.

Tujuan Global SDGs adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemaknaan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan



Gambar IV.6.

Tujuan Sustainable Development Goals



Sumber : UNDP, 2015

Rekomendasi KLHS RPJMD diperoleh berdasarkan hasil pengkajian pencapaian indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan dan kondisi lingkungan daerah yang meliputi 6 muatan KLHS, kondisi keuangan dan kelembagaan daerah terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dalam Tabel IV.8 berikut.



Tabel IV.8
Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Alih fungsi Lahan	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi capaian 90,99% (rumah tangga umum) Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dominan berada pada level sedang dengan jumlah 81.36%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 0.015% yang berada di Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu 	<ol style="list-style-type: none"> Belum ada penetapan kawasan LP2B di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masih banyak masyarakat melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman Masih rendahnya pemahaman terhadap perlindungan dan pengelolaan lahan gambut Masyarakat masih membuka lahan perkebunan secara 	<ol style="list-style-type: none"> Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Program pembinaan jasa konstruksi Program penataan ruang Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Pemetaan penetapan kawasan LP2B penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan pengendalian kawasan hidrologis gambut (KHG) Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang
	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	<ul style="list-style-type: none"> Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih dominan berada pada level sedang dengan 			
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang				



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
	memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	jumlah 86.44%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 1.64% yang berada di hamper seluruh kecamatan.	illegal dikarenakan belum adanya perda mengenai rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 8. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi situ, sungai, pantai dan sumber daya air lainnya. 9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, tambak dan jaringan pengairan lainnya 10. Program pengendalian daya rusak air 11. Program pengelolaan kelembagaan, data dan sistem informasi sumber daya air 12. Program penyusunan 13. rencana, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang 14. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
				<p>Pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>15. Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>16. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman</p> <p>17. Program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>18. Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman</p>	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Alih fungsi Lahan	1.4.1 (k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	<ul style="list-style-type: none">Kondisi capaian 90,99% (rumah tangga umum)Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dominan berada pada level	<p>5. Belum ada penetapan kawasan LP2B di Kabupaten Tanjung Jabung Timur</p> <p>6. Masih banyak masyarakat</p>	<p>19. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</p> <p>20. Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan</p> <p>21. Program pembinaan jasa konstruksi</p>	<p>d. Pemetaan penetapan kawasan LP2B</p> <p>e. penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan pengendalian kawasan hidrologis gambut (KHG)</p>



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
	<p>6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</p> <p>6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p>	<p>sedang dengan jumlah 81.36%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 0.015% yang berada di Kecamatan Dendang dan Mendahara Ulu</p> <ul style="list-style-type: none"> Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih dominan berada pada level sedang dengan jumlah 86.44%, sedangkan pada level Sangat rendah sebesar 1.64% yang berada di hamper seluruh kecamatan. 	<p>melakukan alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman</p> <p>7. Masih rendahnya pemahaman terhadap perlindungan dan pengelolaan lahan gambut</p> <p>8. Masyarakat masih membuka lahan perkebunan secara illegal dikarenakan belum adanya perda mengenai rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur</p>	<p>22. Program penataan ruang</p> <p>23. Program penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>24. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>25. Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang</p> <p>26. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi situ, sungai, pantai dan sumber daya air lainnya.</p> <p>27. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, tambak dan jaringan pengairan lainnya</p>	<p>f. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang</p>



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
				28. Program pengendalian daya rusak air 29. Program pengelolaan kelembagaan, data dan sistem informasi sumber daya air 30. Program penyusunan 31. rencana, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan capaian kinerja Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang 32. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang 33. Program pendukung administrasi perkantoran pemerintah daerah Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang 34. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman 35. Program pengembangan	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Kondisi Daerah	Isu Strategis	Rekomendasi KLHS	
Bidang	Indikator			Program RPJMD	Kegiatan
				perumahan dan kawasan permukiman 36. Program peningkatan sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	



4.2 Isu Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditengah pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) yang melanda dunia saat ini, tentu berimplikasi luas biasa terhadap pembangunan yang dilaksanakan, perubahan secara masif terjadi mulai dari perekonomian, pembangunan, dan sosial budaya. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur masih menjadi faktor penghambat dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi daerah, mendorong tumbuhnya sektor pertanian serta pelayanan dasar guna peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Pertanian sebagai sektor yang menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja belum mampu berkontribusi lebih dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Perlunya optimalisasi hilirisasi sektor industri olahan khususnya dari sektor pertanian sebagai alat untuk upaya meningkatkan harga komoditi pertanian, sekaligus alat *multiplayer effect* pertumbuhan ekonomi;
4. Tingkat kemiskinan yang meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih diatas rata-rata Provinsi Jambi;
5. Indek Pembangunan Manusia sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang masih dibawah rata-rata Provinsi Jambi sangat



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

berkolerasi terhadap daya saing masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan yang paling rendah di Provinsi Jambi yang artinya banyak angkatan kerja yang terserap akan tetapi kualitas dari tenaga kerja tersebut masih belum berdaya saing dengan tenaga kerja diluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk membangun sistem digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
8. Terjadinya perlambatan pada penerimaan daerah khususnya dari sumber pendapatan asli daerah sehingga diperlukan strategi khusus baik intensifikasi maupun ekstensifikasi;
9. Terjadinya kerusakan tutupan hutan, ancaman bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan, serta abrasi pantai yang semakin besar;
10. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, kemampuan meningkatkan Inovasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta penyiapan portal pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik.

5.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran,



tentang pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2023.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

6.1 LANDASAN PENYUSUNAN

1. Idil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2021-2026.
- k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7.1 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI TAHUN 2023

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2023 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini :

Ikhtisar eksekutif, menjelaskan secara ringkas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana tujuan dan sasaran tercapai, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.



Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelambagaan, isue strategis dan permasalahan pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2021-2026, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2023 termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Bab ini menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis atau RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2021-2026 dan Rencana Kinerja 2023. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang strategi dan arah kebijakan, visi-misi dan kebijakan umum serta rencana kinerja tahun 2023.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2021. Disamping itu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menjadi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), serta berfungsi sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pembangunan selama 5 tahun dan tahunan.

RPJMD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting karena merupakan sarana bagi perwujudan Visi dan Misi serta Strategi Instansi Pemerintah.

Dengan perkataan lain, RPJMD yang disusun setidaknya mengandung Visi, Misi, Program, dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. RPJMD merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melakukan pengukuran, penilaian, evaluasi kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

RPJM setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) ke mana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dan misi dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan 'bagaimana kita menuju ke sana' dijawab dengan merumuskan kebijakan umum dan strategi pembangunan, serta menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan di bawah ini.



2.1 VISI DAN MISI

1. Visi Daerah

Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah **‘Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)’**. Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT Mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

2. Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan
2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatahan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

3. Agenda Pembangunan

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 4 (empat) misi diatas, maka perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan 5 (Lima) **Agenda Pembangunan** yaitu :

1. Tanjung Jabung Timur Terkoneksi

Infrastruktur yang layak untuk menunjang sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, industri, pasar, destinasi agrowisata dan wisata bahari serta media informasi;

2. Tanjung Jabung Timur Sejahtera

Penguatan ketahanan ekonomi ditopang sektor Pertanian dan Perikanan;

3. Tanjung Jabung Timur Berdaya Saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, serta ketenagakerjaan;

4. Tanjung Jabung Timur Ekonomi Maju

Peningkatan investasi daerah sektor industri dan penguatan simpul ekonomi daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

5. Tanjung Jabung Timur Aman, Nyaman dan Harmonis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan penguatan kapasitas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembangunan Daerah

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 meliputi 9 (sembilan) tujuan dan 31 (tiga puluh satu) sasaran. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas;
4. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing ;
5. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah ;
6. Meningkatkan Daya Serap Tenaga Kerja;
7. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

8. Membangun Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas; dan
9. Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis.

2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 31 (tiga puluh satu) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2. Peningkatan Produksi Perkebunan;
3. Peningkatan Populasi Hewan Ternak;
4. Peningkatan Produksi Hasil Perikanan;
5. Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan;
6. Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan;
7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan;
8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu);
10. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman;
11. Peningkatan Perbaikan Sanitasi Masyarakat;
12. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar;
13. Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah;
14. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

15. Peningkatan Pelaksanaan Studi Kerja/Magang;
16. Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah;
17. Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana;
18. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
19. Penyediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah;
20. Fasilitasi Pendirian Pabrik;
21. Penyediaan Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;
22. Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja;
23. Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan Berbasis Elektronik;
24. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Pengendalian Tata Ruang;
26. Penataan Kelembagaan dan Organisasi;
27. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
29. Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur;
30. Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat; dan
31. Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat.

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah berisikan program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dari kepala daerah yang terpilih. Strategi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

tersebut diperlukan untuk memperinci arah pengembangan program prioritas kepala daerah yang terpilih tersebut.

Strategi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Adapun strategi yang dimaksud adalah:

1. Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan;
2. Meningkatkan Optimasi Lahan Sub Optimal;
3. Menyediakan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen;
4. Menyediakan Alsintan;
5. Mencegah dan Menanggulangi Hama Tanaman Pangan dan Hortikultura;
6. Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan;
7. Mengoptimalikan Pengelolaan Perkebunan;
8. Menyediakan Sarana Prasarana Produksi dan Sarana Pasca Panen;
9. Meningkatkan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hama Pekebunan Masyarakat;
10. Meningkatkan Populasi Ternak Besar dan Kecil;
11. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Serta Layanan Kesehatan Ternak Masyarakat;
12. Meningkatkan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

13. Meningkatkan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
14. Meningkatkan Pengawasan Usaha Perikanan;
15. Meningkatkan Kualitas Jalan Produksi Perkebunan, Pertanian dan Perikanan;
16. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Nelayan;
17. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
18. Meningkatkan dan Optimalisasi Sarana dan Peralatan Penyuluhan;
19. Meningkatkan Kelembagaan IKM/UMKM dan Koperasi;
20. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku IKM/UMKM;
21. Mengembangkan Sarana Pasarana Pemasaran;
22. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat;
23. Meningkatkan Kepariwisata Daerah Berbasis Potensi Agrowisata dan Wisata Bahari;
24. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Faskes;
25. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang di Faskes;
26. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kesehatan;
27. Meningkatkan Kuantitas Tenaga Kesehatan;
28. Meningkatkan Penanganan Stunting;
29. Menyediakan Rumah Layak Huni;
30. Meningkatkan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh;
31. Menyediakan Layanan Air Bersih;
32. Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Pesampahan;
33. Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

34. Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah;
35. Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
36. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah dengan Perbaikan Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan, Rumah Dinas, Sanitasi Sekolah Pendidikan Dasar;
37. Mencetak Santri Penghapal Al-Qur'an;
38. Meningkatkan Sarana Prasana dan Peralatan Balai Latihan Kerja Daerah;
39. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Kompetensi, Kualifikasi, Serta Daya Saing Sesuai Dengan Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja;
40. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Instruktur;
41. Menyediakan Jaringan Penyedia Lapangan Kerja;
42. Meningkatkan Layanan Perijinan;
43. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Wilayah Pertumbuhan Ekonomi;
44. Meningkatkan Intensifikasi Sumber PAD;
45. Meningkatkan Ektensifikasi Sumber PAD;
46. Menyediakan Media Informasi Potensi Investasi Daerah Berbasis Elektronik;
47. Menyiapkan Regulasi Aplikasi Informasi Potensi Investasi Daerah;
48. Menyiapkan Aksesibilitas Penunjang Operasional Pabrik;
49. Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Berinvestasi;
50. Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Berinvestasi;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

51. Menyediakan Media Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik;
52. Menyediakan Regulasi Aplikasi Informasi Lapangan Kerja;
53. Memfasilitasi Pelaku IKM/UMKM dengan Pelaku Jasa Keuangan;
54. Menyediakan Sarana Prasarana Peralatan Pengolahan IKM/UMKM;
55. Memberikan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan;
56. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkesinambungan;
57. Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis Sesuai dengan RTRW Kabupaten;
58. Melakukan Penataan dan Penguatan Organisasi yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran;
59. Meningkatkan Kompetensi, Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan ASN, Penataan ASN;
60. Meningkatkan Pengendalian Produk Hukum;
61. Mengembangkan Sistem Manajemen Pembangunan Berbasis Kinerja Melalui Penguatan Proses Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Secara Terpadu;
62. Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Perkuatan Kapabilitas APIP dan Perkuatan SPIP;
63. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Direct Services), serta Membangun Pemerintahan Yang Terbuka (Open Government) dengan Perkuatan Keterbukaan Informasi Publik,



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Transparansi, Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, serta Meningkatkan Komunikasi dan Serapan Aspirasi Publik;

64. Meningkatkan Edukasi Tentang Keberagaman, dan Toleransi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Sejak Usia Dini, Termasuk Kepada Anak-Anak Usia Sekolah, serta Didukung Upaya Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pengampu Kepentingan Yang Berkaitan dengan Keberagaman dan Toleransi;
65. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum;
66. Meningkatkan Pencegahan Terhadap Bencana Alam dan Non Alam.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur difokuskan kepada usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penetapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih memprioritaskan pada sinergitas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jambi menjadi kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005 - 2025 juga menjadi acuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimasa yang akan datang. Untuk itu, dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur lebih diarahkan pada :

1. Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang Mendukung Produksi Tanaman Pangan;
2. Meningkatkan, Penataan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani;
3. Menyediakan Benih Unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE;
4. Menyediakan Benih Tanaman Hortikultura (Semangka, Melon, Cabe dan Sayuran);
5. Menyediakan Bibit Tanaman Hortikultura (Nenas dan Buah Buahan);
6. Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk;
7. Menyediakan Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan;
8. Menyediakan Sarana Pasca Panen Tanaman Hortikultura;
9. Menyediakan Alsintan (*Handtractor, Power Thresher, Combine Harvester, Handsprayer, Mesin Pemotong Rumput, Corn Seller, Cultivator*);
10. Menyediakan Excavator PC. 100 ;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

11. Menyediakan Herbisida, Pestisida dan Insektisida;
12. Memfasilitasi Perlindungan Usaha Tanaman Pangan melalui Jasa AOTP;
13. Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang Mendukung Produksi Perkebunan;
14. Meningkatkan Sarana Pengairan/Jaringan Irigasi, Tanggul dan Jalan Produksi;
15. Melakukan *Updating* Usaha Pekebunan Masyarakat (Komoditi Kelapa Dalam, Sawit);
16. Melakukan Fasilitasi dan Sertifikasi Usaha Perkebunan Sawit Masyarakat (Sertifikasi ISPO dan RSPO) dan Penerbitan STDBP;
17. Menyediakan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao;
18. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Bibit Tanaman Pekebunan;
19. Mengoptimalkan Sarana Pembibitan;
20. Menyediakan Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan;
21. Menyediakan Obat-Obatan Hama;
22. Menyediakan Sarana Prasarana dan Peralatan Pemadam Kebakaran Lahan;
23. Memberikan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Besar Masyarakat Khususnya Ternak Sapi;
24. Melakukan Fasilitasi Pemberian Ternak Kambing;
25. Menyediakan Ternak Unggas;
26. Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan Ternak;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

27. Menyediakan Obat Obatan;
28. Meningkatkan Pengawasan Distribusi Ternak;
29. Melakukan Fasilitasi Jasa Pelindungan Usaha Peternakan Masyarakat Melalui Asuransi Ternak Besar;
30. Menyediakan Benih dan Pakan Ikan;
31. Mengembangkan Budidaya Mina Padi;
32. Melakukan Pendataan Kolam/Tambak;
33. Optimalisasi Kolam Tambak Tidak Produktif;
34. Melakukan Fasilitasi dan Menyediakan Peralatan Pengolahan Pakan;
35. Melakukan Fasilitasi Pendirian Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar (1 Kawasan);
36. Menyediakan Sarana Pasarana Pengembangan Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar;
37. Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Kampung Budidaya Ikan Air Tawar;
38. Melakukan Fasilitasi Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
39. Menyediakan Sarana Pasarana Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
40. Optimalisasi Pengelolaan Pengembangan Budidaya Tambak Udang;
41. Menyediakan Alat Tangkap Ramah Lingkungan;
42. Meningkatkan Sarana Tempat Pelelangan Ikan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

43. Optimalisasi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
44. Melakukan Fasilitasi Jasa Perlindungan Kerja Nelayan melalui Asuransi Nelayan;
45. Meningkatkan Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Tangkap;
46. Melakukan Fasilitasi Pengaduan dan Penyelesaian Pelanggaran Sektor Perikanan Tangkap (*Illegal Fishing*) dan Perikanan Budidaya;
47. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
48. Membangun Jalan dan Jembatan yang Menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan;
49. Melaksanakan Pelatihan Teknis Budidaya;
50. Melaksanakan Pelatihan Management Pengelolaan Kelompok;
51. Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S);
52. Meningkatkan Pembinaan Kelompok;
53. Melakukan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Penyuluh;
54. Menyediakan Peralatan dan Pelengkapan Kerja Penyuluh;
55. Meningkatkan Sarana dan Pelengkapan Kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas;
56. Meningkatkan Pengelolaan Demplot Penyuluhan;
57. Melakukan Fasilitasi Perizinan Usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal Produk IKM/UMKM;
58. Melakukan Fasilitasi Perizinan Usaha Perkoperasian;
59. Melakukan Penataan Perkoperasian;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

60. Melaksanakan Pelatihan Management Pengelolaan Usaha IKM/UMKM dan Perkoperasian;
61. Melaksanakan Pelatihan Keterampilan Pelaku IKM/UMKM;
62. Meningkatkan Sarana Prasarana Pasar;
63. Membangun Pasar Baru;
64. Meningkatkan Sarana dan Peralatan Sentra Batik;
65. Optimalisasi Pengelolaan Sentra Batik;
66. Mengembangkan Sentra IKM Olahan Makanan;
67. Menyediakan Aplikasi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital;
68. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital;
69. Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Keamanan dan Ketahanan Pangan;
70. Menyediakan Stok Cadangan Pangan Daerah;
71. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Ketahanan Pangan Daerah;
72. Melakukan Pemetaan Potensi Kepariwisata Berbasis Agrowisata dan Wisata Bahari;
73. Mengembangkan dan Menyediakan Sarana Prasarana Penunjang;
74. Meningkatkan Pelatihan Kelembagaan dan Pengelolaan Kepariwisata;
75. Menyediakan Sarana dan Aplikasi Promosi Potensi Wisata;
76. Optimalisasi Promosi Potensi Wisata;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

77. Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes;
78. Melakukan Fasilitas Kesehatan yang Layak;
79. Meningkatkan Kualitas Nakes;
80. Meningkatkan Kuantitas Nakes;
81. Meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi;
82. Melakukan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
83. Meningkatkan Pengendalian Penyakit;
84. Meningkatkan Program Germas;
85. Meningkatkan Kesehatan Lingkungan;
86. Melakukan Fasilitas Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
87. Meningkatkan Jalan Lingkungan;
88. Membangun Drainase Permukiman;
89. Membangun Ruang Terbuka Hijau;
90. Mengoptimalkan Penyediaan Air Bersih melalui Sistem Pengelolaan dan Berbasis Masyarakat;
91. Mengoptimalkan Pelayanan Penanganan Persampahan;
92. Melakukan Fasilitas Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
93. Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah;
94. Melakukan Fasilitas Peningkatan Kompetensi Guru;
95. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
96. Memberikan Bantuan Pelatihan Dan Keterampilan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

97. Mengembangkan Sarana Ruang Belajar BLK;
98. Memberikan Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja Berbasis Kompetensi;
99. Menyediakan Instruktur Tetap BLK;
100. Meningkatkan Koordinasi dan Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah dengan Penyedia Lapangan Kerja/Perusahaan;
101. Melakukan Fasilitasi Calon Tenaga Kerja Study Kerja di Luar Daerah maupun di Luar Negeri;
102. Meningkatkan Pelayanan Peizinan Secara Terpadu Mudah, Cepat, Tepat dan Akurat;
103. Meningkatkan Kualitas Jalan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
104. Mengoptimalkan Pajak Daerah;
105. Mengoptimalkan Retribusi Daerah;
106. Mengoptimalkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
107. Mengoptimalkan Lain-Lain PAD yang Sah;
108. Mengoptimalkan Potensi Unit BUMD;
109. Melakukan *Updating* Pemetaan Potensi Investasi Daerah;
110. Menyediakan Aplikasi Sarana Promosi Berbasis Digital;
111. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aplikasi Promosi Investasi;
112. Melakukan Fasilitasi Regulasi Aplikasi Informasi Potensi Investasi Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

113. Menyediakan Prasarana Dasar Penunjang Operasional Pabrik;
114. Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Pelaku Usaha;
115. Melakukan Fasilitasi Regulasi Kemudahan Investasi;
116. Menyediakan Aplikasi Sarana Informasi Bursa Kerja Berbasis Digital;
117. Mengoptimalkan Pemanfaatan Aplikasi Bursa Kerja;
118. Melakukan Fasilitasi Regulasi Aplikasi Informasi Lapangan Kerja;
119. Melakukan Fasilitasi Perolehan Pemodal Usaha IKM/UMKM;
120. Memberikan Bantuan Peralatan Pengolahan;
121. Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan;
122. Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan;
123. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
124. Meningkatkan Perbaikan Kinerja Organisasi;
125. Melaksanakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (SOTK) yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran;
126. Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN;
127. Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui Penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja;
128. Meningkatkan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah yang Bertentangan Atau Tidak Sesuai dengan Produk Hukum yang Lebih Tinggi;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

129. Melaksanakan Evaluasi Atas Efektifitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Harmonisasi Peraturan;
130. Mengoptimalkan Sistem Aplikasi dalam Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan, Aset, Data dan Informasi Pembangunan serta Kinerja;
131. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
132. Meningkatkan Maturitas SPIP;
133. Meningkatkan Kapabilitas Internal Audit;
134. Meningkatkan Tindaklanjut Temuan;
135. Menyiapkan Rencana Aksi Pencapaian Target SPM;
136. Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima;
137. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik;
138. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan;
139. Menggerakkan Unit Kerja dalam Melakukan Perubahan dengan Membentuk Agen Perubahan;
140. Meningkatkan Budaya Integritas dan Budaya Kinerja Aparatur;
141. Memetakan Potensi Konflik dan Pemantauan serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Terjadi Dimasyarakat;
142. Memberikan Pendidikan Tentang Keberagaman, dan Toleransi Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Sejak Usia Dini;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

143. Meningkatkan Koordinasi dengan Berbagai Pihak Dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal;
144. Meningkatkan Penegakan Peraturan Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat;
145. Meningkatkan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
146. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
147. Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
148. Mengoptimalkan Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Pandemi Covid-19;
149. Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun mendatang. Adapun visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 - 2026 disajikan pada Tabel 2.1. dan arah kebijakan pembangunan daerah dimuat pada Tabel 2.2.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel 2.1

Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
MISI 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan				
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1	Pembangunan/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan
			2	Meningkatkan Optimasi Lahan Sub Optimal
			3	Menyediakan sarana prasarana produksi dan sarana pasca panen
			4	Menyediakan Alsintan
			5	Mencegah dan menanggulangi hama tanaman pangan dan Hortikultura
	2	Peningkatan Produksi Perkebunan	6	Membangun/Rehab Tanggul dan Jaringan Irigasi Perkebunan
			7	Mengoptimalkan pengelolaan perkebunan
			8	Menyediakan sarana prasarana produksi dan sarana pasca panen
			9	Meningkatkan penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan dan hama pekebunan masyarakat
	3	Peningkatan Populasi Hewan Ternak	10	Meningkatkan populasi ternak Besar dan Kecil
			11	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian distribusi serta layanan kesehatan ternak masyarakat
	4	Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	12	Meningkatkan sarana prasarana perikanan budidaya
			13	Meningkatkan sarana prasarana perikanan tangkap
			14	Meningkatkan pengawasan usaha perikanan
	5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	15	Meningkatkan Kualitas Jalan Produksi Perkebunan, Pertanian dan Perikanan
	6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	16	Meningkatkan kapasitas Kelembagaan petani dan nelayan
			17	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyuluhan
			18	Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan peralatan penyuluhan
	7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	19	Meningkatkan kelembagaan IKM/UMKM dan Koperasi
			20	Meningkatkan kapasitas SDM pelaku IKM/UMKM
			21	Mengembangkan sarana pasarana pemasaran
			22	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
	8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	23	Meningkatkan kepariwisataan daerah berbasis potensi Agrowisata dan wisata bahari



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	
MISI 2. Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing				
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani	1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Faskes dan RSU	24	Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Faskes
			25	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang di Faskes
			26	Mengoptimalkan Kualitas Tenaga Kesehatan
			27	Meningkatkan Kuantitas Tenaga Kesehatan
			28	Meningkatkan Penanganan Stunting
	2	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	29	Menyediakan rumah layak huni
			30	Meningkatkan Penanganan lingkungan Permukiman Kumuh
			31	Menyediakan layanan air bersih
			32	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pesampahan
	3	Perbaiki Sanitasi Masyarakat	33	Meningkatkan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat
2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas dan Beradab	1	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	34	Meningkatkan Aksesibilitas Sekolah
			35	Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			36	Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah dengan perbaikan ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, rumah dinas, sanitasi sekolah pendidikan dasar
	2	Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah	37	Mencetak Santri penghapal Al-Qur'an
	3 Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	1	Peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja	38
39				Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi, serta daya saing sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
40				Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Instruktur
2		Peningkatan Pelaksanaan studi kerja/ magang	41	Menyediakan jaringan penyedia lapangan kerja



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		
MISI 3. Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari				
1 Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	1 Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	42	Meningkatkan layanan perijinan	
	2 Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana	43	Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Wilayah Pertumbuhan Ekonomi	
	3 Peningkatan PAD		44	Meningkatkan Intensifikasi Sumber PAD
			45	Meningkatkan Ektensifikasi Sumber PAD
	4 Penyediaan data dan Informasi digital potensi investasi daerah		46	Menyediakan media informasi potensi investasi daerah berbasis elektronik
47			Menyiapkan Regulasi aplikasi informasi potensi investasi daerah	
2 Meningkatkan Daya Serap Tenga Kerja	1 Fasilitasi Pendirian Pabrik	48	Menyiapkan aksesibilitas penunjang operasional pabrik	
		49	Menjamin keamanan dan kenyamanan berinvestasi	
		50	Menjamin kepastian hukum peluang investasi	
	2 Penyediaan Informasi Lapangan Kerja berbasis Elektronik		51	Menyediakan media informasi lapangan kerja berbasis elektronik
			52	Menyiapkan Regulasi aplikasi informasi lapangan kerja
	3 Fasilitasi Permodalan Usaha dan Peralatan Kerja		53	Memfasilitasi pelaku IKM/UMKM dengan pelaku Jasa Keuangan
			54	Menyediakan sarana prasarana peralatan pengolahan IKM/UMKM
	4 Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan berbasis elektronik		55	Memberikan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan
3 Menjamin Keberlangsungan Pembangunan	1 Pengelolaan Lingkungan Hidup	56	Meningkatkan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan	
	2 Pengendalian Tata Ruang	57	Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Penataan Ruang Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI			
Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis					
1	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	1	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	58	Melakukan Penataan dan penguatan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		2	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	59	Meningkatkan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, dan kesejahteraan ASN, penataan ASN
				60	Meningkatkan Pengendalian produk hukum
		3	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	61	Meningkatkan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				62	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP
		4	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	63	Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik
2	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	1	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	64	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi.
		2	Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat	65	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum
				66	Meningkatkan Pencegahan terhadap Bencana alam dan non alam



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tabel VI.2.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 – 2026

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Tanaman Pangan
Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani	Melakukan penataan sarana pengairan/jaringan irigasi dan jalan usaha tani
Menyediakan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE	Menyediakan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE	Menyediakan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE	Menyediakan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE	Menyediakan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE	Menyediakan benih unggul Padi, Jagung, Kedele/PAJALE
Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)	Menyediakan benih tanaman hortikultura (semangka, melon, Cabe dan Sayuran)
Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)	Menyediakan bibit tanaman hortikultura (Nenas dan buah buahan)
Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk	Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk	Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk	Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk	Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk	Memfasilitasi dan Menyediakan Pupuk



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menyediakan sarana pasca panen tanaman pangan	Menyediakan sarana pasca panen tanaman pangan	Menyediakan sarana pasca panen tanaman pangan	Menyediakan sarana pasca panen tanaman pangan	Menyediakan sarana pasca panen tanaman pangan	Menyediakan sarana pasca panen tanaman pangan
Menyediakan sarana pasca panen tanaman hortikultura	Menyediakan sarana pasca panen tanaman hortikultura	Menyediakan sarana pasca panen tanaman hortikultura	Menyediakan sarana pasca panen tanaman hortikultura	Menyediakan sarana pasca panen tanaman hortikultura	Menyediakan sarana pasca panen tanaman hortikultura
Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)	Menyediakan Alsintan : (Handtraktor, Power thresher, Kombain harvester, Handsprayer, mesin pemotong rumput, corn seller, cultivator)
		Mengadakan Excavator PC. 100 (1 unit)		Mengadakan Excavator PC. 100 (1 unit)	



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida	Menyediakan Herbisida, pestisida dan Insektisida
	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP	Memfasilitasi perlindungan usaha tanaman pangan melalui jasa AUTP
Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan	Membangun dan Memelihara Jaringan Irigasi yang mendukung Produksi Perkebunan
Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi	Meningkatkan sarana pengairan/jaringan irigasi, tanggul dan jalan produksi
	Melakukan Updating usaha pekebunan masyarakat (komoditi kelapa dalam, sawit)	Melakukan Updating usaha pekebunan masyarakat (komoditi kelapa dalam, sawit)			
			Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP	Memfasilitasi dan sertifikasi usaha perkebunan sawit masyarakat (sertifikasi ISPO dan RSPO) dan penerbitan STDBP



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao	Menyediaan Bibit Kelapa Dalam, Kopi Liberika, Pinang dan Kakao
Meningkatkan pengawasan peredaran bibit tanaman pekebunan	Meningkatkan pengawasan peredaran bibit tanaman pekebunan	Meningkatkan pengawasan peredaran bibit tanaman pekebunan	Meningkatkan pengawasan peredaran bibit tanaman pekebunan	Meningkatkan pengawasan peredaran bibit tanaman pekebunan	Meningkatkan pengawasan peredaran bibit tanaman pekebunan
Mengoptimalkan sarana pembibitan	Mengoptimalkan sarana pembibitan	Mengoptimalkan sarana pembibitan	Mengoptimalkan sarana pembibitan	Mengoptimalkan sarana pembibitan	Mengoptimalkan sarana pembibitan
Menyediakan peralatan pengolahan hasil perkebunan	Menyediakan peralatan pengolahan hasil perkebunan	Menyediakan peralatan pengolahan hasil perkebunan	Menyediakan peralatan pengolahan hasil perkebunan	Menyediakan peralatan pengolahan hasil perkebunan	Menyediakan peralatan pengolahan hasil perkebunan
Menyediakan obat-obatan hama	Menyediakan obat-obatan hama	Menyediakan obat-obatan hama	Menyediakan obat-obatan hama	Menyediakan obat-obatan hama	Menyediakan obat-obatan hama
		Menyediakan sarana prasarana dan peralatan pemadam kebakaran lahan		Menyediakan sarana prasarana dan peralatan pemadam kebakaran lahan	
Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi	Melakukan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak Besar masyarakat khususnya ternak Sapi



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Memfasilitasi penyediaan ternak Kambing	Memfasilitasi penyediaan ternak Kambing	Memfasilitasi penyediaan ternak Kambing	Memfasilitasi penyediaan ternak Kambing	Memfasilitasi penyediaan ternak Kambing
Menyediakan ternak Unggas	Menyediakan ternak Unggas	Menyediakan ternak Unggas	Menyediakan ternak Unggas	Menyediakan ternak Unggas	Menyediakan ternak Unggas
			Menyediakan peralatan pengolahan pakan ternak		Menyediakan peralatan pengolahan pakan ternak
Menyediakan obat obatan	Menyediakan obat obatan	Menyediakan obat obatan	Menyediakan obat obatan	Menyediakan obat obatan	Menyediakan obat obatan
Meningkatkan pengawasan distribusi ternak	Meningkatkan pengawasan distribusi ternak	Meningkatkan pengawasan distribusi ternak	Meningkatkan pengawasan distribusi ternak	Meningkatkan pengawasan distribusi ternak	Meningkatkan pengawasan distribusi ternak
Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar	Melakukan perlindungan usaha peternakan masyarakat melalui asuransi ternak besar
Menyediakan benih dan pakan Ikan	Menyediakan benih dan pakan Ikan	Menyediakan benih dan pakan Ikan	Menyediakan benih dan pakan Ikan	Menyediakan benih dan pakan Ikan	Menyediakan benih dan pakan Ikan
Mengembangkan budidaya Mina Padi	Mengembangkan budidaya Mina Padi	Mengembangkan budidaya Mina Padi	Mengembangkan budidaya Mina Padi	Mengembangkan budidaya Mina Padi	Mengembangkan budidaya Mina Padi
		Melakukan Pendataan kolam/tambak	Optimalisasi Kolam tambak tidak produktif		Optimalisasi Kolam tambak tidak produktif



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Melakukan Fasilitasi dan penyediaan peralatan pengolahan pakan		Melakukan Fasilitasi dan penyediaan peralatan pengolahan pakan
	Melakukan Fasilitasi Pendirian kawasan kampung Budidaya Ikan air tawar (1 kawasan)	Menyediakan sarana pasarana pengembangan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar	Optimalisasi pengelolaan kawasan kampung Budidaya ikan air tawar
		Melakukan fasilitasi pengembangan budidaya tambak udang	Menyediakan sarana pasarana pengembangan budidaya tambak udang	Optimalisasi pengelolaan pengembangan budidaya tambak udang	Optimalisasi pengelolaan pengembangan budidaya tambak udang
Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan	Menyediakan alat tangkap ramah lingkungan
		Meningkatkan sarana tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan	Optimalisasi pengelolaan tempat pelelangan Ikan
Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan	Melakukan fasilitasi jasa perlindungan kerja nelayan malalui Asuransi Nelayan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap	Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap	Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap	Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap	Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap	Meningkatkan pengawasan distribusi hasil perikanan tangkap
Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (ilegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (ilegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (ilegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (ilegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (ilegal fishing) dan perikanan budidaya	Melakukan fasilitasi pengaduan dan penyelesaian pelanggaran sektor perikanan tangkap (ilegal fishing) dan perikanan budidaya
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya
Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan	Membangun Jalan dan Jembatan yang menuju Lokasi Lahan Tanaman Pangan
Melaksanakan Pelatihan teknis budidaya	Melaksanakan Pelatihan teknis budidaya	Melaksanakan Pelatihan teknis budidaya	Melaksanakan Pelatihan teknis budidaya	Melaksanakan Pelatihan teknis budidaya	Melaksanakan Pelatihan teknis budidaya
Melaksanakan Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok	Melaksanakan Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok	Melaksanakan Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok	Melaksanakan Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok	Melaksanakan Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok	Melaksanakan Pelatihan manajemen pengelolaan kelompok



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)	Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)	Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)	Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)	Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)	Melaksanakan Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)
Meningkatkan pembinaan kelompok	Meningkatkan pembinaan kelompok	Meningkatkan pembinaan kelompok	Meningkatkan pembinaan kelompok	Meningkatkan pembinaan kelompok	Meningkatkan pembinaan kelompok
Melakukan Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluh	Melakukan Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluh	Melakukan Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluh	Melakukan Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluh	Melakukan Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluh	Melakukan Fasilitasi peningkatan kompetensi SDM Penyuluh
		Menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja		Menyediakan peralatan dan perlengkapan kerja	
Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas	Meningkatkan sarana dan perlengkapan kantor Satker Penyuluhan dan Puskesmas
Meningkatkan pengelolaan Demplot Penyuluhan	Meningkatkan pengelolaan Demplot Penyuluhan	Meningkatkan pengelolaan Demplot Penyuluhan	Meningkatkan pengelolaan Demplot Penyuluhan	Meningkatkan pengelolaan Demplot Penyuluhan	Meningkatkan pengelolaan Demplot Penyuluhan
Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM	Melakukan fasilitasi perizinan usaha P-IRT, dan Sertifikasi Halal produk IKM/UMKM



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian	Melakukan fasilitasi perizinan usaha perkoperasian
Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian	Melakukan Penataan perkoperasian
Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian	Melakukan Pelatihan manajemen pengelolaan usaha IKM/UMKM dan perkoperasian
Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM	Melakukan Pelatihan keterampilan pelaku IKM/UMKM
Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar	Meningkatkan sarana prasarana pasar
			Membangun Pasar baru	Membangun Pasar baru	Membangun Pasar baru
Meningkatkan sarana dan peralatan sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik	Optimalisasi pengelolaan Sentra Batik
		Mengembangkan sentra IKM Olahan Makanan		Mengembangkan sentra IKM Olahan Makanan	
		Menyediakan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi promosi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan berbasis Digital



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.	Meningkatkan Pelayanan ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan ketahanan pangan.
Menyediakan stok cadangan pangan daerah	Menyediakan stok cadangan pangan daerah	Menyediakan stok cadangan pangan daerah	Menyediakan stok cadangan pangan daerah	Menyediakan stok cadangan pangan daerah	Menyediakan stok cadangan pangan daerah
Meningkatkan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah	Meningkatkan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah	Meningkatkan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah	Meningkatkan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah	Meningkatkan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah	Meningkatkan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan daerah
	Melakukan Pemetaan potensi keparisataan berbasis agrowisata dan wisata bahari	Mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana penunjang	Mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana penunjang	Mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana penunjang	Mengembangkan dan menyediakan sarana prasarana penunjang
Meningkatkan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan	Meningkatkan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan	Meningkatkan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan	Meningkatkan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan	Meningkatkan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan	Meningkatkan Pelatihan kelembagaan dan pengelolaan kepariwisataan
	Menyediakan sarana dan aplikasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata	Optimalisasi promosi potensi wisata
Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Faskes
Melakukan Fasilitas kesehatan yang layak	Melakukan Fasilitas kesehatan yang layak	Melakukan Fasilitas kesehatan yang layak	Melakukan Fasilitas kesehatan yang layak	Melakukan Fasilitas kesehatan yang layak	Melakukan Fasilitas kesehatan yang layak



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas Nakes	Meningkatkan kualitas Nakes	Meningkatkan kualitas Nakes	Meningkatkan kualitas Nakes	Meningkatkan kualitas Nakes	Meningkatkan kualitas Nakes
Meningkatkan kuantitas nakes	Meningkatkan kuantitas nakes	Meningkatkan kuantitas nakes	Meningkatkan kuantitas nakes	Meningkatkan kuantitas nakes	Meningkatkan kuantitas nakes
Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesehatan Ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi
Melakukan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat	Melakukan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat	Melakukan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat	Melakukan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat	Melakukan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat	Melakukan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat
Meningkatkan Pengendalian Penyakit	Meningkatkan Pengendalian Penyakit	Meningkatkan Pengendalian Penyakit	Meningkatkan Pengendalian Penyakit	Meningkatkan Pengendalian Penyakit	Meningkatkan Pengendalian Penyakit
Meningkatkan Program Germas	Meningkatkan Program Germas	Meningkatkan Program Germas	Meningkatkan Program Germas	Meningkatkan Program Germas	Meningkatkan Program Germas
Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan
Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR	Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR	Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR	Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR	Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR	Melakukan Fasilitasi Perbaikan Rumah MBR
Meningkatkan Jalan Lingkungan	Meningkatkan Jalan Lingkungan	Meningkatkan Jalan Lingkungan	Meningkatkan Jalan Lingkungan	Meningkatkan Jalan Lingkungan	Meningkatkan Jalan Lingkungan
Melakukan Pembangunan drainase permukiman	Melakukan Pembangunan drainase permukiman	Melakukan Pembangunan drainase permukiman	Melakukan Pembangunan drainase permukiman	Melakukan Pembangunan drainase permukiman	Melakukan Pembangunan drainase permukiman



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun Ruang Terbuka Hijau	Membangun Ruang Terbuka Hijau	Membangun Ruang Terbuka Hijau	Membangun Ruang Terbuka Hijau	Membangun Ruang Terbuka Hijau	Membangun Ruang Terbuka Hijau
Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat	Mengoptimalkan Penyediaan Air bersih melalui sistem pengelolaan dan berbasis masyarakat
Mengoptimalkan pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan	Optimalisasi pelayanan penanganan persampahan
Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)
Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah	Meningkatkan Kualitas Jalan Menuju Sekolah
Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru	Melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dasar
Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan	Memberikan bantuan Pelatihan dan Keterampilan
		Mengembangkan sarana ruang belajar BLK	Meningkatkan peralatan pratikum BLK	Mengembangkan sarana ruang Pratikum BLK	Meningkatkan peralatan pratikum BLK
Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan Pelatihan keterampilan pencari kerja berbasis kompetensi
		Menyediakan Instruktur tetap BLK		Menyediakan Instruktur tetap BLK	
	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan	Meningkatkan koordinasi dan Peningkatan kerjasama antra Pemerintah dengan penyedia lapangan kerja/perusahaan
		Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri	Melakukan Fasilitasi calon tenaga kerja study kerja di luar Daerah maupun di luar Negeri



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat	Meningkatkan pelayanan peizinan secara terpadu mudah, cepat, tepat dan akurat
Meningkatkan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Kualitas Jalan Yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Mengoptimalkan Pajak Daerah	Mengoptimalkan Pajak Daerah	Mengoptimalkan Pajak Daerah	Mengoptimalkan Pajak Daerah	Mengoptimalkan Pajak Daerah	Mengoptimalkan Pajak Daerah
Mengoptimalkan Retribusi Daerah	Mengoptimalkan Retribusi Daerah	Mengoptimalkan Retribusi Daerah	Mengoptimalkan Retribusi Daerah	Mengoptimalkan Retribusi Daerah	Mengoptimalkan Retribusi Daerah
Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Mengoptimalkani Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah	Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah	Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah	Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah	Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah	Mengoptimalkan Lain-lain PAD yang Sah
			Mengoptimalkan potensi unit BUMD	Mengoptimalkan potensi unit BUMD	Mengoptimalkan potensi unit BUMD



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Melakukan Upadating pemetaan potensi investasi daerah	Menyediakan aplikasi sarana promosi berbasis digital	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi promosi investasi
		Melakukan Fasilitasi regulasi aplikasi Informasi potensi investasi daerah			
		Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik	Menyediakan prasarana dasar penunjang operasional pabrik
	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaku usaha
	Melakukan Fasilitasi regulasi kemudahan investasi				
		Menyediakan aplikasi sarana informasi bursa kerja berbasis digital	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi bursa kerja
		Melakukan Fasilitasi regulasi aplikasi Informasi Lapangan kerja			
Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM	Melakukan Fasilitasi perolehan Pemodalan usaha IKM/UMKM



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan	Memberikan Bantuan peralatan pengolahan
		Mengoptimalkan Pelayanan administrasi ketenagakerjaan			
Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan	Meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan indeks kualitas lingkungan
Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi	Meningkatkan perbaikan kinerja organisasi
Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran				
Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN	Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Teknis ASN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja	Meningkatkan Kesejahteraan ASN melalui penilaian Analisis Jabatan dan Beban Kinerja
Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi	Meningkatkan Evaluasi terhadap Produk hukum daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan produk hukum yang lebih tinggi
Melaksanakan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan	Meningkatkan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan produk hukum daerah dan harmonisasi peraturan
Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;	Penggunaan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, pendapatan, aset, data dan informasi pembangunan serta kinerja;
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja
Meningkatkan Maturitas SPIP	Meningkatkan Maturitas SPIP	Meningkatkan Maturitas SPIP	Meningkatkan Maturitas SPIP	Meningkatkan Maturitas SPIP	Meningkatkan Maturitas SPIP



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ARAH KEBIJAKAN					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kapabilitas internal audit;	Meningkatkan kapabilitas internal audit;	Meningkatkan kapabilitas internal audit;	Meningkatkan kapabilitas internal audit;	Meningkatkan kapabilitas internal audit;	Meningkatkan kapabilitas internal audit;
Meningkatkan Tindaklanjut Temuan	Meningkatkan Tindaklanjut Temuan	Meningkatkan Tindaklanjut Temuan	Meningkatkan Tindaklanjut Temuan	Meningkatkan Tindaklanjut Temuan	Meningkatkan Tindaklanjut Temuan
Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM	Menyiapkan Rencana Aksi Pecapaian target SPM
Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima	Mengoptimalkan Budaya Pelayanan Prima
Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik	Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dan Aspirasi Publik dalam Pembangunan
Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan	Menggerakkan Unit kerja dalam melakukan perubahan dengan membentuk agen perubahan
Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur	Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur	Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur	Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur	Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur	Meningkatkan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur
Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;	Melakukan Pemetaan potensi konflik dan pemantauan serta fasilitasi penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2.4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mengimplementasikan misi daerah maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama periode Tahun 2021 - 2026 akan melaksanakan program berdasarkan urusan wajib dan pilihan seperti berikut ini :

I. Untuk mewujudkan misi pertama, yaitu **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan,**

maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air ;
2. Program Penyelenggaraan Jalan;

b) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
2. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Penyuluhan Pertanian.

c) Urusan Pangan, melalui program antara lain :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- d) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :
1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
 3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 4. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- e) Urusan Industri, melalui Program antara lain :
1. Program Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- f) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui Program antara lain :
1. Program Pemberdayaan UMKM;
 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 3. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi;
- g) Urusan Penanaman Modal, melalui program antara lain :
1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- h) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain :
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :
1. Program Aplikasi Infomatika;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- j) Urusan Pariwisata, melalui program antara lain :
 - 1. Program Peningkatan Dayatarik Destinasi Pariwisata;
 - 2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekraf;
 - 3. Program Pemasaran Pariwisata.

II. Dalam mewujudkan misi kedua yaitu **Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
- b) Urusan Kesehatan, melalui program antara lain :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- c) Urusan Keluarga Berencana, melalui program antara lain:
 - 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- d) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain:
 - 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,
 - 3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
- e) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :
- 1) Program Pengelolaan Persampahan;
- f) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain :
- 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Program Pengelolaan Pendidikan;
 - 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.
- g) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

III. Untuk mewujudkan misi ketiga yaitu **Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah:

- a) Urusan Penanaman modal, melalui program antara lain:
- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 4) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - 5) Program Promosi Penanaman Modal.
- b) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui program antara lain:
- 1) Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
- c) Urusan Perdagangan, melalui program antara lain:
- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - 2) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :
- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- e) Urusan Pertanian, melalui program antara lain :
- 1) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- f) Urusan Transmigrasi, melalui program antara lain :
- 1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- g) Urusan Perikanan, melalui program antara lain :
- 1) Pengelolaan Perikanan Budidaya;
 - 2) Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- h) Urusan Lingkungan Hidup, melalui program antara lain :
- 1) Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan LH;
 - 2) Pengelolaan Persampahan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- 3) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - 4) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- i) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain :
 - 1) Program Aplikasi Informatika
 - j) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :
 - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - k) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui program antara lain :
 - 1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - l) Urusan Tenaga Kerja, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penempatan Tenaga kerja;
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - m) Urusan Koperasi dan UMKM, melalui program antara lain :
 - 1) Pemberdayaan UMKM
 - n) Urusan Industri, melalui program antara lain :
 - 1) Perencanaan dan Pembangunan Industri



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

IV. Untuk mewujudkan misi keempat, yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis**, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Urusan Sekretariat Daerah, melalui program antara lain:
 - 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Urusan Kepegawaian, melalui program antara lain:
 - 1) Program Kepegawaian Daerah;
- c) Urusan Perencanaan, melalui program antara lain:
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d) Urusan Keuangan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e) Urusan Pengawasan, melalui program antara lain:
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- f) Urusan Komunikasi dan Informatika, melalui program antara lain:
 - 1) Program Aplikasi Informatika;
 - 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- g) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, melalui program antara lain :
 - 1) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Social;
 - 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- h) Urusan Pendidikan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- i) Non Urusan, melalui program antara lain :
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Rencana Capaian Kinerja Tahunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023. Perjanjian Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang diinginkan. Penetapan Kinerja juga harus sesuai dengan Indikator Kinerja Utama, dimana Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Berikut kami sampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 dengan jumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023 sebesar Rp. 1.238.627.157,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 761.369.852.592,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 324.607.234.906,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.922.602.068,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 148.772.517.591,00

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
MISI I : MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,33
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	4,61
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Semusim	1,89
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,25
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan	4,72
3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	3,28
4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,29



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	konektifitas antar Klaster Lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap (%)	40
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	110,62
7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian dan perikanan yang berstandar (%)	41,34
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari (%)	28,57

MISI II : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,691
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	67
10	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	8,88
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,7
11	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,67
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,73
4	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,56
12	Peningkatan angkatan kerja yang bekerja	Persentase peningkatan Tenaga Kerja yang mendapatkan Pekerjaan (%)	12,51

MISI III : MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI

5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Invenstasi PMDN / PMA	5,7
13	Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN / PMA (Milyar)	3,769
14	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	2,31
6	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	75,282
15	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04

MISI IV : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS

7	Membangun Birokrasi Yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
16	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

17	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan	Indeks Profesional ASN	56
		Indeks Reformasi Hukum	Baik
18	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 3
		Indeks Perencanaan	Baik
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik
		Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WTP
19	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	3,2
8	Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,51
20	Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	72



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk meningkatkan performansi organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjadi suatu kebutuhan bagi Pemimpin Daerah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolak ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolak ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut kelompok urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



3.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengambilan keputusan stratejik agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat. Dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, indikator kinerja masih bersifat parsial dan kumulatif sehingga pada pengukuran capaian kinerja per misi akan diberikan tanda (*) untuk indikator yang bersifat parsial dan tanda (**) untuk indikator yang bersifat kumulatif.

3.2. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ruang lingkup yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan, maka segala pencapaian sasaran-sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari urusan wajib dan urusan pilihan tersebut.


Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat diuraikan pada masing-masing urusan sebagai berikut :

3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAHAN

Capaian masing-masing sasaran tahun 2023 terhadap target yang direncanakan berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	MISI 1 : MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
---	--

Untuk mencapai Misi 1 “**MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN**” pada tahun 2023 telah dilaksanakan 1 (satu) tujuan dan 8 (delapan) sasaran yaitu :

- 1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- 2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan.
- 3) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan.
- 4) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan
- 5) Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan.
- 6) Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan.
- 7) Peningkatan Daya Saing UKM / IKM Sektor Pertanian dan Perikanan.
- 8) Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI	REALISASI TERHADAP TARGET 2022
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,33	4,89	2,50
1	Peningkatan Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman	4,61	1,68	-8.00



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pangan			
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Semusim	1,89	1,16	1,14
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,25	2,19	3,85
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan	4,72	4,13	6,91
3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	3,28	3,29	5,25
4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,29	7,87	3,37
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Konektifitas antar Klaster Lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap (%)	40,00	48,58	20 %
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	110,62	139,77	137,9
7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian dan perikanan yang berstandar (%)	41,34	23,13	24,13
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari (%)	28,57	42,86	0%

Untuk mendukung pencapaian Misi 1 **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 8 sasaran yang didukung dengan 10 Indikator Kinerja Utama.

Dari 10 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2023 sebesar 93,47% atau masuk dalam kategori sedang. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa stakeholder, yaitu : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, yang mana kesemuanya itu saling berkaitan dalam mencapai target kepala daerah yang telah ditetapkan kedalam perjanjian kinerja kepala perangkat daerah.

Berdasarkan kategori pengukuran kinerja di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pekerjaan Umum



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan;
3. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jaringan sumber daya air;
4. Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Bupati.

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023, terdapat beberapa



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

permasalahan yang telah dihadapi beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	Pembangunan sarana jalan, jembatan dan irigasi memerlukan biaya yang sangat tinggi mengingat kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur diwilayah berawa dan dataran rendah serta lahan gambut.	Melaksanakan survey kondisi serta memprioritaskan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan berdasarkan kondisi jalan, jembatan dan irigasi dengan mempedomani azas manfaat dan target kinerja
2	Lambatnya penunjukan penyedia mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tidak tepat waktu	Mendorong serta memotivasi penyedia agar pelaksanaan pekerjaan selesai tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi serta meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan fisik
3	Kondisi lokasi dan cuaca sangat mempengaruhi lamanya pelaksanaan pekerjaan fisik dan kondisi alam yang menyebabkan banjir di beberapa titik jalan kabupaten menyebabkan penurunan kondisi jalan.	Menambah waktu pelaksanaan pekerjaan (addendum)
4	Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dalam pemanfaatan ruang	Melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan RTRW Kabupaten Tanjung Tabung timur dan alur-alur pengeluaran rekomendasi pemanfaatan ruang bagi pemangku kepentingan berdasarkan hasil keputusan tim TKPRD



2. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan;
3. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak;
5. Penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

6. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perkebunan dan peternakan yang diberikan oleh Bupati.

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya Bantuan Benih/Bibit Unggul untuk Kelompok Tani	Penambahan Bantuan Benih/Bibit Unggul untuk Kelompok Tani
2	Kurangnya Tenaga Ahli Penilaian Usaha Perkebunan, Pengawas Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan dan Petugas Informasi Harga Komoditi Perkebunan di Tingkat Kecamatan	Penambahan Personil Petugas PUP, Pengawas Peredaran Benih/Bibit dan Informasi Harga Komoditi Perkebunan
3.	Masih adanya terjadi Kebakaran Kebun dan Serangan Hama Penyakit Perkebunan di Kebun Masyarakat yang mengakibatkan Kerugian Fisik Tanaman	Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan serta Sosialisasi tentang Kebakaran Lahan Kebun, dan Penanganan Hama Penyakit Perkebunan di Kebun Masyarakat
4.	Di Beberapa Wilayah, Tanaman	Sangat diperlukan Pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Kelapa Dalam sangat terganggu pertumbuhannya dan juga produksi buah kelapanya	Tata Air Mikro (TAM)
5.	Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Daging belum optimal	Penyebaran Ternak Kepada Kelompok Tani melalui APBD II, APBD I dan APBN
6.	Masih Terbatasnya Ketersediaan Bahan dan Peralatan Inseminasi Buatan (IB) selama satu tahun berjalan	Dukungan Anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyediaan Bahan Peralatan Inseminasi Buatan (IB)
7.	Masih Terbatasnya Jumlah Inseminator yang memiliki Sertifikat Kompetensi	Mengusulkan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Inseminator ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia
8.	Masih Terbatasnya Penyediaan Lokasi Sumber Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Pendampingan dan Fasilitasi Kelompok Tani dalam Pengembangan Sumber Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)
9.	Belum Optimalnya Fungsi Sarana dan Prasarana Pemasaran Ternak dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Sosialisasi dan Peningkatan Fungsi Pemasaran Ternak dan Produk Hasil Peternakan
10.	Kurangnya Perlengkapan Meubelair serta alat kerja untuk administrasi Puskesmas (Laptop, Printer, dll)	Adanya Penambahan Perlengkapan Meubelair untuk Kelengkapan Administrasi di Kantor Puskesmas
11.	Masih Kurangnya obat-obatan hewan dan Vaksin Hewan	Adanya Penambahan Anggaran untuk Pembelian Obat-obatan Hewan dan Vaksin Hewan
12.	Belum Adanya Alat Tes Uji Cepat Lapangan untuk Pemeriksaan	Perlu diadakannya Alat Test Uji Cepat Lapangan untuk Pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Sampel (Tes Kit Sampel)	Sampel (Test Kit Sampel)
13.	Tidak Adanya Pelatihan/Bimtek untuk Penjagal Ternak (Juru Sembelih Halal)	Perlu diadakannya Kegiatan Pelatihan/Bimtek Juru Sembelih Halal (Juleha)
14.	Belum Adanya Produk UMKM Kab.Tanjung Jabung Timur yang berasal dari Produk Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) bersertifikat Halal	Diadakannya Sosialisasi dan Pengajuan Sertifikat Halal ke Kemenag dan Anggaran Penunjang untuk Kegiatan dimaksud.
15.	Belum Adanya Pelatihan/Bimtek Asisten Pengawas Kesmavet di Lapangan	Perlu diadakan Pelatihan/Bimtek Asisten Pengawas Kesmavet

3. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2. Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
3. Penyelenggaraan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
4. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh Bupati.

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih Rendahnya tingkat kemandirian masyarakat penerima bantuan	Meningkatkan kerjasama yang baik dan sinergis antar nelayan, melibatkan petugas terkait dilapangan (Tenaga Penyuluh Perikanan, Pokmaswas) dan dikoordinasikan sebelum kegiatan dilaksanakan.



No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sehingga pemanfaatan wilayah pesisir kurang berwawasan lingkungan, masyarakat masih menggunakan bahan/alat tangkap yang merusak lingkungan (deskruktif)	Menyeleksi/ inventarisir permintaan masyarakat dalam pengalokasian dana sesuai dengan kondisi lapangan dan kegiatan terkait bantuan kepada masyarakat

4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian;
2. Penyelenggaraan pengembangan dan pengawasan prasarana sarana pertanian;
3. Penyelenggaraan pembinaan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
4. Penyelenggaraan program penyuluhan pertanian;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian yang diberikan oleh Bupati.

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Tingginya alih fungsi lahan	Menggalakan Gerakan meningkatkan indeks pertanaman padi (Gempita Padi), bila petani padi bisa panen minimal 2 kali dalam satu tahun, maka pendapatan petani padi akan bersaing dengan pendapatan petani kebun, sehingga dampak alih fungsi lahan tanaman pangan ke tanaman perkebunan dapat di cegah.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Sebagian besar lahan yang hanya dapat di tanami 1 kali / Tahun	Peningkatan jumlah luas lahan optimasi lahan sehingga lahan yang bisa ditanami minimal 2 kali dalam satu tahun bertambah.
3	Sarana dan Prasarana pertanian belum optimal	Dalam penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, tidak hanya bersumber dari APBD juga dapat bersumber dari APBN.
4	Akses/Jalan distribusi hasil belum memadai untuk dilalui kendaraan roda 4 sampai ke lahan	Melaksanakan peningkatan kualitas jalan usaha tani dan menginventarisasi lahan serta berkoordinasi dengan instansi terkait masalah pembangunan jalan usaha tani sampai ke lahan.
5	Kapasitas kelembagaan kelompok tani serta rendahnya kesadaran kelompok mapan untuk berusaha secara mandiri masih rendah.	Dengan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dari kelas Pemula, Lanjut, Madya dan Utama, bila kelompok tani sudah menjadi kelas Utama maka kemandirian KT akan tinggi.
6	Sarana prasarana pasca panen masih terbatas	Dengan cara menginventarisasi lokasi sesuai kebutuhan sarana prasarana pasca panen sehingga dapat diambil Langkah tindak lanjutnya.
7	Jangkauan pemasaran dan promosi menggunakan media online hasil produksi belum tersedia.	Mengoptimalkan fungsi penyuluh pertanian sebagai motivator dan fasilitator di petani dalam penggunaan media online sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		peluang pasar yang berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Tanjab Timur.
8	Harga jual hasil produksi masih belum stabil dan cenderung situasional	Melaksanakan temu usaha, FGD dengan instansi terkait tentang kestabilan harga pasar komoditi tanaman pangan dan hortikultura, serta ikut melaksanakan inspeksi pasar.
9	Tingginya alih fungsi lahan	Menggalakan Gerakan meningkatkan indeks pertanaman padi (Gempita Padi), bila petani padi bisa panen minimal 2 kali dalam satu tahun, maka pendapatan petani padi akan bersaing dengan pendapatan petani kebun, sehingga dampak alih fungsi lahan tanaman pangan ke tanaman perkebunan dapat di cegah.

5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Perangkat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan pengawasan usaha koperasi;
3. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan usaha mikro;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Bupati.

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kualitas Managerial dan Sumber Daya Manusia Pengurus Koperasi dan pelaku UMKM masih rendah	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian dan berusaha baik melalui penyuluhan, pelatihan maupun studi banding. Untuk itu Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah koperasi maupun UMKM, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.
2	Belum Optimalnya pembinaan dan system pengawasan koperasi	Melaksanakan pelatihan tertib administrasi, penyusunan laporan koperasi dan manajemen pengelolaan koperasi secara <i>sustainable</i> . Melaksanakan pengawasan terpadu secara kontiniu



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Harus ada kebijakan Bersama untuk menstimulasi dan menumbuh kembangkan sector-sektor usaha koperasi sesuai dengan kepentingan anggota
3	Belum optimalnya produktivitas dalam mengembangkan usaha.	Melaksanakan fasilitasi dalam upaya meningkatkan kualitas produk usaha, seperti PIRT, HALAL, dan HAKI Memberikan fasilitas agar pelaku usaha lebih mudah mendapatkan akses permodalan dan bantuan permodalan dengan memberikan fasilitasi pembuatan NIB.

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Perencanaan/perumusan dan menginformasikan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kesalahan Penempatan Jabatan Fungsional Dimana Jabatan Awal Penera diganti Menjadi Fungsional Pengawas Kemetrolgian sehingga kegiatan kemetrolgian khususnya kegiatan tera/tera ulang tidak bisa dilaksanakan	Pengalihan Fungsional ke Jabatan Awal dari Fungsional Pengawas Kemetrolgian menjadi Penera sehingga kewenangan dan legalitas penera dapat aktif kembali.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Jumlah ASN Penerima dan Pengawas Kemetrolagian terbatas	Pengusulan Pembukaan formasi Jabatan Penerima dan Pengawas Kemetrolagian
3	Masih Kurangnya Kuota LPIJI 3 Kg untuk Wilayah Kecamatan se- Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Mengajukan Penambahan Kuota ELPIJI 3 Kg ke Pihak Pertamina dan pihak distributor lainnya
4	Masih Kurangnya Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Pendistribusian ELPIJI 3 Kg dengan pihak-pihak terkait khususnya pihak kecamatan	Meningkatkan koordinasi terkait pengawasan elpiji dengan stakeholder terkait.
5	Masih rendahnya pengetahuan Pelaku UMKM dan IKM tentang pentingnya perizinan / legalitas bagi UMKM dan IKM.	Melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Bagi IKM / UMKM
6	Belum Tersedanya ASN Fungsional Penyuluh Perindustrian masih terbatas dan masih terbatasnya pengetahuan dan Keterampilan SDM Aparatur terhadap pembinaan IKM	Pengusulan Pembukaan formasi jabatan penyuluh perindustrian dan melakukan peningkatan kualitas SDM ASN melalui kegiatan Diklat teknis
7	Masih terbatasnya lahan parkir di lingkungan pasar	Pembangunan lahan parkir yang repletatif di lokasi pasar
8	Terbatasnya SDM Petugas Pasar tentang Manajerial	Melaksanakan Peningkatan SDM petugas pasar tentang manajerial pengeolahan pasar



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pasar	
9	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Melaksanakan Kegiatan Revitalisasi Pasar, Saranan dan Prasarana Distrubis Perdagangan

7. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
2. penyelenggaraan pengelolaan, pemasaran dan pengembangan sumber daya pariwisata serta dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3. penyelenggaraan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
4. penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
5. penyelenggaraan pembudayaan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Bupati.

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum Maksimalnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya	Memperbanyak pagelaran kesenian untuk menumbuhkan kreativitas seniman dan kelompok kesenian
2	Belum terdatanya benda peninggalan sejarah	Melakukan pendataan dan inventarisasi peninggalan sejarah
3	Rendahnya pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan.
4	Rendahnya kualitas dan kuantitas pemasaran	Meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik serta melaksanakan festival wisata dan kebudayaan.



MISI 2 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

Untuk mencapai Misi 2 **“MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”** pada tahun 2023 telah dilaksanakan 3 (tiga) tujuan dan 4 (tujuh) sasaran yaitu :

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit.
- 2) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman.
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
- 4) Peningkatan Angkatan Kerja yang Bekerja.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI	REALISASI TERHADAP TARGET 2022
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,691	0,700	66,34%
9.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	67	66,98	66,34%
10.	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	8,88	7,93	6,09
3.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,7	9,82	9,69
11.	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,67	12,20	12,18
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,73	7,43	7,19
4.	Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,57	98,33	98,69
12.	Peningkatan angkatan kerja yang bekerja	Persentase peningkatan Tenaga Kerja yang mendapatkan Pekerjaan (%)	12,51	-1,04	-2,47

Misi kedua dari RPJMD ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2023 sebesar 77,11% dengan kategori tinggi. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi kedua ini dapat dikategorikan sangat berhasil.

Ukuran keberhasilan khususnya di Misi II ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Semakin tinggi tingkat harapan hidup, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil.
2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca dan rata-rata tingkat sekolah. Semakin tinggi tingkat rata-rata membaca dan rata-rata tingkat sekolah, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil.
3. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli atau mata uang masing-masing negara. Semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat, maka pembangunan ekonomi bisa dikatakan berhasil.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan dalam Pengukuran Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilai yang diuraikan dalam table diatas selanjutnya dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun 2023.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap IKU selain IKU dominan yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya sasaran Renstra .

Berdasarkan kategori pengukuran kinerja di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi antara lain :

2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dibidang kesehatan;

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Masih tingginya angka kematian ibu (AKI)	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan alat kesehatan (USG) untuk pemeriksaan ibu hamil• Peningkatan sarana dan prasarana akses rujukan• Pemenuhan SDM kesehatan khususnya tenaga dokter spesialis obstetri ginekologi• Peningkatan kompetensi nakes (bidan) melalui program magang dan pelatihan• Memperkuat peran serta lintas program lintas sektor terhadap hasil pelaksanaan audit maternal perinatal (AMP)
2	Masih tingginya prevalensi angka stunting	Memperkuat konvergensi lintas sektor yang sudah berjalan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum sesuai dengan harapan	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemahaman secara menyeluruh terhadap tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019• Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM• Peningkatan peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten
4	Sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan sarpras dan alkes diusulkan melalui dana DAK, APBD, atau pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku• Meningkatkan pemanfaatan aplikasi aspak dengan selalu melakukan updating data• Melaksanakan Kalibrasi alat kesehatan secara berkala
5	9 jenis tenaga kesehatan belum terpenuhi untuk 17 puskesmas	Pemenuhan 19 jenis tenaga diusulkan melalui program nusantara sehat, rekrutmen nakes dengan pemanfaatan dana DAK non fisik melalui pembiayaan BOK Puskesmas, serta dana APBD

Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Selama Kurun Waktu Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas telah mengeluarkan beberapa



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

kebijakan strategis yang kontekstual dengan kondisi tahun berkenaan serta bersifat penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut berupa Keputusan Bupati sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Kebijakan Strategis Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Jaminan kesehatan masyarakat	Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2021	Penetapan nama peserta penerima bantuan iuran
2	Pelayanan kapitasi puskesmas	Keputusan Bupati Nomor 83 Tahun 2021	Alokasi dana kapitasi jkn
3	Kemampuan pelayanan dan karakteristik wilayah kerja puskesmas	Keputusan Bupati Nomor 252 Tahun 2021	Peningkatan status faskes
4	Pencegahan kecurangan pelaksanaan jkn	Keputusan Bupati Nomor 253 Tahun 2021	Pencegahan kecurangan (fraud)
5	Puskesmas Poned	Keputusan Bupati Nomor 462 Tahun 2021	Peningkatan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar
5	Sumber daya kesehatan	Keputusan Bupati Nomor 504 Tahun 2021	Peningkatan ketersediaan nakes

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
3. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
4. penyelenggaraan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
6. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diberikan oleh Bupati.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kebutuhan Air Bersih	Pembangunan sarana air bersih dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 sebanyak 751 sambungan rumah, dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) menggunakan dana APBD sebanyak 35 sambungan rumah. Selain itu dilakukan juga pembangunan sumur air baku sebanyak 17 titik.
2	Kebutuhan Sanitasi	Pembangunan tangki septik individual dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 sebanyak 373 sambungan rumah, dan pembangunan TPS3R sebanyak 2 unit, ada pula program Pembangunan tangki septik



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		individual menggunakan dana APBD sebanyak 140 sambungan rumah.
3	Kebutuhan Rumah	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menggunakan dana APBD melakukan bedah rumah sebanyak 51 rumah.
4	Banyaknya jaringan perpipaan distribusi yang mengalami kebocoran	Melakukan Pembaharuan jaringan Perpipaan Distribusi
5	Kemampuan Mesin Pompa Air yang menurun	Pengadaan Mesin Pompa Baru dan Penganggaran Perbaikan Pompa
6	meteran air yang tidak berfungsi dengan baik (Rusak)	Pengadaan Meteran Air baru sebagai pengganti Meteran air yang rusak dan untuk penyambungan baru
7	Masih banyak Daerah yang tidak terakses jaringan Perpipaan UPTD Spam	Menganggaran penambahan jaringan perpipaan yang baru
8	Biaya Operasional lebih besar dari pada Pendapatan	1. Melakukan Perubahan Tarif air UPTD Spam Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tarif yang berlaku saat ini sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 141 Tahun 2017) 2. Penambahan Penyambungan Jaringan ke Pelanggan baru
9	Kurangnya Sumber Air Baku di beberapa IKK	Pembuatan Sumur Bur Dalam



3. Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan penataan lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. Penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Adanya mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan yang belum akurat.	Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2	Masih minimnya informasi antar sektor.	Penguatan data dan informasi antar sektor sebagai media informasi dan up dating data.
3	Belum adanya fungsional khususnya PPLH dan PPNS.	Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang lingkungan untuk melakukan diklat fungsional khususnya PPLH dan PPNS.
4	Masih pemahaman pelaku usaha tentang pemahaman produksi yang ramah lingkungan.	Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah, pelaku usaha kegiatan dan skala rumah tangga tentang pemahaman produksi yang ramah lingkungan.
5	Belum meratanya sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat.	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat.
6	Masih rendahnya koordinasi antara	Tetap konsisten untuk melakukan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	unit-unit kerja dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7	Minimnya pengaduan masyarakat untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.	Dibentuknya pos pengaduan masyarakat sebagai salah satu wadah masyarakat/setiap orang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.
8	Belum terakreditasinya Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Perlunya dukungan Sarana dan prasarana serta SDM demi mendukung Terakreditasinya laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup

4. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. Penyelenggaraan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3. Penyelenggaraan pembinaan pendidikan dasar dan menengah pertama;
4. Penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;

Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurang meratanya Penyebaran Guru	Pemetaan Guru
2	Banyaknya Guru yang memasuki usia Pensiun	Usulan Penambahan guru Honorer
3	Masih ada guru yang belum memiliki sertifikat Pendidik	Melakukan kerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu, dalam peningkatan Kompetensi guru
4	Guru yang Belum Memiliki S1	Diadakan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan Kualifikasi Guru PAUD
5	Sarana Prasarana sekolah belum	Melakukan penambahan usulan



terpenuhi	Dana DAK dan Revitalisasi PUPR
-----------	--------------------------------

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi;
2. Penyelenggaraan pelatihan, penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
3. Penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial;
4. Penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pengembangan ketransmigrasian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi yang diberikan oleh Bupati.

PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Permasalahan	Solusi
1.	Jaringan Internet yang sering mengalami gangguan dalam pelayanan kartu pencari kerja	Adanya jaringan internet sendiri yang bisa digunakan dalam pelayanan kartu pemcari kerja
2.	Belum terbentuknya LKS Tripartit, karena salah satu persyaratan APINDO Kabupaten Fakum (Belum berjalan).Belum ada Ketua.	Pembentukan kembali APINDO berkoordinasi dengan Provinsi Jambi.
3.	Masih kurang aktifnya perusahaan untuk melaporkan ketenagakerjaan pada Dinas Nakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur.	Menghimbau kepada seluruh perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaporkan tenaga kerja perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Solusi
4.	Belum aktifnya serikat pekerja/serikat buruh melaporkan kegiatan dan permasalahan yang ada	Dihimbau melalui sosialisai kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk melaporkan semua kegiatan dan permasalahan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5.	Masih kurangnya pemahaman Perusahaan dan Pekerja tentang Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan	Dilaksanakan Sosialisasi tentang Peraturan Ketenagakerjaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan.
6.	Masih kurangnya Instruktur dari ASN	Diklat dan Pelatihan instruktur bagi PNS
7.	Masih kurangnya sarana dan prasarana pada UPTD BLK	Pembangunan sarana dan prasarana pada UPTD BLK
8.	Masih kurangnya data dan peta mengenai asset baik fasum maupun fasos eks transmigrasi kabupaten tanjong jabung timur	Digitalisasi peta fasum dan fasos eks. Transmigrasi kabupaten Tanjung Jabung Timur
9.	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kebun buah agroeduwisata KPB/KTM Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kebun buah agroeduwisata KPB/KTM Geragai.
10.	Rendahnya SDm pada masyarakat eks. Transmigrasi	Perluanya sosialisasi penguatan SDM pada masyarakat eks.transmigrasi
11.	Masih kurangnya penerangan(listrik) masyarakat Kawasan eks.transmigrasi	Perlunya bantuan pasang baru listrik(BpBL) Kawasan eks.transmigrasi
12.	Masih terdapat masyarakat eks. Transmigrasi yang belum memiliki sertifikat(hilang, tidak terbaca/rusak)	Mamfasilitasi masyarakat eks.transmigrasi dari Kepala Desa untuk diusulkan ke Dinas Nakertrans dan berkoordinasi ke BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MISI 3 : MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI

Untuk mencapai Misi 3 “**MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI**” pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yaitu :

- 1) Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah.
- 2) Peningkatan PAD.
- 3) Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI	REALISASI TERHADAP TARGET 2022
5.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Invenstasi PMDN / PMA	5,7	6,71	7,4
13.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN / PMA (Milyar)	3,769	4,132	4,009
14.	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	2,31	-19,0	22,60
6.	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04	68,92	100
15.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04	68,92	67,30



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Misi ketiga dari RPJMD ini terdiri dari 2 sasaran dan 3 indikator utama dengan rata-rata capaian kinerja terhadap target tahun 2023 cukup tinggi sebesar 66,67%. Jika melihat standar pencapaian dengan skala ordinal yang telah ditetapkan maka pelaksanaan dari misi ketiga ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena memiliki nilai rata-rata diatas 100 %.

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan dalam Pengukuran Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan kategori pengukuran kinerja di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Aplikasi Peizinan Onlie OSS RBA yang di kembangkan oleh Kementerian Investsi/BKPM RI dan SiCantik Cloud yang dikembangkan Oleh Kemenkominfo Masih sering Trouble sehingga sedikit menghambat dalam prosese penerbitan perizinan.	Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengembangan, maintenance dan Troubleshoot Aplikasi Perizinan Online ke Kementerian Investasi/BKPM RI dan Kemenkominfo. 1.
2	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perizinan Online hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah.	1. Melalui Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pelayanan perizinan ditempat dengan turun langsung ke masyarakat dan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan sekaligus mensosialisasikan Perizinan Online Melalui Aplikasi OSS RBA dan SiCantik Cloud serta SIMBG.
3	Adanya kesalahan sistem (error sistem aplikasi LKPM) saat pelaporan pada triwulan IV sehingga sebagian data yang telah terlapor tidak terbaca oleh verifikator Kementerian Investasi	1. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Investasi/BKPM tentang permasalahan error pada aplikasi LKPM.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	(BKPM) dan tidak tercatat sebagai realisasi investasi tahun 2022.	
4	Masih banyaknya pelaku usaha terutama Usaha Kecil Menengah (UMKM) belum memahami tatacara pelaporan LKPM	1. Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Pelaku Usaha Melaksanakan pendampingan terhadap Pelaku Usaha dalam melaporkan LKPM
5	Masih adanya lokasi yang belum ada jaringan internet (Blank Spot) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) terkait peningkatan sarana prasarana jaringan internet untuk lokasi yang belum terdapat jaringan internet (Blank Spot).

2. Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan anggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik Daerah;
2. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan
3. dan Belanja Daerah;
4. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan administrasi keuangan pemerintah Daerah;
5. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan penerimaan daerah serta pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
6. pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah yang terinventarisasi dan sesuai standardisasi;
7. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, penyiapan penetapan dan pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Daerah;
8. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang diberikan oleh Bupati.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023

beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Permasalahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Dalam pelaksanaan pekerjaan pemetaan PBB-P2 secara digital untuk tahun 2022 yang dilakukan secara swakelola dan didampingi tenaga ahli, kelemahannya adalah kurangnya kuantitas dan kualitas SDM terkait pengelolaan data jika dibandingkan dengan cakupan desa dan kelurahan lokasi pemetaan.	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang berkaitan dengan pekerjaan pemetaan PBB-P2 dan komitmen untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.
2	Masih terbatasnya kompetensi SDM terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis bidang pengelolaan keuangan, penganggaran dan pengelolaan barang milik daerah.
3	Kendala tidak ditemukannya dokumen kepemilikan tanah milik Pemda dan ketidakakuratan batas-batas tanah.	Melakukan penelusuran dokumen kepemilikan tanah Pemda dengan cara berkoordinasi secara intens dengan tokoh masyarakat tua tengganai di lokasi aset tersebut dan melalui Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	MISI 4 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS
---	--

Untuk mendukung Misi 4 telah dilakukan sasaran utama diantaranya :

- 1) Penataan Kelembagaan dan Organisasi.
- 2) Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan.
- 3) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya.
- 5) Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat.
- 6) Peningkatan Rasa Aman Bagi Semua Lapisan Masyarakat

Seluruh sasaran tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk
Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk
mencapai indikator kegiatan sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI	REALISASI TERHADAP TARGET 2022
8.	Membangun Birokrasi Yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	C
20.	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3
21.	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan	Indeks Profesional ASN	56	45,497	32,22
		Indeks Reformasi Hukum	Baik	Cukup	33,85 (Kurang)
22.	Peningkatan	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 2



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Perencanaan	Baik	Sangat Baik	Baik
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Cukup
		Nilai SAKIP	B	B	B
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP
23.	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	3,2	3,72	3,32
9.	Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,51	94,11	94,11
24.	Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	72	71,5	71,50

Berdasarkan standar pencapaian dengan skala ordinal maka 2 sasaran dengan 10 indikator yang mendukung misi keempat dapat dinyatakan meraih angka sempurna karena seluruh capaian kinerja terhadap target tahun 2023 meraih angka rata-rata sebesar 93,52% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Pencapaian ini didapat karena adanya komitmen dari kepala daerah dan para kepala perangkat daerah khususnya yang telah mampu untuk meraih target yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa indikator tidak sesuai dengan target namun dalam hal ini bukan berarti dikatakan gagal dikarena indicator tersebut baru akan dilaksanakan atau dikerjakan di tahun selanjutnya berdasarkan target di RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ukuran keberhasilan khususnya dibidang pemerintahan ini dikarenakan adanya goodwill dari kepala daerah untuk menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelayan bagi masyarakatnya selaras dengan visi – misi Bupati “MERAKYAT”

Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan dalam Pengukuran Target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berdasarkan kategori pengukuran kinerja di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas	Perlu adanya Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan bimbingan teknis diberbagai bidang sehingga Sumber Daya Manusia dapat berkualitas
2	Masih terbatasnya pegawai yang memiliki sertifikat barang/jasa	Perlu adanya pendidikan dan pelatihan terkait barang/jasa sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
3	Kurangnya koordinasi antara bagian terkait perencanaan anggaran	Perlu adanya koordinasi internal Sekretariat Daerah untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program dan kegiatan yang



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dilaksanakan sehingga tercapainya dampak dari program kegiatan Sekretariat Daerah yang lebih maksimal.
4	Penetapan indikator-indikator kinerja belum seluruhnya terukur	Sinkronisasi kegiatan lebih diutamakan sehingga target kinerja tiap tahun statis dan dapat menunjukkan hasil kinerja sebenarnya.

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai fungsi :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

1. Merumuskan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD);
2. Merencanakan program kerja Tahunan BKPSDMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan Fungsi Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kebijakan BKPSDMD;
4. Merencanakan penyelenggaraan program kerja, kesekretariatan, formasi dan Informasi data, pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, Pengembangan SDM, Pembinaan Disiplin, Pemberian Kesejahteraan serta Pengembangan Kompetensi PNS;
5. Mengadministrasi keuangan, umum, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengendalikan dan membina PNS di Lingkungan BKPSDMD;
7. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien Mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas;
8. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati mengenai tata laksana kegiatan BKPSDMD;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Adanya perubahan baik dalam bentuk kebijakan maupun regulasi oleh pemerintah pusat terkait masalah kepegawaian sehingga berdampak terhadap capaian yang telah ditargetkan.	Perlu adanya sinkronisasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian sehingga capaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.



3. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Di Inspektorat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengawasan karena keterbatasan jumlah dan kualitas auditor	Menambah SDM dan mengirim pelatihan-pelatihan dan sertifikasi terhadap auditor yang ada pada Inspektorat Daerah
2	Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu adanya koordinasi yang intens dan menyeluruh	Koordinasi yang lebih intens untuk meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dan antar APIPDA

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perencanaan pembangunan Daerah;
2. koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3. penyusunan rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
4. penyusunan program dan nota keuangan/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi rencana dan program serta dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
6. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Solusinya

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Permasalahan dan Upaya Mengatasi
Permasalahan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Belum optimalnya koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2	Belum optimalnya pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah	Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia
3	Belum Optimalnya Mekanisme dalam penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan	Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan
4	Belum Optimalnya kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas	Melaksanakan Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas

5. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2. penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah pelayanan informasi publik di Kabupaten;
3. penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
4. penyelenggaraan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di kabupaten;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
6. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Aplikasi Peizinan Onlie OSS RBA yang di kembangkan oleh Kementerian Investi/BKPM RI dan SiCantik Cloud yang dikembangkan Oleh Kemenkominfo Masih sering Trouble sehingga sedikit menghambat dalam prosese penerbitan perizinan.	Melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Pengembangan, maintenance dan Troubleshoot Aplikasi Perizinan Online ke Kementerian Investasi/BKPM RI dan Kemenkominfo.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Perizinan Online hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah.	Melalui Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pelayanan perizinan ditempat dengan turun langsung ke masyarakat dan pelaku usaha yang belum memiliki izin dan sekaligus mensosialisasikan Perizinan Online Melalui Aplikasi OSS RBA dan SiCantik Cloud serta SIMBG.
3	Adanya kesalahan sistem (error sistem aplikasi LKPM) saat pelaporan pada triwulan IV sehingga sebagian data yang telah dilaporkan tidak terbaca oleh verifikator Kementerian Investasi (BKPM) dan tidak tercatat sebagai realisasi investasi tahun 2022.	Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian Investasi/BKPM tentang permasalahan error pada aplikasi LKPM.
4	Masih banyaknya pelaku usaha terutama Usaha Kecil Menengah (UMKM) belum memahami tatacara pelaporan LKPM	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Pelaku Usaha2. Melaksanakan pendampingan terhadap Pelaku Usaha dalam melaporkan LKPM



No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5	Masih adanya lokasi yang belum ada jaringan internet (Blank Spot) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) terkait peningkatan sarana prasarana jaringan internet untuk lokasi yang belum terdapat jaringan internet (Blank Spot).

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
2. Penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan hubungan antar organisasi kemasyarakatan dan antar lembaga swadaya masyarakat;
4. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan demokrasi dan hubungan antar partai politik;
5. Penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan stabilitas politik serta kerukunan umat beragama dan masyarakat
6. Penyelenggaraan penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
8. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 beserta upaya mengatasi permasalahan, dapat dilihat pada Tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Kurangnya Personil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini dan juga sebagian personil yang kurang menguasai bidang tugasnya.	Mengajukan permintaan penambahan personil Apartur Pegawai kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur cq. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama Pada Jabatan Analis Kebijakan yaitu 3 ASN.
2	Kondisi ORMAS, LSM, PARPOL dan Organisasi lainnya keberadaan yang terpecah di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaannya maupun untuk menghubunginya.	Menata dan Menginventarisir kontinyu keberadaan ORMAS/LSM/PARPOL dan organisasi lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
3	Masih terdapat rumah ibadah yang belum memiliki izin pendirian dan minimnya informasi dan laporan perkembangan kegiatan jemaah sehingga menyebabkan sulitnya pemantauan kegiatan umat beragama.	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap para tokoh agama dan tokoh masyarakat Bersama Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadah.
4	Masih belum selesainya kesepakatan tapal batas antar wilayah, hak guna lahan antara warga dan perusahaan sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik berkelanjutan.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelesaian tapal batas antar wilayah dan hak guna lahan antar warga dan perusahaan.

3.4. KINERJA KEUANGAN

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan sebesar Rp. 1.157.591.818.073,00,- dimana dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.151.055.769.559,14,- atau terealisasi sebesar 99,44% dapat jelas sebagai berikut :

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	68.440.490.534,00	58.898.231.892,14	86,06%
2	Pendapatan Transfer	1.089.151.327.539,00	1.092.157.667,00	100,28%
	Total	1.112.594.730.184,19	1.151.055.769.559,14,-	99,44%

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Untuk menilai lebih lanjut kinerja pendapatan daerah kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Penerimaan dari jenis lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, sumbangan pihak ketiga dan penerimaan lain-lain.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	21.191.200.000,00	20.162.947.719,50	99,15%
2	Retribusi Daerah	1.472.427.940,00	1.131.224.975,00	76,83%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8.050.000.000,00	8.343.002.417,40	103,64%
4	Lain – Lain PAD yang sah	37.726.862.594,00	29.261.056.780,24	77,56%
Jumlah		68.440.490.534,00	58.898.231.892,14	86,06%

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2023 penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp. 68.440.490.534,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.898.231.892,14- atau 86,06%. Realisasi ini lebih besar dari Tahun 2023 sebesar Rp. 59.774.620.523,58-.

2. Pendapatan Transfer



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Untuk dana perimbangan terdiri atas penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.014.549.052.862,00	1.018.135.262.990,00	100,35%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.602.274.677,00	74.022.274.677,00	99,22%
Jumlah		1.089.151.327.539,00	1.092.157.537.667,00	100,28%

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Total realisasi pendapatan transfer selama tahun 2023 melebihi target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.089.151.327.539,00,-. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi Rp. 1.092.157.537.667,- atau 100,28%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan	--	--	-



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jumlah	-,-	-,-	-
---------------	-----	-----	---

Sumber Data : BKD Kab. Tanjung Jabung Timur

2. Belanja Daerah

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	761.541.518.892,00	716.898.520.071,82	94,14%
2	Belanja Modal	324.607.234.906,00	314.248.256.079,00	96,81%
3	Belanja Tidak Terduga	15.499.239.068,00	609.000.000,00	3,93%
4	Belanja Transfer	148.772.517.591,00	148.750.979.097,00	99,99%
	Total	1.250.420.510.157,00	1.180.506.755.247,82	94,41%

Pada tahun anggaran 2023 belanja daerah hanya sebesar 94,41% dari total belanja, hal ini seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah 2021-2026.

Total realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.180.506.755.247,82 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.250.420.510.157,00 atau terealisasi sebesar 94,41%, dimana belanja operasi terealisasi sebesar Rp.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

716.898.520.071,82,- atau 94,14%, belanja modal terealisasi sebesar Rp. 314.248.256.079,00,- atau 96,81%, belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp. 609.000.000,00,- atau 3,93%, dan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp. 148.750.979.097,00,- atau 99,99%.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN/TARGET	REALISASI
1	Penerimaan Pembiayaan	98.828.692.083,86,-	98.828.692.083,86,-
	- SILPA	98.828.692.083,86,-	98.828.692.083,86,-
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,-	6.000.000.000,-
	- Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000.000.000,-	6.000.000.000,-
3	Pembiayaan Netto	92.828.692.083,86,-	92.828.692.083,86,-

* Data Sementara (unaudit)

Sumber : BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2023, data



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2023, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 98.828.692.083,86,- terealisasi sebesar Rp. 98.828.692.083,86,- atau 100,00%, sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp. 6.000.000.000,00,- atau 100% lebih besar dari Tahun 2022. Pembiayaan netto tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 92.828.692.083,86,- dengan realisasi sebesar Rp. 92.828.692.083,86,- atau sebesar 100%.



BAB IV PENUTUP

Bab ini menyimpulkan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran, tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari, bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran, tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021–2026, sesuai dengan tahapan target pencapaian per



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

tahun, maka pada tahun 2023 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya.

Dari seluruh indikator sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seluruhnya sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023. Hal ini akan menjadi strategi untuk diselesaikan pemecahannya pada tahun berikutnya.

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sangat mengharapkan adanya/ peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk:

1. Partisipasi *stakeholders*, antara lain : Perangkat Daerah (Sekretariat, Dinas, Badan, dan perangkat daerah lainnya), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

penyelarasan dengan program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Perubahan paradigma aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah.


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2023**



LAMPIRAN I



INDIKATOR KINERJA UTAMA



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berisi Indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022
NOMOR. 2..

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021-2026**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja						Sumber Data	SKPD PELAKSANA
			Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
VISI : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR (MERAHYAT)											
MISI 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan											
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	BPS	2,68	3,23	3,78	4,33	4,88	5,43	6,00	Primer	Dinas TPH, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja						Sumber Data	SKPD PELAKSANA
			Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
MISI 2 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing											
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	IK = (UHH-UHH Min)/(UHH Maks-UHH Min)	0,687	0,688	0,690	0,691	0,692	0,693	0,695	Primer	Dinas Kesehatan, RSUD NH, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LH, Dinas PPKB
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	IP = (HLS + Rata2 Lama Sekolah)/2	9,43	9,52	9,61	9,70	9,79	9,88	9,97	Primer	Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah
Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	BPS	71,53	71,54	71,56	71,57	71,59	71,60	71,61	Primer	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MISI 3 : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari											
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	Target Tahun n/Total Target x 100	0	0	5,4	5,7	10,53	11,54	11,79	Primer	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Badan Keuangan Daerah, OPD yang mendapatkan Target PAD, Satpol PP Damkar

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	Capaian Kinerja	Target Kinerja						Sumber Data	SKPD PELAKSANA
			Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Data TPAK BPS	74,180	74,180	75,282	76,384	77,486	78,588	79,69	Primer	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM
Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	Jumlah Perusahaan yang Taat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dibagi total Perusahaan x 100	100	100	100	100	100	100	100	Primer	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis											
Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian Menpan RB	NA	C	CC	CC	B	B	B	Primer	Seluruh OPD
Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	Survey	NA	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	Primer	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP Damkar

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN II



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN TAHUN 2023



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ROMI HARIYANTO**

Jabatan : **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Sabak, November 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ROMI HARIYANTO

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pemerintah Kabupaten
Tahun

: Tanjung Jabung Timur
: 2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
MISI I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	4.33
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	4.61
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Semusim	1.89
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2.25
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan	4.72
3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	3.28
4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3.29
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	konektifitas antar Klaster Lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap (%)	40.00
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	110.62
7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian dan perikanan yang berstandar (%)	41.34
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari (%)	28.57
MISI II : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing			
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	0.691
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	67
10	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	8.88
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9.7

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
11	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.67
		Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	6.73
4	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71.57
12	Peningkatan angkatan kerja yang bekerja	Persentase peningkatan Tenaga Kerja yang mendapatkan Pekerjaan (%)	12.51
MISI III : Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari			
5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	5.7
13	Peningkatan Pelayanan Perizinan mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN/PMA (Milyar)	3.769
14	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD (%)	2.31
6	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.04
15	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.04
MISI IV : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tatanan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis			
7	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
16	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3
17	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN	56
		Indeks Reformasi Hukum	Baik
18	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 3
		Indeks Perencanaan	Baik
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik
		Nilai SAKIP	B
		Opini BPK	WTP
19	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3.2
8	Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0.51
20	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi	72

Jumlah Belanja APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.238.672.207.157 yang terdiri dari :

1) Belanja Operasi sebesar Rp. 761.369.852.592

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
----	----------------	-------------------	----------------

- 2) Belanja Modal sebesar Rp. 324.607.234.906
- 3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.922.602.068
- 4) Belanja Transfer sebesar Rp. 148.772.517.591

The seal is circular with a purple border. Inside, there is a Garuda (Indonesian national emblem) in the center. The text 'BUPATI TANJUNGGABUNGTIMUR' is written around the inner edge of the seal. A blue ink signature is written over the seal.
BUPATI TANJUNGGABUNGTIMUR
H. RONI HARIYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN III



RENCANA KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN 2023



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
MISI I : MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,33
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	4,61
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Semusim	1,89
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,25
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan	4,72
3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	3,28
4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,29
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Konektifitas antar Klaster Lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap (%)	40,00%
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	110,62
7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian dan perikanan yang berstandar (%)	41,34
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari (%)	28,57
MISI II : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING			
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,691
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	67%
10	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	8,88%
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,7
11	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,67
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,73

4	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,57
12	Peningkatan angkatan kerja yang bekerja	Persentase peningkatan Tenaga Kerja yang mendapatkan Pekerjaan (%)	12,51
MISI III : MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI			
5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Invenstasi PMDN / PMA	5,7
13	Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN / PMA (Milyar)	3,769
14	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	2,31
6	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04
15	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04
MISI IV : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS			
7	Membangun Birokrasi Yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
16	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3
17	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan	Indeks Profesional ASN Indeks Reformasi Hukum	55 Baik
18	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP Indeks Perencanaan Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nilai SAKIP Opini BPK	Level 3 Baik Baik B WTP
19	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	3,2
8	Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,51
20	Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	72

Muara Sabak, November 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO, SE.





LAMPIRAN IV



PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN KABUPATEN TAHUN 2023



**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		REALISASI TARGET TAHUN 2022
			TARGET	REALISASI	
MISI I : MEWUJUDAKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN					
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB	4,33	4,89	2,50
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	4,61	1,68	-8,00
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Semusim	1,89	1,16	1,14
		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,25	2,19	3,85
2	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan	4,72	4,13	6,91
3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	3,28	3,29	5,25
4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,29	7,87	3,37
5	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian dan Perikanan	Konektifitas antar Klaster Lahan pertanian dan perikanan dalam kondisi mantap (%)	40,00	48,58	20,00
6	Peningkatan Daya Saing Pertanian dan Perikanan	Nilai Tukar Petani (NTP)	110,62	139,77	137,9
7	Peningkatan Daya Saing UKM/IKM sektor Pertanian dan Perikanan	Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian dan perikanan yang berstandar (%)	41,34	24,13	24,13
8	Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari	Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari (%)	28,57	42,86	0%

MISI II : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING					
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat	Indeks Kesehatan	0,690	0,700	0,689
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan Pustu) dan Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	67,00	66,98	66,34%
10	Peningkatan Kuaitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Pengurangan Luas Permukiman Kumuh (Ha)	67%	7,93	6,09 %
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	9,61	9,82	9,69
11	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,67	12,20	12,18
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,73	7,43	7,19
4	Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	71,57		98,69
12	Peningkatan angkatan kerja yang bekerja	Persentase peningkatan Tenaga Kerja yang mendapatkan Pekerjaan (%)	12,51	-1,04	-2,47
MISI III : MENINGKATAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI					
5	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Invenstasi PMDN / PMA	5,7	6,71	7,4
13	Peningkatan Pelayanan Perizinan Mendukung Investasi Daerah	Realisasi Investasi PMDN / PMA (Milyar)	3,769	4,132	4,009
14	Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	2,31	-19,0	22,60
6	Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04	68,92	67,30
15	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,04	68,92	67,30
MISI IV : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS					
7	Membangun Birokrasi Yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	C
20	Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Indeks Kelembagaan	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3
21	Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan PerUndang-Undangan	Indeks Profesional ASN	55	45,497	32,22

		Indeks Reformasi Hukum	Baik	Cukup	33,85 (Kurang)
22	Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 2
		Indeks Perencanaan	Baik	Sangat Baik	Baik
		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Cukup
		Nilai SAKIP	B	B	B
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP
23	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya	Indeks Pelayanan Publik	3,2	3,72	3,32
9	Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	0,51	94,11	94,11
24	Terciptanya Kohesi Sosial Masyarakat	Indeks Toleransi	72	71,5	71,50

Muara Sabak, Maret 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN V



POHON KINERJA KABUPATEN TAHUN 2023

POHON KINERJA
RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR
TAHUN 2021 - 2026

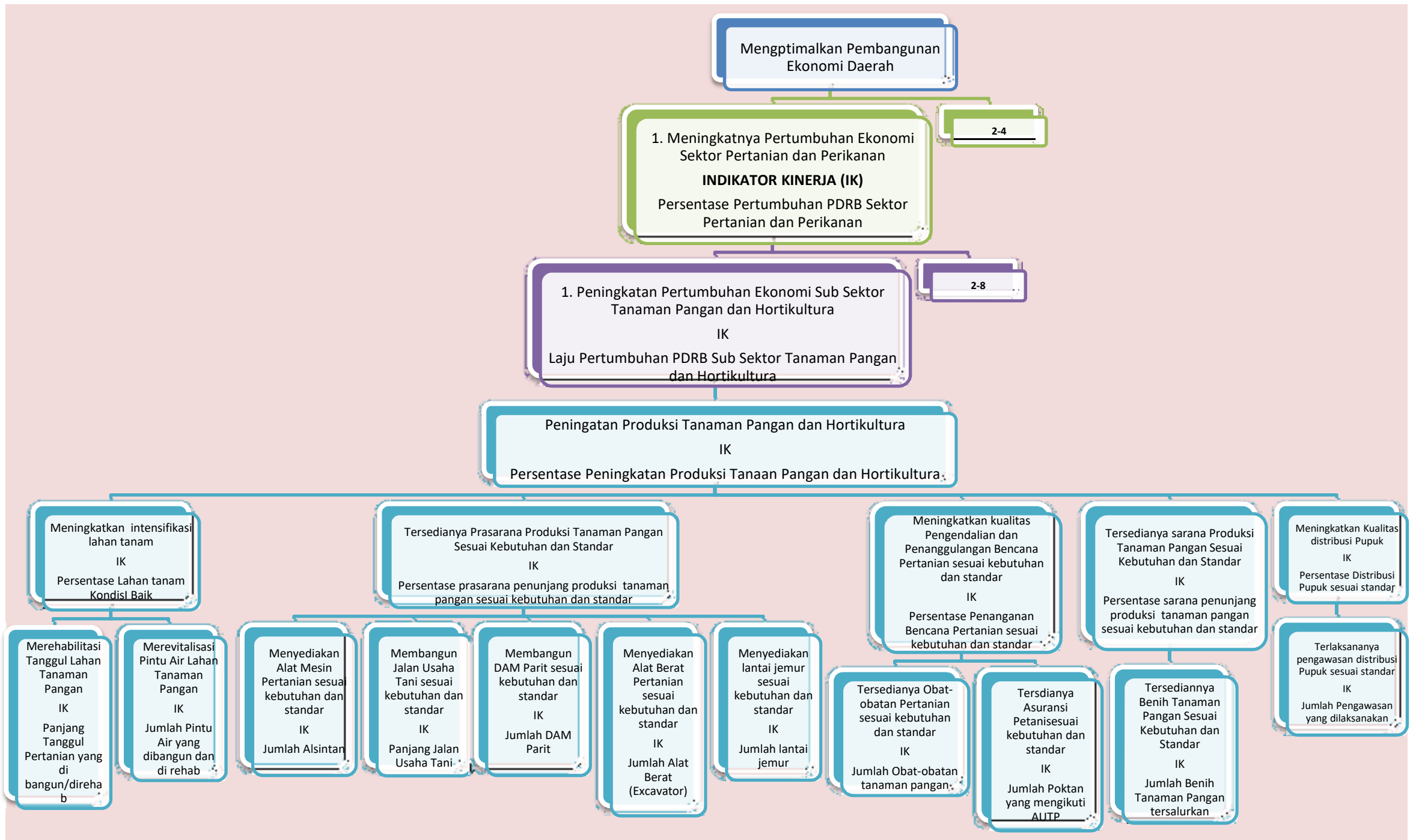
PERMASALAHAN
DAERAH

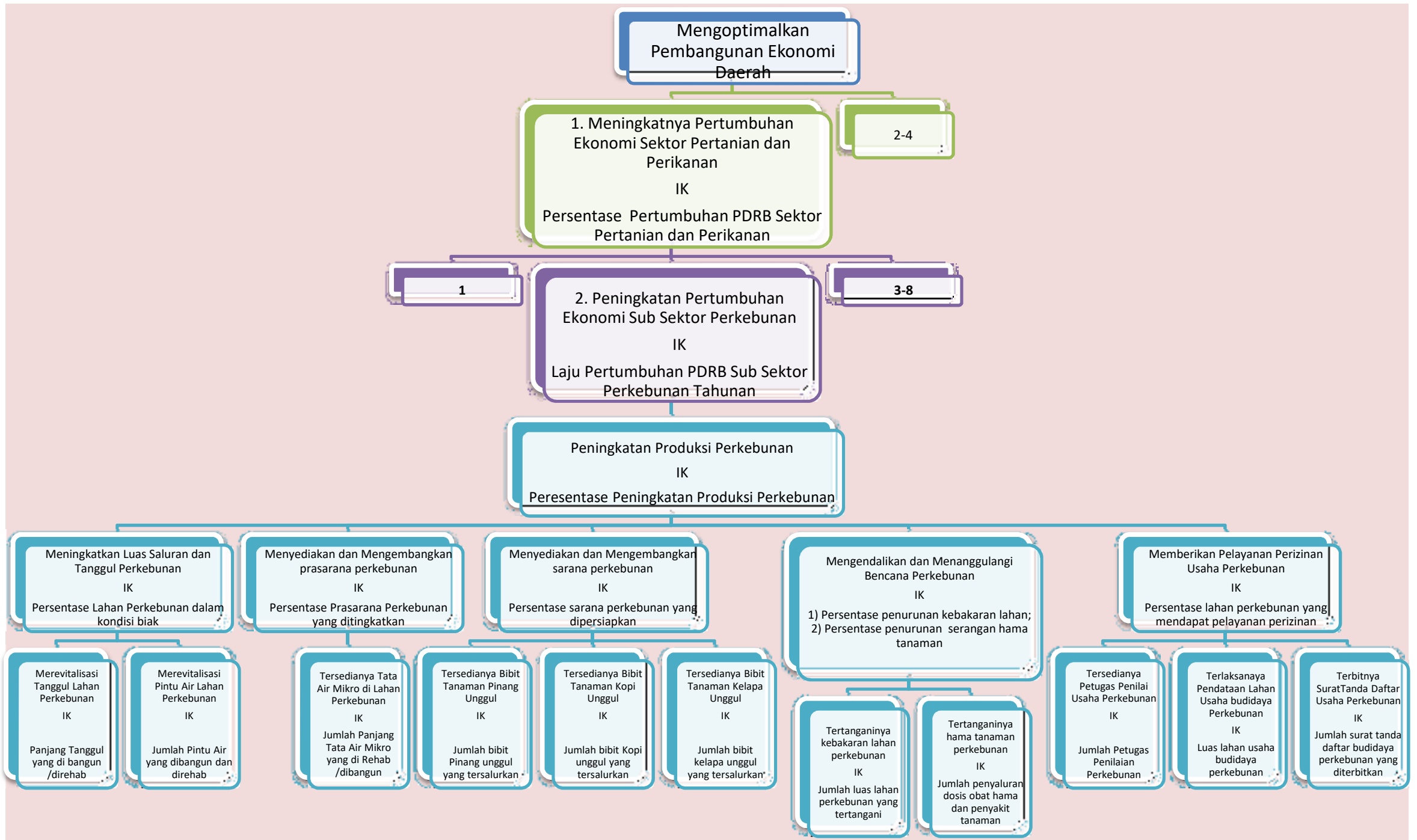
```
graph TD; A[PERMASALAHAN DAERAH] --- B[Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Daerah]; A --- C[Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia]; A --- D[Belum Optimalnya Performa Birokrasi dan Keamanan serta ketertiban Daerah];
```

Belum Optimalnya
Pembangunan
Ekonomi Daerah

Rendahnya Kualitas
Sumber Daya
Manusia

Belum Optimalnya
Performa Birokrasi
dan Keamanan serta
ketertiban Daerah,





Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA (IK)
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

2-4

3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan
IK
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan

1-2

4-8

Peningkatan Populasi Ternak
IK
Pesentase Peningkatan Populasi Ternak

Meningkatkan Produksi Ternak melalui Inseminasi Buatan (IB)
IK
Persentase populasi ternak melalui IB

Menyediakan pakan ternak berkualitas
IK
Persentase petani yang menggunakan pakan ternak dari produk HPT

Menggunakan HPT pada ternak masyarakat
IK
Persentase peternak yang menggunakan pakan dari HPT

Mengendalikan kualitas pengendalian kesehatan pd hewan ternak
IK
Persentase penurunan angka kematian ternak

Tersalurkannya Obat IB ke petani
IK
Jumlah Obat IB yang disalurkan

Terlaksananya Penyuluhan tentang IB
IK
Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan

Tertanamnya Pakan Ternak
IK
Luas penanaman lahan Hijau Pakan Ternak

Tersalurkannya HPT ke Peternak
IK
Jumlah HPT yang disalurkan ke Peternak

Terselenggaranya sosialisasi penggunaan HPT
IK
Jumlah peternak yang mengikuti sosialisasi

Tersusunnya Regulasi penggunaan HPT untuk peternak
IK
Jumlah peraturan

Terselenggaranya pelayanan kesehatan hewan
IK
Jumlah Peternak yang dilayani

Tersediannya obat-obatan untuk ternak
IK
Jumlah sapi yang mendapatkan pengobatan

Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan

2-4

INDIKATOR KINERJA (IK)

Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan

1-3

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan

5-8

IK

Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Peningkatan Produksi Perikanan

IK

Peningkatan Produksi Perikanan

Meningkatkan penggunaan Alat Tangkap sesuai standar
IK
Persentase Nelayan yang menggunakan alat tangkap sesuai standar

Meningkatkan nilai tambah hasil nelayan tangkap
IK
Persentase nelayan yang mengolah hasil ikan tangkap

Meningkatkan pertumbuhan sarana pembudidayaan ikan
IK
Persentase penggunaan sarana pembudidayaan ikan melalui kolam/bioflok sesuai standar

Meningkatkan pelayanan izin bagi pelaku usaha perikanan sesuai standar
IK
Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan izin sesuai standar

Menurunkan pelanggaran eksploitasi usaha perikanan
IK
Persentase tindak pelanggaran

Tersalurkannya Alat Tangkap sesuai standar untuk nelayan
IK
Jumlah Nelayan yang menerima bantuan alat tangkap sesuai standar

Tersalurkannya peralatan pengolahan ikan tangkap
IK
Jumlah nelayan yang mendapat bantuan alat pengolahan ikan

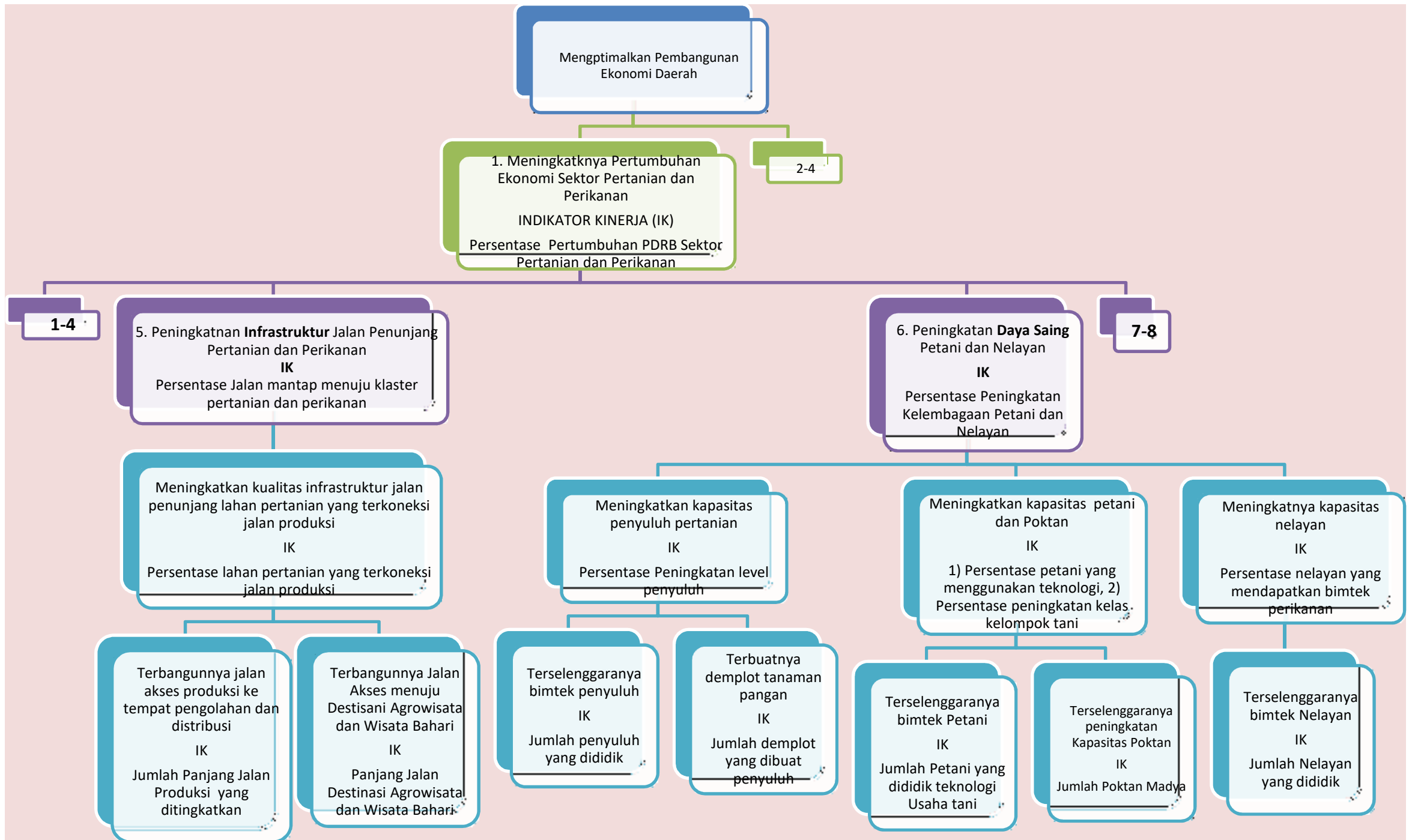
Tersalurkannya bibit ikan budidaya
IK
Jumlah bibit yang disalurkan

Tersalurkannya pakan ikan budidaya
IK
Jumlah pakan yang tersalurkan

Tersalurkannya bantuan bioflok
IK
Jumlah bioflok yang diberikan

Pengeluaran izin usaha perikanan
IK
Jumlah izin usaha perikanan yang diterbitkan

Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan hasil ikan tangkap
IK
Jumlah Nelayan yang mengikuti sosialisasi



Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Daerah

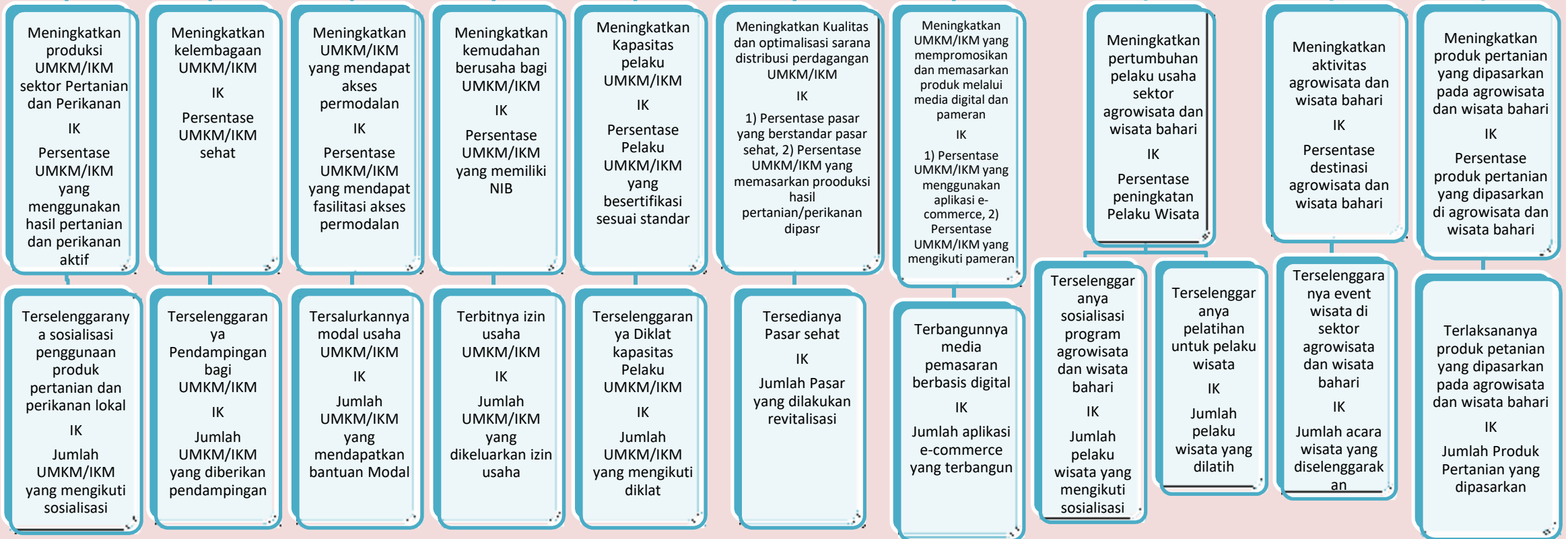
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan
INDIKATOR KINERJA (IK)
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

2-4

1-6

7. Peningkatan Daya Saing UKM/IKM Sektor Pertanian dan Perikanan
IK
Persentase Produk IKM/UKM hasil pertanian yang diperdagangkan di Luar Daerah

8. Peningkatan Agrowisata dan Wisata Bahari
IK
Persentase Jumlah Pengunjung Agrowisata dan Aisata Bahari



Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Daerah

1

2. Meningkatkan Investasi Daerah
INDIKATOR KINERJA (IK)
Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

3-4

Peningkatan Pelayanan Perizinan yang Mendukung Investasi Daerah
IK
Persentase peningkatan pelaku usaha mengajukan perizinan

Peningkatan Aksesibilitas dan Sarana Prasarana
IK
Persentase Aksesibilitas antar desa dan kecamatan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
IK
Persentase peningkatan PAD

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Digital Potensi Investasi Daerah
IK
Persentase data dan informasi potensi investasi daerah

Meningkatkan pelayanan penanaman modal
IK
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan iklim penanaman modal
IK
Persentase ketersediaan informasi sektor/bidang usaha penanaman modal

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal
IK
Persentase pengendalian dan pengawasan sesuai izin usaha

Meningkatkan pengolahan data dan informasi penanaman modal
IK
Persentase Data dan Informasi yang terkini

Meningkatkan aksesibilitas ekonomi antar desa dan antar kecamatan
IK
Persentase terhubungnya desa/kelurahan dengan kecamatan kondisi mantap

Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
IK
Persentase Objek PAD

Peningkatan Kepedulian/Kesadaran Wajib Pajak membayar PAD
IK
Persentase peningkatan disiplin wajib pajak

Meningkatkan digitalisasi pelayanan perizinan
IK
Persentase peningkatan pelayanan berbasis digital

Terlaksananya survei kepuasan masyarakat
IK
Jumlah orang yang disurvei

Tersedianya informasi penanaman modal
IK
Jumlah informasi sektor/bidang yang dapat di-update

Terlaksananya monitoring pelaksanaan izin pelaku usaha
IK
Jumlah pelaksanaan monitoring

Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan penanaman modal
IK
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi

Terlapornya data dan informasi penanaman modal
IK
Jumlah laporan tervalidasi

Terbangunnya Jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan dalam kondisi mantap
IK
Jumlah Panjang Jalan yang dibangun

Terbangunnya jalan penghubung dari lokasi aktivitas ekonomi ke jalan kabupaten/provinsi/nasional
IK
Jumlah Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan

Terdatanya objek pajak dan retribusi daerah
IK
Jumlah Objek Pajak yang ter-update

Terlaksananya penarikan objek pajak dan retribusi daerah
IK
Jumlah Objek Pajak/Retribusi yang ditarik

Tersalurkannya sarana penghitungan Pajak/Retribusi Daerah
IK
Jumlah alat yang disalurkan ke Objek Pajak/Retribusi

Terselenggaranya sosialisasi retribusi dan pajak daerah
IK
Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi

Terlaksananya monitoring penyenggaraan pelayanan Pajak/Retribusi Daerah
IK
Jumlah Objek Pajak yang dimonitor

Tersedianya layanan perizinan berbasis digital
IK
Jumlah aplikasi pelayanan perizinan

Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perizinan
IK
Jumlah pengunjung yang mengakses layanan digital

Tertayangnya potensi investasi daerah di media elektronik
IK
Jumlah tayangan potensi investasi daerah

Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Daerah

1-2

3. Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja

4

INDIKATOR KINERJA (IK)

Persentase Daya Serap Tenaga Kerja

Memfasilitasi Pendirian Pabrik

IK

Persentase Berdiri Pabrik Kelapa Sawit, Pinang, dan Kelapa

Meningkatkan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit

IK

Persentase Izin Pabrik Sawit Berdiri

Terbangunnya Pabrik Kelapa Sawit

IK

Jumlah Pabrik Sawit Beroperasi

Meningkatkan Pembangunan Pabrik Pinang

IK

Persentase Izin Pabrik Pinang Berdiri

Terbangunnya Pabrik Pinang

IK

Jumlah Pabrik Pinang Beroperasi

Meningkatkan Pembangunan Pabrik Kelapa

IK

Persentase Izin Pabrik Kelapa Berdiri

Terbangunnya Pabrik Kelapa

IK

Jumlah Pabrik Kelapa Beroperasi

Peningkatan media informasi lapangan kerja

IK

Persentase Informasi Lapangan Kerja Berbasis Elektronik

Meningkatkan jangkauan TIK

IK

Persentase Jangkauan TIK

Tersedianya Jaringan TIK seluruh kecamatan

IK

Jumlah Provider Selular terpasang

Meningkatkan Pencari Kerja mengakses informasi kerja

IK

Persentase pengunjung/pencari kerja memanfaatkan aplikasi lapangan kerja

Tersedianya sistem aplikasi informasi pencari kerja

IK

Jumlah Pengunjung/pencari kerja

Memfasilitasi permodalan usaha dan peralatan kerja

IK

persentase pelaku usaha dapat mengakses permodalan dan peralatan

Meningkatkan UMKM yang mendapat permodalan

IK

Persentase UMKM yang difasilitasi

Tersalurnya bantuan permodalan untuk UMKM

IK

Jumlah UMKM menerima permodalan

Terselenggaranya sosialisasi permodalan untuk UMKM

IK

Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi

Meningkatkan UMKM yang mendapat bantuan peralatan kerja

IK

Persentase UMKM yang diberi bantuan

Tersalurnya bantuan peralatan kerja untuk UMKM

IK

Jumlah UMKM menerima peralatan

Terselenggaranya sosialisasi penggunaan peralatan kerja

IK

Jumlah UMKM mengikuti sosialisasi

Peningkatan pelayanan administrasi ketenagakerjaan berbasis elektronik

IK

Persentase Pencari Kerja mendapat pelayanan berbasis elektronik

Meningkatkan Angkatan Kerja yang mencari Pekerjaan

IK

Persentase Pencari Kerja mendapatkan kartu pencari kerja elektronik

Tersalurnya kartu pencari kerja elektronik

IK

Jumlah Kartu Kuning berbasis elektronik yang diterbitkan

Meningkatkan Animo Masyarakat untuk mencari pekerjaan

IK

Persentase peningkatan masyarakat mencari pekerjaan

Terselenggaranya sosialisasi pengurusan kartu kuning elektronik untuk pencari kerja

IK

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Daerah

1-3

4. Menjamin Keberlanjutan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
INDIKATOR KINERJA (IK)
Persentase Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
IK
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan pengendalian tata ruang
IK
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Meningkatkan pelayanan rekomendasi perizinan lingkungan
IK
Persentase izin lingkungan yang diterbitkan sesuai ketentuan

Meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan hidup
IK
Persentase pencapaian informasi ke masyarakat

Meningkatkan kepatuhan terhadap RTRW
IK
Persentase ketaatan pemberian izin sesuai RTRW

Meningkatkan pemahaman pengelolaan Tata Ruang
IK
Persentase Pemahaman tentang RTRW

Meningkatkan kualitas pengelolaan tata ruang
IK
Persentase kepatuhan pengelolaan usaha sesuai izin yang diberikan

Terbitnya persetujuan teknis izin lingkungan
IK
Jumlah persetujuan teknis yang diterbitkan

Terbitnya persetujuan teknis pengelolaan bahan dan limbah B3
IK
Jumlah persetujuan teknis yang diberikan

Tersampainya informasi pencegahan kerusakan lingkungan ke masyarakat
IK
Jumlah informasi peringatan dini bencana alam

Terselenggaranya pengawasan lingkungan hidup dimasyarakat dan pemegang izin lingkungan
IK
Jumlah pelaksanaan pengawasan pada wilayah dan pelaku usaha yang diawasi

Terselenggaranya sosialisasi pembinaan pencegahan kerusakan lingkungan hidup
IK
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Terselenggaranya penilaian lingkungan hidup masyarakat
IK
Jumlah perlombaan yang diikuti 5 kali

Terbitnya izin usaha berkesesuaian dengan RTRW
IK
Jumlah izin usaha yang terbit

Terselenggaranya sosialisasi Peraturan terkait Tata Ruang
IK
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Terlaksananya pengawasan pengelolaan usaha sesuai izin yang diberikan
IK
Jumlah pelaksanaan pengawasan

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat
INDIKATOR KINERJA (IK)
Indeks Kesehatan

2

3

Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
IK
Persentase Prasarana dan Sarana Kesehatan pada Faskes

Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman
IK
Persentase Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak

Peningkatan Kualitas Sanitasi Masyarakat
IK
Persentase Sanitasi Layak

Meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan
IK
Persentase peningkatan Kapasitan SDM Kesehatan

Meningkatkan Ketersediaan kebutuhan Farmasi, Alat Kesehatan di Puskesmas
IK
Persentase ketersediaan obat-obatan, vaksin di Puskesmas

Meningkatkan kesadaran masyarakat hidup sehat
IK
Persentase Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera

Meningkatkan sarana dan kualitas Pelayanan Kesehatan
IK
Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan Kelayakan Gedung Puskesmas
IK
Persentase Puskesmas yang layak

Menurunkan luas Permukiman Kumuh Berat
IK
Persentase penurunan luas permukiman kumuh berat

Meningkatkan pelayanan Air Bersih
IK
Persentase pelayan air bersih

Meningkatkan Pelayanan Sampah
IK
Persentase sampah yang terangkut

Meningkatkan penggunaan sistem sanitasi layak masyarakat
IK
Persentase Rumah Tangga bersanitasi

Terselenggarakan Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
IK
Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan

Terselenggarakan sosialisasi regulasi terkait kapasitass SDM Kesehatan
IK
Jumlah Tenaga Kesehatan Yang mengikuti Sosialisasi

Tersalurkannnya Obat-Obatan ke Puskesmas
IK
Jumlah obat-obatan yang tersalurkankan

Tersalurkannnya vaksin ke Puskesmas
IK
Jumlah vaksin yang disalurkankan

Terselenggaranya Sosialisasi Hidup Sehat
IK
Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi

Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
IK
Jumlah survey yang dilakukakan

Tersedianya sarana kendaraan pelayanan pasien
IK
Jumlah kendaraan ambulance yang di beli

Terbangunnya puskesmas
IK
Jumlah Puskesmas yang dibangun

Terlaksanakn rehab puskesmas
IK
Jumlah Puskesmas yang direhab

Terbangunnya jalan lingkungan yang layak
IK
Jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang direhab

Terlaksananya perbaikan rumah tidak layak huni
IK
Jumlah rumah yang direhab

Terlayannya pengangkutan sampah pada permukiman kumuh
IK
Jumlah sampah yang terangkut

Terpasangnya Sambungan Rumah Air Bersih Sistem Perpipaan
IK
Jumlah Sambungan Rumah terpasang

Tersaluranya Air Bersih Sistem Non Perpipaan
IK
Jumlah PAMSIMAS yang aktif

Terangkutnya Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir
IK
Jumlah sampah terangkut

Terselenggaranya Sosialisasi Kebersihan Lingkungan
IK
Jumlah Warga yang mengikuti sosialisasi

Terpasangnya papan himbauan kebersihan lingkungan
IK
Jumlah Papan himbauan yang dipasang

Terbangunnya sistem sanitasi layak masyarakat
IK
Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan sanitasi layak

Terselenggaranya sosialisasi penggunaan sanitasi layak
IK
Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

1

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat
INDIKATOR KINERJA (IK)
Indeks Kesehatan

3

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar
IK
1) Persentase Angka Harapan Lama Sekolah dan 2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Peningkatan Peran Serta Pesantren dan Madrasah Diniyah Persentase
IK
peningkatan pembelajaran melalui pesantren

Meningkatkan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Pendidik

IK

Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidik yang mengikuti pendidikan gelar dan non gelar

Terbitnya izin belajar bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik program S1/DIV

IK

Jumlah Izin Belajar yang diberikan

Terselenggaranya diklat pengembangan pendidik

IK

Jumlah Pendidik yang ikut diklat pengembangan

Meningkatkan prasarana dan sarana sekolah

IK

Persentase peningkatan prasarana dan sarana sekolah

Tersedianya jalan layak menuju sekolah

IK

Jumlah Panjang jalan yang di rehab

Terpenuhi bangunan sekolah layak

IK

Jumlah Sekolah yang direhab

Meningkatkan kualitas siswa didik

IK

Persentase tingkat kelulusan siswa didik

Tercapainya target kelulusan siswa didik tingkat SD

IK

Jumlah siswa yang lulus SD

Tercapainya target kelulusan siswa didik tingkat SLTP

IK

Jumlah siswa yang lulus SLTP

Meningkatkan kualitas siswa didik luar sekolah

IK

Persentase tingkat kelulusan siswa didik luar sekolah

Tercapainya target kelulusan siswa didik luar sekolah Paket A

IK

Jumlah siswa yang lulus Paket A

Tercapainya target kelulusan siswa didik luar sekolah Paket B

IK

Jumlah siswa yang lulus Paket B

Meningkatkan Para Penghafal Al Qurán

IK

Persentase Santi Havidz Al Qurán

Terselenggaranya program santi penghafal Al Qurán

IK

Jumlah Santi yang mengikuti program penghafal Al Qurán

Meningkatkan sarana pembelajaran pesantren

IK

Persentase pesantren yang mendapatkan

Terpenuhinya sarana belajar pesantren

IK

Jumlah pesantren yang mendapat bantuan sarana belajar

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

1

2

3. Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

INDIKATOR KINERJA (K)

Persentase Rasio Kesempatan Kerja

Peningkatan Keahlian dan Keterampilan Angkatan Kerja

IK

Persentase Tenaga Kerja yang berkompentensi

Meningkatkan kualitas tenaga kerja

IK

Persentase angkatan kerja yang dilatih

Terselenggaranya diklat tenaga kerja

IK

Jumlah Angkatan Kerja yang dilatih 1.000 orang

Meningkatkan sarana prasana balai latihan kerja

IK

Persentase sarana prasarana sesuai kebutuhan kerja

Terpenuhinya sarana prasarana BLK

IK

Jumlah Sarana Prasarana yang diadakan

Tersedianya tenaga pengajar berkompentensi

IK

Jumlah Tenaga Pengajar yang disiapkan

Meningkatkan Angkatan Kerja Yang Magang di Perusahaan

IK

Persentase Angkatan Kerja yang dilatih mengikuti studi kerja/magang

Terselenggaranya pelaksanaan studi kerja/magang

IK

Jumlah Peserta Diklat yang magang di Perusahaan

Peningkatan Angkatan Kerja yang mengikuti Studi Kerja/ Magang

IK

Persentase Tenaga Kerja Magang

Meningkatkan Kerjasama Pemda dengan Perusahaan untuk pelaksanaan studi kerja/magang

IK

Persentase Perusahaan yang melaksanakan kerjasama dengan Pemda

Terlaksanakan kerjasama studi kerja/magang

IK

Jumlah kerjasama yang disepakati Pemda dengan Perusahaan

Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan keamanan serta Ketertiban Daerah

1. Mewujudkan Birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegrasi
INDIKATOR KINERJA (IK)
Indeks Reformasi Birokrasi Baik

2

1. Peningkatan kualitas Kelembagaan dan Organisasi
IK
Indeks Kelembagaan BAIK

2. Peningkatan SDM Aparatur dan Penataan Peraturan Perundang - Undangan
IK
Indeks Reformasi Birokrasi

3-4

Meningkatkan efektifitas kinerja perangkat daerah
IK
Persentase Kebutuhan Kelembagaan terhadap target kerja daerah

Meningkatkan kualitas kinerja ASN
IK
Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah
IK
Indeks Reformasi Hukum

Tertatanya organisasi perangkat daerah yang produktif
IK
Jumlah Perangkat Daerah yang ditata

Tersedianya Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah
IK
Jumlah SOP yang dibuat Perangkat Daerah

Terlaksananya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional
IK
Jumlah jabatan yang disetarakan

Terlaksananya pengisian formasi ASN dari P3K
IK
Jumlah P3K yang direkrut

Terlaksananya pengisian jabatan dengan Lelang Jabatan
IK
Jumlah jabatan yang dilelang

Terlaksananya diklat dan bimtek kapasitas ASN
IK
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek

Terlaksananya Penerbitan Peraturan Daerah
IK
Jumlah Perda yang diterbitkan

Tersosialisasinya Peraturan Daerah yang ditetapkan
IK
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi

Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan keamanan serta Ketertiban Daerah

1. Mewujudkan Birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegrasi
INDIKATOR KINERJA (IK)
Indeks Reformasi Birokrasi Baik

2

Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
IK
Indeks Reformasi Birokrasi BAIK

Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
IK
Indeks Pelayanan Publik

Meningkatkan kematangan penendalian intern
IK
Persentase Peningkatan Maturitas SPIP

Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan
IK
Indeks Perencanaan

Meningkatkan Jumlah OPD yang mendapat nilai B
IK
Persentase peningkatan nilai SAKIP

Meningkatkan kualitas pengelolaan penganggaran
IK
Opini BPK dengan predikat WTP

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
IK
Persentase OPD dengan Kepuasan Baik

Meningkatkan etos kerja aparatur
IK
Persentase ASN yang taat menyampaikan Laporan Kinerja

Terpenuhinya auditor daerah
IK
Jumlah penambahan auditor

Terselaraskannya dokumen perencanaan daerah
IK
Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselaraskan

Terlaksananya penilaian SAKIP OPD
IK
Jumlah OPD yang mendapat nilai SAKIP B

Terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah
IK
Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan

Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan keuangan daerah
IK
Jumlah OPD/orang yang mengikuti sosialisasi

Tersedianya ruang pelayanan publik yang representatif
IK
Jumlah OPD yang memiliki ruang pelayanan publik kondisi baik

Terlaksananya bimtek speaking bagi petugas pelayanan
IK
Jumlah orang yang melaksanakan bimtek

Tersedianya uniform bagi petugas pelayanan
IK
Jumlah orang yang dilengkapi uniform

Tersampainya laporan LHKPN
IK
Jumlah Wajib Laporan yang disampaikan tepat waktu

Tersampainya laporan Kinerja Harian ASN
IK
Jumlah ASN yang melapor tepat waktu

Tersampainya SKP ASN
IK
Jumlah ASN yang menyampaikan SKP tepat waktu

Tersampainya laporan LHASN
IK
Jumlah Wajib Laporan yang disampaikan tepat waktu

Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan keamanan serta Ketertiban Daerah

1

2. Menciptakan Kondisi Daerah Yang Aman, Nyaman dan Harmonis
IK
Indeks Rasa Aman 80%

Peningkatan kohesi sosial masyarakat
IK
Indeks Toleransi

Menurunkan konflik sosial
IK
Persentase konflik yang difasilitasi

Meningkatkan kerukunan masyarakat
IK
Persentase pelaksanaan pembinaan

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
IK
Persentase Penegakkan Perda

Terselenggaranya mediasi penyelesaiannya konflik
IK
Jumlah pelaksanaan mediasi

Terlaksananya sosialisasi kerukunan bermasyarakat
IK
Jumlah papan himbauan yang dipasang

Terselenggaranya pembinaan kerukunan bermasyarakat
IK
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan bermasyarakat

Terselenggaranya Sosialisasi Perda
IK
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi

Terselenggaranya patroli kondisi daerah
IK
Jumlah patroli daerah

Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku pekat
IK
Jumlah pelaku pekat yang dibina

Terciptanya ketentraman masyarakat
IK
Jumlah operasi pekat



LAMPIRAN VI



CASCADING KABUPATEN



CASCADING

RPJMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR

TAHUN 2021 - 2026

VISI
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)

Misi 1.
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan

TUJUAN 1
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan
IK
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan kondisi awal 2,68% dan target capaian akhir 6%

Misi 2.
Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing

TUJUAN 2
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Jasmani dan Rohani
IK
Indeks Kesehatan dengan kondisi awal 0,687 dan target capaian akhir 0,695

TUJUAN 3
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas
IK
Indeks Pendidikan dengan kondisi awal 9,43 dan target capaian akhir 9,97

TUJUAN 4
Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
IK
Rasio Kesempatan Kerja dengan kondisi awal 71,53% dan target capaian akhir 71,61%

TUJUAN 5
Meningkatkan Nilai Investasi Daerah
IK
Nilai Investasi PMDN/PMA dari Rp. 3,27 T menjadi 4,7 5 T

Misi 3.
Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari

TUJUAN 6
Meningkatkan Daya Serap Tenaga Kerja
IK
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan kondisi awal 74,18 dan target capaian akhir 79,69

TUJUAN 7
Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
IK
Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH sebesar 100%

TUJUAN 8
Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas
IK
Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat BAIK

Misi 4.
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis

TUJUAN 9
Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis
IK
Indeks Rasa Aman tercapai 80%

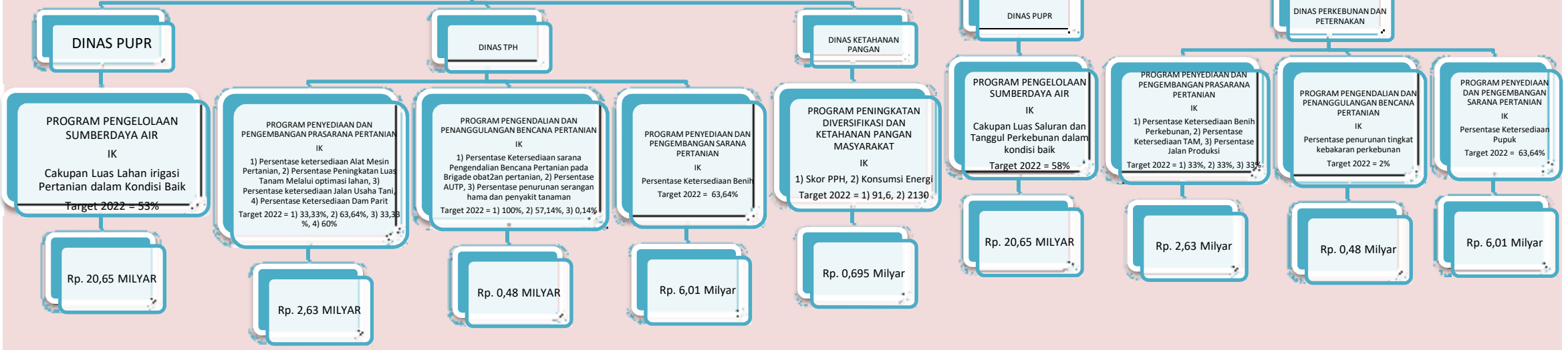
Misi I.
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan

TUJUAN 1
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan
IK
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan kondisi awal 2,68% dan target capaian akhir 6%

SASARAN 1
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
IK
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan, Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Semusim, Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya
Target 2022 : 3,84. 1,72. 0,79

SASARAN 2
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan
IK
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahunan
TARGET 2022 : 4,01

SASARAN 3-8



Misi I.
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan

TUJUAN 1
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan
IK
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan kondisi awal 2,68% dan target capaian akhir 6%

SASARAN 1-2

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan
IK
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan
Target 2022 = 1,53

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan
IK
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
Target 2022 = 2,96

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
IK
Persentase Panjang Jalan Menuju Kluster Lahan pertanian dalam kondisi mantap
Target 2022 = 20%

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

DINAS PERIKANAN

DINAS PUPR

DINAS PERKIM

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
IK
1) Persentase Inseminasi Buatan, 2) Persentase produksi HPT
Target 2022 = 1) 46,78%, 2) 50%

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
IK
1) Persentase penurunan angka kematian ternak, 2) Persentase Sampel Pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan
Target 2022 = 1) 0,13%, 2) 48,78%

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
IK
Persentase Produksi Perikanan Tangkap
Target 2022 = 86,06%

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
IK
Persentase Produksi Perikanan BUDIDAYA
Target 2022 = 64,96%

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
IK
Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Target 2022 = 36,36%

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
IK
Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap
Target 2022 = 75,27%

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
IK
Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik
Target 2022 = 67,92%

Rp. 6,01 Milyar

Rp. 0,413 Milyar

Rp. 0,184 Milyar

Rp. 0,184 Milyar

Rp. 0,184 Milyar

Rp. 99,86 Milyar

Rp. 99,86 Milyar

Misi I.
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan

TUJUAN 1
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan IK
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan kondisi awal 2,68% dan target capaian akhir 6%

SASARAN 1-5

PENINGKATAN DAYA SAING PERTANIAN DAN PERIKANAN IK NTP
Target 2022 = 109,62

PENINGKATAN DAYA SAING UKM/IKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN IK
Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil pertanian yang berstandar
Target 2022 = 28,71%

SASARAN 8

DINAS TPH

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN IK
Cakupan Bina Kelompok tani Pertanian
Target 2022 = 55,14%

Rp. 1,96 Milyar

DINAS BUNNAK

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN IK
Cakupan Bina Kelompok tani Perkebunan dan Peternakan
Target 2022 = 0,29%

Rp. 1,96 Milyar

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER IK
Persentase Sampel Pangan asal hewan/hasil pangan asal hewan
Target 2022 = 48,78%

Rp. 0,413 Milyar

DINAS PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP IK
Persentase Produksi Perikanan Tangkap
Target 2022 = 86,06%

Rp. 0,184 Milyar

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA IK
Persentase Produksi Perikanan BUDIDAYA
Target 2022 = 64,96%

Rp. 0,184 Milyar

DINAS PERIKANAN

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN IK
Persentase produksi olahan hasil perikanan
Target 2022 = 60%

Rp. 0,184 Milyar

DINAS KOP UKM

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UKMKM) IK
Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi
Target 2022 = 20,24%

Rp. 0,174 Milyar

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI IK
Persentase Koperasi mandiri
Target 2022 = -2,08%

Rp. 31, 67 Juta

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian IK
Persentase Koperasi yang mendapatkan diklat perkoperasian
Target 2022 = 2,08%

Rp. 107,96 Juta

Misi I.
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan

TUJUAN 1
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN IK
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan kondisi awal 2,68% dan target capaian akhir 6%

SASARAN 1-6

PENINGKATAN DAYA SAING UKM/IKM SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN IK
Proporsi Produk IKM berbahan baku hasil petanian yang berstandar
Target 2022 = 28,71%

SASARAN 8

DPMPTSP

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL IK
Indeks Kepuasan Masyarakat thd pelayanan penanaman modal
Target 2022 = 88,75%

Rp. 191,98 Juta

DINAS PERINDAG

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI IK
Persentase peningkatan IKM Formal
Target 2022 = 27,13%

Rp. 118,65 Juta

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI IK
Persentase peningkatan Sentra IKM
Target 2022 = 55,56%

Rp. 0,815 Milyar

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN IK
Persentase peningkatan pasar sehat
Target 2022 = 10%

Rp. 1 Milyar

DINAS KOMINFO

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA IK
Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah
Target 2022 = 81,82%

Rp. 1,42 Milyar

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT IK
Konsumsi Energi
Target 2022 = 2130

Rp. 0,695 Milyar

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN IK
Persentase penanganan daerah rawan pangan,
Target 2022 = 94,62%

Rp. 56,5 Juta

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN IK
Persentase Penyediaan Infrastruktur pangan
Target 2022 = 71,43%

Rp. 159,77 Juta

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN IK
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Target 2022 = 100%

Rp. 31,06 Juta

Misi I.
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan

TUJUAN 1
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
IK
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan kondisi awal 2,68% dan target capaian akhir 6%

SASARAN 1-7

PENINGKATAN AGROWISATA DAN WISATA BAHARI
IK
Persentase peningkatan destinasi agrowisata dan wisata bahari
Target 2022 = 14,3%

DINAS PUPR

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN IK
Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap
Target 2022 = 75,27%

Rp. 99,86 Milyar

DINAS PERKIM

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN IK
Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik
Target 2022 = 67,92%

Rp. 99,86 Milyar

DINAS PARBUDPORA

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA IK
Persentase Destinasi Pariwisata aktif
Target 2022 = 26,67%

Rp. 0,482 Milyar

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF IK
Persentase Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata dan ekraf
Target 2022 = 40%

Rp. 93,7 Juta

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA IK
Persentase Kunjungan Wisatawan
Target 2022 = 88,33%

Rp. 0,496 Milyar

DINAS PERINDAG

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI IK
Persentase peningkatan Sentra IKM
Target 2022 = 55,56%

Rp. 93,7 Juta

DINAS KOMINFO

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA IK
Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah
Target 2022 = 81,82%

Rp. 1,42 Milyar

MISI 2
MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA
YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

MEWUJDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT
INDIKATOR KINERJA (IK)
Indeks Kesehatan dengan kondisi awal 0,687 dan target capaian akhir 0,695

TUJUAN 2 -3

MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA
FASILITAS KESEHATAN (PUSKESMAS DAN PUSTU)
IK
Usia Harapan Hidup
Target 2022 =6675 Th

SASARAN 2-3

DINAS PUPR

PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN
IK
Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap
Target 2022 = 75,27%

Rp. 99,86
Milyar

DINAS PERKIM

PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN
IK
Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik
Target 2022 = 67,92%

Rp. 99,86
Milyar

DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
IK
1) Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
2) Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar
Target 2022 = 1) 70 %, 2) 10 PKM

Rp. 0,706
Milyar

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
IK
Persentase Rumah Tangga PHBS
Target 2022 = 50,55 %

Rp. 0,491
Milyar

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
IK
Persentase Ketersediaan Obat, Vaksin di Puskesmas
Target 2022 = 100%

Rp. 0,496
Milyar

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
IK
1) Jumlah Kematian Ibu, 2) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (KH), 3) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH), 4) Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (KH), 5) Persentase Pelayanan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Target 2022 = 1) 6 jiwa, 2) 18,5 3) 19,5 4) 17,5 5) 80%

Rp. 30,11
Milyar

RSUD NH

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
IK
Persentase SDMk yang memiliki kompetensi sesuai standar RS kelas C
Target 2022 = 67,57%

Rp. 0,706
Milyar

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
IK
Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan RSUD
Target 2022 = 88%

Rp. 30,11
Milyar

DINAS PPKB

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
IK
Persentase PPKS di Kecamatan
Target 2022 = 75%

Rp. 0,622
Milyar

MISI 2
MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA
YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

MEWUJDKAN SUMBER DAYA MANUSIA
YANG SEHAT
INDIKATOR KINERJA (IK)
Indeks Kesehatan dengan kondisi awal
0,687 dan target capaian akhir 0,695

TUJUAN 2-3

SASARAN 1

Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman
IK
1) Pengurangan Luas Permukiman Kumuh, 2) Persentase
Pelayanan Air Bersih, 3) Persentase Volume Sampah
terangkut perhari
Target 2022 = 1) 102,5%, 2) 56,06%, 3) 90,70%

DINAS PUPR

DINAS PERKIM

DINAS LH

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN
IK
Persentase
terhubungnya
desa/kelurahan ke ibu
kota Kecamatan dengan
kondisi mantap
Target 2022 = 75,27%

Rp. 99,86 Milyar

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN
IK
Persentase Jalan
Lingkungan dalam
Kondisi baik
Target 2022 = 67,92%

Rp. 99,86 Milyar

PROGRAM PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
IK
Pengurangan Luas
permukiman kumuh
Target 2022 = 115,88 Ha

Rp. 0,975 Milyar

PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE
IK
Persentase Draenasi
dalam kondisi baik
Target 2022 = 60%

Rp. 0,41 Milyar

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM (PSU)
IK
1) Persentase LPJU
terpasang, 2) Persentase
Taman Kota terbangun
Target 2020 = 1) 51,64%, 2)
77,92%

Rp. 5,03 Milyar

PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
IK
Cakupan Rumah Tangga
dengan Akses Air Bersih
melalui Jaringan
Perpipaan
Target 2022 = 32,72%

Rp. 5,72 Milyar

PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH
IK
Persentase Rumah
Tangga dengan sanitasi
layak
Target 2022 = 73,29%

Rp. 1,27 Milyar

PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
IK
Volume Sampah
Terangkut Perhari
(Ton/Hari)
Target 2022 = 39

Rp. 0,533 Milyar

MISI 2 MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

TUJUAN 1

MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA
YANG CERDAS
INDIKATOR KINERJA (IK)
Indeks Pendidikan
dengan kondisi awal 9,43% dan target
capaian akhir 9,97%

Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan
Dasar
IK
1) Angka Harapan Lama Sekolah dan 2)
Angka Rata-rata lama sekolah
Target 2022 = 1) 12,5, 2) 6,72

MENCIPTAKAN TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING
IK
Rasio Kesempatan Kerja
dengan kondisi awal 71,53% dan target capaian akhir 71,61%

PENINGKATAN ANGKATAN KERJA YANG
BEKERJA
IK
Persentase peningkatan Tenaga Kerja yang
mendapatkan Pekerjaan
Target 2022 = 8,34%

DINAS PUPR

PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN
IK
Persentase terhubungnya
desa/kelurahan ke ibu kota
Kecamatan dengan kondisi
mantap
Target 2022 = 75,27%

Rp. 99,86 Milyar

DINAS PERKIM

PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN
IK
Persentase Jalan
Lingkungan dalam
Kondisi baik
Target 2022 =
67,92%

Rp. 99,86 Milyar

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENDIDIK
DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
IK
1) Rasio Guru yang
memiliki kualifikasi
S1/DIV, 2)
Persentase Guru
yang bersertifikat
pendidik
Target 2022 = 1)
79,10%, 2) 85,23%

Rp. 0,891 Milyar

PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN
IK
1) Angka Harapan Lama
Sekolah, 2) Angka Rata-
rata Lama Sekolah
Target 2022 = 1) 12,5
Th, 2) 6,73 Th

Rp. 47 Milyar

SETDA

PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
IK
Persentase Kebijakan
Strategis dibidang
Pemerintahan dan
Kesra yang
ditindaklanjuti
Target 2022 = 100%

Rp. 4,32 Milyar

DINAS NAKERTRANS

PROGRAM PELATIHAN
KERJA DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
IK
Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan
Target 2022 = 75,66%

Rp. 0,218 Milyar

PROGRAM
PENEMPATAN
TENAGA KERJA
IK
Besaran Pencari
Kerja terdaftar
yang ditempatkan
Target 2022 =
45%

Rp. 49,5 Juta

PROGRAM
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
IK
Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
Target 2022 = 80%

Rp. 99,35 Juta

**Misi 3.
Meningkatkan Investasi Daerah
yang Kompetitif dan Lestari**

1. MENINGKATKAN NILAI INVESTASI DAERAH
INDIKATOR KINERJA (IK)
Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA dari
Rp. 3,27 T menjadi 4,7 5 T

TUJUAN 2-3

**PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
MENDUKUNG INVESTASI DAERAH**
IK
Indeks Kepuasan Masyarakat
Target 2022 = A

**Pengembangan Aksesibilitas dan Sarana
Prasarana**
IK
**Persentase aksesibilitas antar desa dan
kecamatan**
Target 2022 = 79,5%

Peningkatan PAD
IK
Persentase Peningkatan PAD
Target 2022 = 5,74%

DPMPTSP

DINAS PUPR

**DINAS
PERINDAG**

**BAKEUD
A**

**DINAS
TPH**

**DINAS
BUNNAK**

DINAS LH

**DINAS
NAKERTRAN
S**

**DINAS
PERIKNAN**

**PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN
MODAL**
IK
Indeks
Kepuasan
Masyarakat thd
pelayanan
penanaman
modal
Targe 2022 =
88,75

**Rp. 0,192
Milyar**

**PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM
PENANAMAN
MODAL**
IK
Persentase
Informasi
sektor/Bidang
Usaha
penanaman
Modal yang
tersedia
Target 2022 =
33,33 Milyar

**Rp. 0,19
Milyar**

**PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN
MODAL**
IK
Nilai Investasi
PMA/PMDN (Rp.
Milyar)
Target 2022 = 163,5

**Rp. 0,45
Milyar**

**PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN
MODAL**
IK
Persentase Data
dan Informasi
yang Valid
Target 2022 =
100%

**Rp. 0,11
Milyar**

**PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN**
IK
Persentase
terhubungnya
desa/kelurahan ke
ibu kota Kecamatan
dengan kondisi
mantap
Target 2022 =
75,27%

**Rp. 99,86
Milyar**

**PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN**
IK
Persentase
peningkatan
pasar sehat
Target 2022 =
10%

**Rp. 1.
Milyar**

**PROGRAM
STANDARDISASI
DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN**
IK
Persentase
Pelayanan Tera
dan Tera Ulang
Target 2022 =
100%

**Rp. 0,25
Milyar**

**PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
DAERAH**
IK
Persentase
peningkatan
PAD
Target 2022 =
95%

**Rp. 0,84
Milyar**

**PROGRAM
PENYEDIAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SARANA
PERTANIAN**
IK
Persentase
Ketersediaan
Benih
Target 2022 =
63,64%

**Rp. 6,1
Milyar**

**PROGRAM
PENYEDIAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SARANA
PERTANIAN**
IK
Persentase
produksi HPT
Target 2022 =
50,00%

**Rp. 6,1
Milyar**

**PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP**
IK
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup
Target 2022 =
66,53

**Rp. 0,18
Milyar**

**PROGRAM
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN**
IK
Volume Sampah
Terangkut
Perhari
(Ton/Hari)
Target 2022 =
39

**Rp. 0,53
Milyar**

**PROGRAM
PENGEMBANGAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI**
IK
Persentase
EksTransmigran
yang
dibina/dilatih
Target 2022 =
74%

**Rp. 0,33
Milyar**

**PROGRAM
PENGELOLAAN
PERIKANAN
BUDIDAYA**
IK
Persentase
Produksi
Perikanan
BUDIDAYA
Target 2022 =
64,96%

**Rp.
0,184
Milyar**

Misi 3.
MENINGKATKAN INVESTASI DAERAH YANG KOMPETITIF DAN LESTARI

TUJUAN 1

MENINGKATKAN DAYA SERAP TENGA KERJA
INDIKATOR KINERJA (IK)
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
dengan kondisi awal 74,18% dan target capaian akhir 79,69%

MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
INDIKATOR KINERJA (IK)
Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH sebesar 100%

PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA BARU
IK
Persentase Pendirian Pabrik Kelapa Sawit, Pinang dan Kelapa Dalam
Target 2022 = 50%

PENYEDIAAN AKSES PERMODALAN
IK
Persentase pelaku usaha yang mendapatkan permodalan usaha kerja dan Peralatan Kerja
Target 2022 = 20%

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
IK
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Target 2022 = 66,53

PENGENDALIAN TATA RUANG
IK
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
Target 2022 = 100%

DINAS PUPR

DINAS PERKIM

SATPOL PP DAMKAR

DPMPTSP

DINAS KOP UKM

DINAS PERIKANAN

DINAS PERINDAG

DINAS LH

DINAS PUPR

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
IK
Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap
Target 2022 = 75,27%

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
IK
Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi baik
Target 2022 = 67,92%

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
IK
1) Persentase LPJU terpasang, 2) Persentase Taman Kota terbangun
Target 2020 = 1) 51,64%, 2) 77,92%

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
IK
Persentase Penegakan Perda
Target 2022 = 100%

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
IK
Persentase Informasi sektor/Bidang Usaha penanaman Modal yang tersedia
Target 2022 = 33,33 Milyar

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
IK
Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi
Target 2022 = 20,24%

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
IK
1) Persentase produksi olahan hasil perikanan, 2) Tingkat konsumsi Ikan masyarakat (kg/kapita)
Target 2022 = 1) 60, 2) 38,5

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
IK
Persentase peningkatan Sentra IKM
Target 2022 = 55,56%

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
IK
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Target 2022 = 66,53

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
IK
Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap persetujuan lingkungan
Target 2022 = 100%

PROGRAM PEGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
IK
Persentase persetujuan teknis (Pertek) pengelolaan Limbah B3 yang dilayani
Target 2022 = 100%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
IK
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW
Target 2022 = 100

Rp. 99,86 Milyar

Rp. 99,86 Milyar

Rp. 5,03 Milyar

Rp. 0,27 Milyar

Rp. 0,19 Milyar

Rp. 0,17 Milyar

Rp. 0,18 Milyar

Rp. 0,82 Milyar

Rp. 0,18 Milyar

Rp. 92,83 Juta

Rp. 10,3 Juta

Rp. 1,8 Milyar

MISI 4.
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS

MEMBANGUN BIROKRASI YANG TANGGUH, TERAMPIL DAN BERINTEGRITAS
INDIKATOR KINERJA (K)
Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat BAIK

TUJUAN 2

PENINGKATAN PENGAWASAN, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
IK
1) Maturitas SPIP, 2) Indeks Perencanaan, 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 4) Nilai SAKIP, 5) Opini BPK
Target 2022 = 1) Level 2, 2) Baik, 3) Baik, 4) CC, 5) WTP

SASARAN 4

PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI
IK
Indeks Kelembagaan
Target 2022 = Peringkat 3

PENINGKATAN SDM APARATUR DAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
IK
1) Indeks Profesionalitas ASN, 2) Indeks Reformasi Hukum
Target 2022 = 1) 55, 2) Baik

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

BKPSDMD

BAPPEDA

BAKEUDA

SEKRETARIAT DAERAH

INSPEKTORAT

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
IK
Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti
Target 2022 = 100%

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
IK
Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti
Target 2022 = 100%

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
IK
1) Peningkatan SDM Aparatur Melalui Profesionalitas ASN, 2) Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian

PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
IK
1) Persentase keselarasan pembangunan, 2) Persentase Capaian Target Tahunan dalam RKPD
Target 2022 = 1) 100%, 2) 88%

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IK
Persentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran
Target 2022 = 88%

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
IK
Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan
Target 2022 = 92%

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
IK
Opini BPK
Target 2022 = WTP

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
IK
Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti
Target 2022 = 100%

PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN
IK
Persentase kepatuhan pengembalian temuan BPK
Target 2022 = 45%

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
IK
Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)
Target 2022 = Level 2

Rp. 4,3 Milyar

Rp. 4,3 Milyar

Rp. 3,26 Milyar

Rp. 1,1 Milyar

Rp. 1,8 Milyar

Rp. 0,33 Milyar

Rp. 143,53 Milyar

Rp. 4,3 Milyar

Rp. 3,6 Milyar

Rp. 0,2 Milyar

MISI 4.
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI GUNA PENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM TATANAN KEHIDUPAN YANG NYAMAN DAN HARMONIS

MEMBANGUN BIROKRASI YANG TANGGUH, TERAMPIL DAN BERINTEGRITAS
INDIKATOR KINERJA (K)
 Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat BAIK

MENCIPTAKAN KONDISI DAERAH YANG AMAN, NYAMAN DAN HARMONIS
INDIKATOR KINERJA (K)
 Indeks Rasa Aman tercapai 0,5

SASARAN 1 **SASARAN 2** **SASARAN 3**

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN BUDAYA KERJA APARATUR
 IK
 Indeks Pelayanan Publik
 Target 2022 = 2,9

Terciptanya kohesi sosial masyarakat
 IK
 Indeks Toleransi
 Target 2022 = 71,5

Peningkatan rasa aman bagi semua lapisan masyarakat
 IK
 Persentase Penegakan Perda
 Target 2022 = 99,6%

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS KOMINFO

SELURUH OPD

BAKESBANG POL

DINAS PENDIDIKAN

SATPOL PP DAMKAR

BAKESBANG POL

BPBD

DINAS BUNNAK

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 IK
 Persentase Kebijakan Strategis dibidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti
 Target 2022 = 100%

Program Aplikasi Informatika
 IK
 Persentase Aplikasi yang menggunakan jaringan intra pemerintah
 Target 2022 = 81,82%

Program Informasi dan Komunikasi Publik
 IK
 Persentase Informasi Publik yang di Publikasikan Perangkat Daerah
 Target 2022 = 81,4%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 IK
 Indeks Pelayanan Instansi
 Target 2022 = 81

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 IK
 Presentase konflik yang difasilitasi
 Target 2022 = 100

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 IK
 Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 Target 2022 = 100%

Program Pengelolaan Pendidikan
 IK
 Angka Harapan Lama Sekolah
 Target 2022 = 12,5

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 IK
 Persentase Penegakan Perda
 Target 2022 = 100%

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 IK
 Respon Time Rate pada daerah layanan WMK
 Target 2022 = 70%

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 IK
 Persentase Ormas yang aktif
 Target 2022 = 50,63%

Program Penanggulangan Bencana
 IK
 Respon Time Penanganan Tanggap Darurat
 Target 2022 = 0,5

Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 IK
 Persentase penurunan tingkat kebakaran perkebunan
 Target 2022 = 2%

Rp. 4,3 Milyar

Rp. 1,4 Milyar

Rp. 0,8 Milyar

Rp. 534,5 Milyar

Rp. 0,75 Milyar

Rp. 23,7 juta

Rp. 1,2 Milyar

Rp. 0,27 Milyar

Rp. 87 juta

Rp. 37,3 juta

Rp. 1,2 Milyar

Rp. 0,48 Milyar

